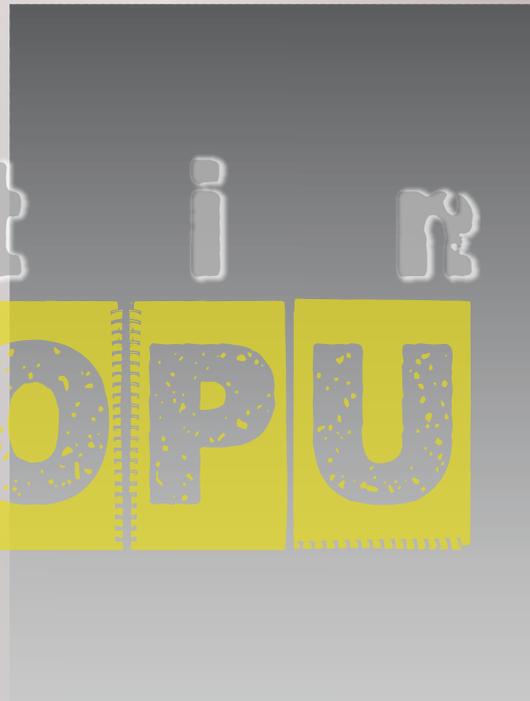
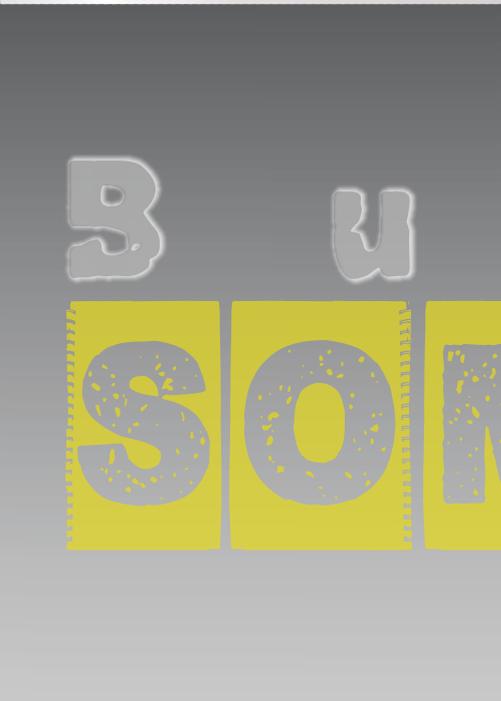




B u l e t i n

SOMBAOPU

VOL. 23 NO. 27 TAHUN 2020





**Balai Pelestarian Cagar Budaya
Sulawesi Selatan**

Ragam MOTIF Gambar Cadas di MISOOL

Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara

Gambar cadas yang ada di pulau misool menggunakan cairan yang diduga terbuat dari campuran batu Memalia yang dituangkan dan di campur cairan yang berfungsi untuk melekatkan hampulle dengan dinding batu.

Gambar cadas di pulau misool dibagi menjadi 4 motif utama, yaitu :

MOTIF CAP TANGAN

Macam-macam motif tangan yang ada di kepulauan Misool : telapak tangan terbuka, telapak tangan yang saling tumpang tindih, kedua telapak tangan yang saling berhadapan di bagian ibu jari dan telunjuk, dan telapak tangan terbuka tanpa salah satu jari / jari terpotong. Motif tangan dengan salah satu jari terpotong merupakan tradisi suku Dani di Papua yang melambangkan kesetihasan ketika kehilangan salah satu anggota keluarga yang disayangi. Tradisi memotong jari menjadi ungkapan kesedihan yang sudah ada sejak dulu.

FAUNA

Sebagian Besar merupakan fauna yang hidup di air seperti Ikan, paus, hiu, dan lumba-lumba. Hal ini menunjukkan bahwa fauna tersebut paling sering mereka jumpai.

GEOMETRI

Yaitu garis yang dibuat hingga membentuk suatu bentuk tertentu seperti : kotak dan lingkaran. Ada yang menyerupai roda cakra, garis, dan menyerupai matahari. Pola geometris ini terkadang terlihat dari kejauhan dan sengaja di gambarkan di tempat yang tinggi yang kemungkinan sebagai penanda sebuah tempat atau penanda supaya tidak teresak.

ANTROPOMORFIK

Yaitu motif yang yang memiliki bentuk manusia. Oleh warga setempat di sebut "manusia kangkang" karena digambarkan dengan posisi tangan dan kaki terbuka (renggang).

B u l e t i n
SOMBAOPU
VOL. 23 No. 27 TAHUN 2020

Diterbitkan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan Wilayah Kerja Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat dimaksudkan sebagai media kajian ilmiah, deskripsi dan survey mengenai Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya serta kegiatan mengenai ilmu-ilmu budaya, yang meliputi bidang-bidang: Sejarah, Arkeologi, Antropologi, Kesenian, Arsitektur, dan bidang lain yang berkaitan.

Redaksi menerima kiriman naskah dari para ahli atau penulis manapun yang berminat pada masalah pelestarian Cagar Budaya dan bidang ilmu yang menjadi cakupan penerbitan buletin ini. Naskah dapat ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris; panjang naskah 10 – 20 halaman kuarto (termasuk daftar acuan), spasi lengkap, karangan harus asli (bukan jiplakan), boleh terjemahan, saduran asalkan disebutkan sumbernya dengan jelas. Redaksi berhak menyunting karangan tanpa mengubah atau menyimpang dari isi karangan. Karangan yang dimuat dalam Buletin Somba Opu walau berisi tentang suatu kritik atau perbedaan pendapat, hal ini bukanlah pendapat Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan, sehingga semua karangan yang telah dimuat oleh Buletin Somba Opu adalah pendapat pribadi dari penulis.

PENULIS

Diyah Wara Restiyati

Dewi Susanti

Andini Perdana

Abdullah - Iswadi

Helmi Yanuar Dwi Prasetyo, SS - Komang Ayu Suwindiatrini, SS

Andriany

Hj. Irwani Rasyid

Laode M. Aksa

Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan
Kompleks Benteng Ujung Pandang Jalan Ujung Pandang No. 1
Makassar, Sulawesi Selatan 90111
email : bpcbmakassar@yahoo.com
www : kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsulsel/
Ph : 0411 3621701 Fax : 0411 3621702

PENULIS

Diyah Wara Restiyati

Dewi Susanti

Andini Perdana

Abdullah - Iswadi

Helmi Yanuar Dwi Prasetyo, SS - Komang Ayu Suwindiatrini, SS

Andriany

Hj. Irwani Rasjid

Laode M. Aksa

ISBN : 1411-2930

Editor :

Moh. Natsir

Desain sampul dan Tata letak

Anzhar

Penerbit :

Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan

Redaksi :

Kompleks Benteng Ujung Pandang

Jalan Ujung Pandang No. 1

Makassar, Sulawesi Selatan 90111

[Email : bpcbmakassar@yahoo.com](mailto:bpcbmakassar@yahoo.com)

www : kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsulsel/

Ph : 0411 3621701 Fax : 0411 3621702

Cetakan Pertama, November 2020

Hak cipta dilindungi undang-undang
dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

DAFTAR ISI

Potensi Pelestarian Bangunan Cagar Budaya Berlanggam Tionghoa di Sumenep Madura	
Diyah Wara Restiyati	1
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Pelestarian MUMI ARABODA Kabupaten Puncak Jaya, Papua	
Dewi Susanti	9
Konsep Revitalisasi Dan Adaptasi Benteng Balangnipa	
Andini Perdana	23
Potensi Ancaman dan Tingkat Keterancaman Sumber Daya Budaya di Kawasan Benteng Cennana	
Abdullah, Iswadi	33
Pemanfaatan QR Code Dalam Penyampaian Informasi Cagar Budaya Kepada Masyarakat	
Helmi Yanuar Dwi Prasetyo, SS - Komang Ayu Suwindiatrini, SS	45
Tawaran Konseptual Pengelolaan Bangkai Kapal Jepang Sungai Balangtang - Malili Sebagai Objek Wisata Berbasis Warisan Sejarah Budaya	
Andriany	53
Potensi Cagar Budaya Di Cennana	
Hj. Irwani Rasyid	65
“Taman Arkeologi Leang-leang Maros”, Rencana Konseptual & Implementasi	
Laode M. Aksa	83

Salam Redaksi

Sejak tahun 1997, Buletin Somba Opu terus berusaha mengembangkan diri dalam menyampaikan informasi terkait Pelestarian Cagar Budaya. Pelestarian Cagar Budaya masa kini banyak berkembang, menggunakan disiplin ilmu yang beragam. Demikian pula dengan tulisan-tulisan dalam Buletin Somba Opu menjadi sangat berkembang dengan menggunakan perspektif berbagai jenis disiplin ilmu yang saling berkaitan. Mencari benang merah dalam Pelestarian Cagar Budaya yang kemudian disampaikan untuk para pembaca Buletin Somba Opu.

Tidak lah mudah memenuhi harapan pembaca Buletin Somba Opu dalam menghadirkan bacaan-bacaan yang menyegarkan dalam bidang Pelestarian Cagar Budaya. Gagasan kreatif dan semangat dalam membagi ilmu Pelestarian sangat dibutuhkan dalam media yang sederhana ini.

Semoga Buletin Somba Opu edisi kali ini dapat menghanyutkan pembaca betapa pentingnya Pelestarian Cagar Budaya karena Pelestarian Cagar Budaya harus dilakukan bersama.

Selamat membaca!





POTENSI PELESTARIAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA BERLANGGAM TIONGHOA DI SUMENEP MADURA

Diyah Wara Restiyati
Kecapi Batara, Kali Besar Timur 3-4 Jakarta
diyahrestiyati@gmail.com

Ikhtisar

Sumenep merupakan salah satu wilayah tempat bermukimnya imigran Tiongkok Selatan di nusantara. Jejak pemukimannya masih dapat ditemukan sampai sekarang, termasuk jejak bangunan nya. Bangunan peninggalan masyarakat Tionghoa yang khas merupakan salah satu kekayaan budaya Sumenep, dan berpotensi untuk dilestarikan sebagai cagar budaya, dan menarik banyak pengunjung dari luar dan dalam Sumenep, sehingga merupakan potensi destinasi wisata bagi Sumenep. Sayangnya banyak bangunan peninggalan masyarakat Tionghoa ini kurang terawat, dan kurang mendapat perhatian dari pihak pemerintah sebagai potensi pelestarian bangunan cagar budaya dan potensi destinasi wisata. Oleh karena itu diadakan penelitian ini untuk membuat identifikasi, deskripsi tiga bangunan Tionghoa yang berpotensi dilestarikan dan menjadi destinasi wisata serta bahan masukan bagi pemerintah Sumenep. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan teknik pengambilan data dengan wawancara, dan pengamatan.

Kata kunci: Tionghoa, Sumenep, Destinasi Wisata, Pelestarian Bangunan, Cagar Budaya

Abstract

Sumenep is one of Chinese settlement where we can find out many of old building. This building has positive potential to be a cultural heritage building and tourism destination of Sumenep. Unfortunately, the Sumenep's local government has less attention to that issue. That's why I did the research to identified and described the Indonesia Chinese old building to be cultural heritage and input for the government. This qualitative research has data sampling by interview and observation methods.

Keywords: Indonesia Chinese, Sumenep, Tourism Destination, Heritage Conservation, Cultural Heritage

Pendahuluan

Masuknya orang Tionghoa ke wilayah Sumenep, menetap, dan berusaha di sana, diperkirakan ketika seorang Tionghoa asal Batavia datang ke Sumenep bersama enam orang temannya. Orang Tionghoa bernama Lauw Khun Ting ini, merupakan pelarian dari Batavia, yang tengah dilanda kerusuhan, dan terjadinya peristiwa pembantaian kepada orang Tionghoa di tahun 1740. Lauw Khun Ting ini merupakan kakek dari Lauw Piango, arsitek Mesjid, dan Keraton Sumenep (Diktis Kemenag, 2017). Orang-orang Tionghoa di Batavia yang sudah menjalin hubungan erat dengan orang-orang Tionghoa di semua kota pesisir termasuk Sumenep menjadikan orang Tionghoa pergi mengungsi ke tempat ini. Apalagi pada tahun sebelum 1718, Keraton Sumenep di bawah pimpinan Pangeran Cakraningrat merupakan salah satu penguasa lokal yang menentang penguasa kompeni (Retno Winarni, 2009). Pada pertengahan abad ke-19 pelabuhan Kalianget di Sumenep menjadi salah satu pelabuhan yang penting dalam perdagangan komoditi internasional, meskipun kapal-kapal yang berlabuh disana berukuran lebih kecil dari pelabuhan lainnya, namun sering dijumpai kapal-kapal nelayan dengan muatan yang banyak untuk dibawa ke tempat lainnya (Denys Lombard, 1996). Kedatangan orang Tionghoa ke Sumenep kemungkinan karena dua hal, pertama karena perdagangan yang ramai dan kedua, Panembahan Notokoesoemo I (memerintah Sumenep pada tahun 1751), mendatangkan orang tukang Tionghoa untuk membangun kota (Onghokham., 2009). Adanya orang Tionghoa di wilayah Sumenep meninggalkan jejak budaya yang khas, seperti terlihat pada bangunannya. Bangunan orang Tionghoa di Sumenep memiliki kekhasan berupa gaya campuran yaitu kolonial, Tiongkok Selatan, Jawa, dan Madura. Bangunan yang paling terlihat dengan khas yaitu Mesjid Agung Sumenep, dan Keraton Sumenep, yang arsiteknya merupakan orang Tionghoa (Lauw Piango). Keraton Sumenep sekarang menjadi museum, dan rumah dinas bupati Sumenep. Berdasarkan pengamatan pada tahun 2019, sebenarnya ada banyak bangunan peninggalan orang Tionghoa di Sumenep, selain Mesjid Agung dan Keraton Sumenep, namun sayangnya bangunan-bangunan ini belum menjadi potensi destinasi wisata di Sumenep. Bangunan ini juga

belum ditetapkan sebagai cagar budaya. Oleh karena itu tulisan ini akan mengangkat tiga bangunan berlanggam Tionghoa yang mewakili dua tipologi bangunan berdasarkan fungsi yaitu sebagai rumah ibadat, sebagai rumah tinggal dan makam. Tiga bangunan Tionghoa ini masih difungsikan sampai sekarang, dan memiliki gaya Tiongkok Selatan untuk bangunan rumah ibadat dan makam, serta gaya campuran antara kolonial, Jawa dan Tionghoa untuk bangunan rumah tinggal. Tiga bangunan cocok untuk dilestarikan karena masih dapat ditemukan pemiliknya, sehingga memudahkan untuk proses pelestarian bersama. Tulisan ini berdasarkan kajian identifikasi dan deskripsi bangunan berlanggam Tionghoa di Sumenep yang dilakukan pada 2019 lalu bersama lembaga Kecapi Batara. Ciri-ciri Bangunan berlanggam Tionghoa (Kecapi Batara, 2018) yaitu:

1. Berbentuk *courtyard*, dengan adanya ruang terbuka di tengah rumah, sehingga terlihat seperti sumur dari atas, biasa disebut dengan *chhimcne/cim-ce* (sumur dalam/sumur langit). Sumur dalam/sumur langit ini berfungsi untuk mengalirkan energi negatif keluar rumah dan energi positif tetap berada di dalam rumah atau ventilasi udara, dan cahaya.
2. Beratap ekor walet atau pelana. Atap ekor walet biasa digunakan untuk rumah pejabat atau opsir Tionghoa dan rumah ibadat, sedangkan pelana untuk rakyat biasa.
3. *Tou-kung/Tou-kung*, kayu besar sebagai penyangga rangka kayu atap, dengan bentuk adaptasi dari bentuk bunga lotus, atau naga.
4. Patung penjaga berupa singa atau *qilin* bergender jantan dan betina, merupakan makhluk mitologis yang dipercaya membawa keberuntungan, dan nilai-nilai baik
5. Penggunaan warna yang melambangkan hal-hal baik, seperti emas/kuning, dan merah.
6. Ornamen dalam bentuk flora dan fauna seperti persik, krisan, bambu, atau naga, burung *fenghuang/hong (phoenix)* dan burung.

Dalam tulisan ini kata Tionghoa akan digunakan untuk menggantikan kata Cina

dikarenakan kata Cina mengandung sindiran tajam, bernada mencela, dan menghina. Tujuan dari kajian ini yaitu:

1. Untuk memberikan gambaran deskriptif mengenai bangunan langgam Tionghoa di Sumenep yang berpotensi menjadi bangunan cagar budaya, dan dilestarikan.
2. Untuk memberi masukan bagi pemerintah mengenai pelestarian dan penetapan bangunan langgam Tionghoa sebagai bangunan cagar budaya.
3. Membuka kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam hal pelestarian bangunan langgam Tionghoa sebagai bangunan cagar budaya.

Kajian untuk membuat tulisan ini menggunakan pendekatan etnoarkeologi, yaitu dengan melihat hubungan manusia dengan tinggalan arkeologis berupa bangunan cagar budaya. Informan utama dalam pendekatan ini yaitu pemilik, penghuni, atau orang yang merawat dan menjaga bangunan, serta masyarakat yang peduli dengan bangunan cagar budaya. Bangunan langgam Tionghoa yang ditinggali para informan dapat disebut sebagai cagar budaya dikarenakan usianya sudah berusia limapuluh tahun atau lebih, mewakili gaya paling singkat berusia limapuluh tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, n.d.). Kajian dilakukan selama satu bulan di tahun 2019.

Hasil dan Pembahasan

Seperti yang sudah dipaparkan pada bagian pendahuluan, ada tiga tipologi bangunan cagar budaya berlanggam Tionghoa yang akan dibahas. Ketiga bangunan tersebut yaitu: Kelenteng Tridharma Pao Sian Lin Kong, Rumah Tinggal dan Makam Lauw Piango.

Kelenteng Tridharma Pao Sian Lin Kong



Foto 1. Bagian depan Kelenteng Tridharma Pao Sian Lin Kong (Sumber: Kecapi Batara)

Kelenteng Tridharma (Buddha, Khonghucu dan Tao) Pao Sian Lin Kong menurut salah seorang pengurus kelenteng, pak Rudi (70 tahun) dibangun sekitar tahun 1851. Namun ada pula yang menuliskan sekitar tahun 1821, mengenai ketepatan tahun berdirinya kelenteng belum bisa ditemukan kebenarannya dikarenakan tidak ada catatan yang masih bisa dibaca mengenai pendirian kelenteng ini. Menurut pak Rudi, kelenteng ini awalnya hanya satu bangunan dengan altar bagi Dewi Makco Thiang Siang Sing Bo atau dewi laut, dan dewi utama bagi nelayan, dan siapapun yang melakukan pelayaran. Bangunan kelenteng pertama kali didirikan di dekat pelabuhan di Kalianget, sekitar lima belas menit dari Sumenep, namun dikarenakan semakin banyaknya umat yang beribadat, maka dipindahkan ke lahan yang lebih besar berlokasi tidak jauh dari Stadion Ahmad Yani. Ada kemungkinan tahun 1821 kelenteng didirikan di Kalianget, dan tahun 1851 didirikan di dekat Stadion Ahmad Yani, dan bangunan kelenteng yang berada di Kalianget sudah tidak ada lagi. Awalnya bangunan kelenteng yang menghadap ke selatan dan memiliki luas 2.658 hektar ini hanyalah satu bangunan yang berada ditengah.

Di tahun 1960-an bangunan kelenteng direnovasi dikarenakan mengalami banjir, dan semakin banyaknya umat yang beribadat di tempat itu. Renovasi secara besar-besaran dilakukan pada

tahun 2003, dengan menambah bangunan di samping dan bagian belakang kelenteng. Pada bagian depan kelenteng terdapat dua patung Qilin jantan dan betina, sebagai penjaga dari hal-hal yang buruk, dan *Hio lo* Thien/Dewa Langit/Tuhan berukuran besar (bejana untuk menancapkan *hio* atau setinggi setelah melakukan ritual berdoa dengan setinggi). Di atas pintu utama terdapat kaligrafi aksara Mandarin yang memiliki makna: “keramatnya mendunia” dan “negara dan lautan tenang”. Kaligrafi aksara seperti ini sudah dipergunakan sejak jaman kaisar pertama Tiongkok, Fu Shi (sekitar 2852 SM) di berbagai benda baik dilukis dengan kuas, maupun di pahat, serta dapat digunakan pula sebagai jimat, dan simbol (Harry T.Morgan, 2007).

Bangunan kelenteng menurut arsitek Tionghoa, pak Tri (56 tahun), selalu mengikuti gaya bangunan kelenteng di Tiongkok. Oleh karena itu di bagian atap bangunan kelenteng selalu ada ornamen seperti bangunan kelenteng di Tiongkok berupa dua ekor naga di bagian kanan, dan kiri, dan bola emas ditengah-tengah kedua naga tersebut sehingga seakan-akan kedua naga tengah memperebutkan bola emas tersebut. Ornamen dua ekor naga dan bola emas berasal dari cerita legenda Tiongkok yang mengisahkan pertarungan dua ekor naga memperebutkan mutiara yang melambangkan matahari. Naga menjadi simbol dari penjagaan, dan kewaspadaan, dan disucikan oleh agama kuno orang Tionghoa. Baju orang Tiongkok yang berlengan panjang dari Dinasti Han sampai Dinasti Qing menampilkan gambar sepasang naga sedang bertarung memperebutkan mutiara (Harry T.Morgan, 2007), seperti di atap Kelenteng. Naga menjadi simbol kekuasaan tertinggi, sedangkan di Kelenteng sebagai simbol kedudukan yang tertinggi, bahwa Kelenteng merupakan tempat suci dan mendapat posisi yang tinggi dari bangunan lainnya di tempat tersebut bagi masyarakat Tionghoa. Sepasang naga juga dimaksudkan untuk melindungi bangunan dari berbagai pengaruh jahat. Atap kelenteng ini berbentuk agak bengkok di tengahnya, merupakan kombinasi antara garis, lengkungan, dan tengadah khas Tiongkok Selatan, yang berfungsi mengurangi beban hujan, sehingga air hujan tidak langsung jatuh ke tanah (Wang Qijun, 2011). Menurut pak Trisno, atap bentuk melengkung dengan bagian ujung lancip seperti ekor walet

menunjukkan simbol status, dan biasanya digunakan untuk istana kerajaan atau rumah pejabat. Pada kelenteng atap berbentuk ekor walet ini menunjukkan bahwa status kelenteng yang tinggi dalam hirarki masyarakat Tionghoa.

Seperti bangunan kelenteng Tridharma lainnya di Indonesia, pada kelenteng ini berada altar Nabi Khonghucu dan altar Tao. Menurut pak Rudi, rupang yang masih asli dibawa para pendiri kelenteng dari Tiongkok Selatan yaitu rupang Dewi Makco dan Dewa Tanah/Bumi Hok Tek Tjeng Xin. Bangunan kelenteng terdiri menjadi lima bilik untuk menempatkan sembilan rupang dewa/dewi, sebuah ruangan pertemuan, satu dapur dan tempat mencuci tangan, satu ruang makan dan beberapa kamar mandi. Hasil pengamatan pada bangunan, bangunan utama yang terdiri dari lima bilik merupakan bangunan asli, dengan tiang kayu yang masih belum diubah. Warna pada kelenteng banyak menggunakan warna merah yang mewakili kebahagiaan, dan kesuksesan, warna hijau yang mewakili umur panjang, dan warna emas untuk keagungan. Ornamen, bentuk, dan warna pada kelenteng ini dipengaruhi kepercayaan Buddha, Khonghucu dan Tao. Menurut pak Rudi kelenteng ini sudah dijadikan bangunan cagar budaya oleh pemerintah namun tidak ditemukan adanya papan informasi mengenai bangunan cagar budaya, pihak kelenteng juga tidak pernah mendapatkan informasi dan sosialisasi dari pemerintah mengenai status cagar budaya.

Rumah Tinggal



Foto 2. Rumah Tinggal bergaya campuran
(Sumber: Diyah Wara Restiyati)

Bangunan kedua yang diidentifikasi yaitu bangunan rumah tinggal di dekat Stadion Ahmad Yani. Bangunan bergaya kolonial, Arab, dan Tionghoa ini berlokasi sederet dengan kelenteng, dan dibangun sekitar tahun 1800-an. Percampuran gaya bangunan di wilayah pesisir Jawa dan Madura merupakan hal yang biasa terjadi dikarenakan perdagangan antara penduduk lokal dengan pedagang dari Arab, Tiongkok, dan Eropa sering terjadi (Bachtiar Fauzy, Antariksa, 2011). Saat ini bangunan masih dihuni oleh generasi ke-empat dari penghuni pertama. Luas bangunan sekitar 3.000 m, bangunan utama berupa ruang tamu, dan ruang tengah dengan dua kamar, dan satu dapur dengan satu kamar tidak ada perubahan. Menurut ibu Ani (70 tahun), pemilik rumah saat ini, perbaikan yang dilakukan pada rumah utama seperti atap yang bocor dan pengecatan tembok saja. Di bagian belakang yang dulunya merupakan kebun belakang terdapat bangunan tambahan yang difungsikan sebagai rumah tinggal. Pada bagian depan bangunan dibagi dua berupa teras dan satu bilik yang difungsikan untuk kamar. Atap rumah masih memakai genteng, lantainya masih memakai tegel, dan dinding rumah masih tembok yang dilapisi kapur. Jendela rumah masih menggunakan model krapyak, dan pintu rumah masih berlapis dua, bagian pertama terbuat dari kayu dengan model krapyak dari kayu, dan bagian kedua terbuat dari kayu dan kaca. Rumah bagi masyarakat Tionghoa bukan sekedar tempat tinggal melainkan juga melambangkan status dan nilai-nilai yang

dianut keluarga yang menempatinnya. Bangunan dengan susunan halaman, teras, ruang depan, ruang tengah, ruang belakang, dan dapur, serta kamar berada di sisi kanan dan kiri, sama dengan bentuk rumah bergaya Tiongkok Selatan. Menurut Wibowo (49 tahun), ahli budaya Cina, mengatakan kamar sebelah kanan pada rumah tinggal tradisional bergaya Tiongkok Selatan diperuntukkan untuk perempuan, sedangkan kamar sebelah kiri diperuntukkan untuk para laki-laki. Namun pada rumah bergaya Tionghoa, aturan tersebut sudah tidak diikuti, meskipun bentuknya masih diikuti. Pada rumah tinggal yang dibangun oleh orang Tionghoa yang memiliki posisi penting dalam masyarakat Tionghoa di lokasi tempat tinggalnya atau jabatan atau pekerjaan dalam pemerintahan kolonial VOC dan Hindia Belanda umumnya akan membangun rumah tinggal bergaya campuran dengan kolonial misalnya gaya indis, atau *neo empire* (Bachtiar Fauzy, Antariksa, 2011). Hal ini yang ditemukan pada rumah ibu Ani. Rumah yang awalnya dibangun dan dimiliki oleh orang Tionghoa ini dibeli oleh orangtua ibu Ani, seorang bidan. Rumah ini kemudian ditempati oleh ibu Ani beserta suaminya yang merupakan seorang penyiar di stasiun radio. Rumah ini menurut ibu Ani sering dikunjungi oleh para peminat bangunan lama atau sejarah budaya Sumenep tapi belum dijadikan cagar budaya dan belum ada papan informasi mengenai cagar budaya.

Makam



*Foto 3. Makam bergaya Tiongkok Selatan/
Bongpai (Sumber: Kecapi Batara)*

Bangunan ketiga merupakan makam bergaya Tiongkok Selatan dengan papan atau batu nisan yang terbuat dari batu atau marmer disebut dengan Bongpay. Lokasi makam bertempat di desa Pangarangan, sebuah desa yang bangunannya masih mempertahankan gaya Tiongkok Selatan, sebagai asal dari pemukim Tionghoa di desa tersebut (Onghokham., 2009). Makam ini menurut pak Ahmad (38 tahun), penduduk di sekitar, merupakan makam arsitek Mesjid Agung Sumenep, dan Keraton Sumenep, Lauw Piango. Makam Lauw Piango berukuran besar karena orang Tionghoa biasa menguburkan orang yang meninggal dalam peti dari kayu berbentuk uang emas yang besar, beserta barang barang kesayangan atau yang dianggap berharga milik orang yang meninggal. Oleh karena itu makam orang Tionghoa biasanya berbentuk gundukan yang tinggi dan besar, serta sering menjadi incaran para pencuri yang mengetahui bahwa biasanya orang Tionghoa kaya yang meninggal, akan membawa emas, perhiasan dan barang berharga yang dimiliki dalam makamnya. Makam Lauw Piango seperti umumnya makam orang Tionghoa yang masih mengikuti tradisi leluhur, memiliki nisan berbentuk bulat besar dengan ukiran huruf mandarin yang dibaca dari kanan ke kiri, dan dari atas ke bawah. Pada bagian tengah terdiri dari masa atau waktu saat bongpay dibuat atau diperbaiki di bagian kanan, dan nama dan status yang meninggal di bagian tengah. Apabila di samping kanan dan kiri tulisan mandarin tersebut terdapat tulisan mandarin lain, maka biasanya

tulisan tersebut akan menuliskan sajak atau syair yang menyertai kepergian si meninggal. Hasil wawancara dengan pak Hen (37 tahun), salah satu pengurus rumah duka di Tangerang mengatakan bahwa penulisan pada Bongpay umumnya berasal dari jaman Dinasti Ming (1368-1644) dan diteruskan sampai sekarang. Biasanya makam orang Tionghoa yang masih menggunakan Bongpay menghadap ke arah laut, dan berlokasi di perbukitan atau lebih tinggi dari rumah tinggal. Lokasi bongpay ini mengikuti ajaran Confusius ketika ibunya meninggal di makamkan di gunung Hong San. Confusius mengajarkan kepada masyarakat Tiongkok bahwa manusia merupakan makhluk yang utama, meskipun sudah tidak bernyawa namun tetap harus menghormati dengan menguburkan secara baik dan di lokasi yang baik (Putri Astoria, 2013). Ajaran confusius ini yang masih diikuti oleh masyarakat Tionghoa. Kematian bagi masyarakat Tionghoa merupakan salah satu proses dalam perjalanan hidup manusia selain kelahiran. Masyarakat Tionghoa juga mempercayai adanya reinkarnasi manusia, berupa jiwa yang akan lahir pada kehidupan mendatang didalam raga lain. Reinkarnasi seseorang akan terlahir menjadi manusia kembali tergantung pada karma baik yang sudah dilakukan sepanjang hidup. Apabila seorang manusia lebih banyak memiliki karma buruk daripada karma baik, kemungkinan besar jiwa manusia tersebut tidak akan terlahir kembali dalam bentuk manusia, melainkan dalam bentuk fisik hewan atau tumbuhan, atau manusia yang tidak lengkap secara fisik atau inderanya. Makam Lauw Piango ini sayangnya tidak terawat, meskipun berada di areal pemakaman keluarga. Pada kawasan pemakaman juga tidak ada papan informasi mengenai cagar budaya.

Kesimpulan

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyatakan bahwa cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, n.d.). Bangunan peninggalan masyarakat Tionghoa di Sumenep memiliki gaya yang khas, masih dapat dilacak sejarahnya, karena itu memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan sosial budaya, sehingga memerlukan perlindungan melalui proses pelestarian dan dapat dimasukkan sebagai cagar budaya. Prinsip pelestarian menurut Sidharta dan Budihardjo, harus berdasarkan (Antariksa, Hany Perwitasari, 2010) :

1. Penghargaan terhadap keadaan semula dari suatu tempat supaya tidak mengubah bukti sejarah.
2. Menangkap kembali makna kultural dari suatu tempat dan harus menjamin keamanan pemeliharannya di masa mendatang.
3. Suatu bangunan, lingkungan/kawasan bersejarah harus tetap berada di lokasi historisnya.

Pelestarian bangunan peninggalan masyarakat Tionghoa dipastikan akan memberikan pengetahuan nilai nilai budaya pada masa lalu, masa kini, dan masa sekarang serta dapat dimanfaatkan sebagai potensi destinasi wisata (Ika Dewi Retno Sari, 2012). Ketiga bangunan bergaya Tionghoa yang sudah dipaparkan layak untuk dilestarikan dan dijadikan cagar budaya dikarenakan:

1. Ketiga bangunan masih dapat ditelusuri sejarahnya untuk menjadi bagian dari sejarah Sumenep dan disebarkan pengetahuannya kepada generasi sekarang dan masa depan.
2. Ketiga bangunan masih dapat dilihat bentuk fisiknya untuk penjelasan mengenai gaya bangunan pada masa pemerintahan VOC atau kolonial Hindia Belanda.

3. Ketiga bangunan masih bisa dilestarikan sesuai dengan bentuk aslinya, karena bentuk aslinya tidak hilang.
4. Dua bangunan sudah dipelihara dan dirawat dengan baik dan secara rutin oleh pemilik atau pengurus bangunan, pihak pemerintah hanya perlu memberikan pelatihan perawatan bangunan sesuai dengan prinsip konservasi, dan memastikan keamanan bangunan yang akan dilestarikan.
5. Pemerintah bisa bekerjasama dalam perawatan bangunan di bangunan kelenteng dan rumah tinggal, terutama dalam fasilitasi dana pemeliharaan, dan promosi bangunan cagar budaya sebagai destinasi wisata.
6. Pemerintah hanya perlu memfokuskan pada satu bangunan untuk dirawat secara rutin yaitu makam Lauw Piango yang berhubungan dengan sejarah bangunan di kota Sumenep.

Untuk pelaksanaan pelestarian, pemerintah harus melibatkan masyarakat, terutama pemilik dan pengurus bangunan, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, dan tenaga ahli yang sesuai seperti dalam UU Cagar Budaya No.11 Tahun 2010.

Daftar Pustaka

- Antariksa, Hany Perwitasari, F. U. dan I. P. (2010). *Pendekatan Deskriptif-Eksploratif dalam Pelestarian Arsitektur Bangunan di Kawasan Pecinan Kota Pasuruan*.
- Bachtiar Fauzy, Antariksa, P. S. (2011). *Bentuk dan Struktur Konstruksi Arsitektur Rumah di Kawasan Pesisir Utara Jawa Timur*.
- Denys Lombard. (1996). *Nusa Jawa Silang Budaya 2 Jaringan Asia*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Diktis Kemenag. (2017). *Pembinaan Keragaman Cina Muallaf di Dungkek, Sumenep Jawa Timur*.
- Harry T.Morgan. (2007). *China Simbol dan Mistik*. Alfamedia.
- Ika Dewi Retno Sari. (2012). *Kota Lama Semarang, Situs Sejarah yang Terpinggirkan*. *Berkala Arkeologi*, 32(Edisi No.2), 195.
- Kecapi Batara. (2018). *Bangunan Cagar Budaya Berlanggam Cina di Jakarta*. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (n.d.). *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2017. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Onghokham. (2009). *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa (David Reeve (ed.); Second)*. Komunitas Bambu.
- Putri Astoria. (2013). *Upacara Kematian Cina Peranakan*. Gramedia.
- Retno Winarni. (2009). *Cina Pesisir Jaringan Bisnis Orang-orang Cina di Pesisir Utara Jawa Timur Sekitar Abad XVIII*. Pustaka Larasan.
- Wang Qijun. (2011). *Chinese Architecture*. Shanghai: Shanghai: Shanghai Press and Publishing Development Company and Better Link Press.



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PELESTARIAN MUMI ARABODA KABUPATEN PUNCAK JAYA, PAPUA

*Dewi Susanti
(Staf Unit Maros-Pangkep, Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan)*

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang pelibatan masyarakat dalam upaya menjaga kelestarian Mumi Araboda, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Upaya pelestarian yang selama ini masih dominan dilakukan secara sederhana oleh masyarakat (keturunan), tanpa melakukan sesuai standar pelestarian. Masyarakat merupakan salah satu *stakeholder* yang secara tidak sadar dapat merusak serta mengubah kondisi lingkungan asli perkampungan Batankima. Tulisan ini bertujuan untuk membuat strategi pelibatan masyarakat dalam upaya pelestarian mumi Araboda, dengan tujuan agar dapat mencegah dan mengatasi kerusakan yang terjadi selama ini pada mumi. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menciptakan kelestarian Mumi Araboda dan lingkungannya yang beriringan dengan perkembangan dan pertumbuhan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang meliputi studi pustaka, observasi, dan wawancara. Analisis data meliputi analisis faktor-faktor penyebab kerusakan dan kepentingan *stakeholder*. Tahapan terakhir adalah perumusan bentuk keterlibatan masyarakat dalam upaya pelestarian.

Dari hasil pengamatan dan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa tingkat kerusakan yang terjadi pada Mumi Araboda disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Kerusakan yang terjadi akibat aktivitas manusia ini menunjukkan

belum adanya kepedulian masyarakat terhadap tinggalan arkeologis berupa mumi beserta lingkungannya. Selain itu, tingkat pemahaman masyarakat perkampungan Batankima sangat minim, namun masyarakat Batankima memiliki keinginan untuk terlibat dalam upaya pelestarian yang dilakukan. Keterlibatan masyarakat perkampungan Batankima adalah dalam bentuk organisasi. Dalam pelaksanaan organisasi ini diharapkan masyarakat juga memperoleh manfaat secara ekonomi.

Kata kunci: *Mumi, Araboda, Batankima, Masyarakat, Kerusakan, Perkampungan, Lingkungan, Konservasi*

A. Latar Belakang

Di Kabupaten Jayawijaya proses pengawetan mumi dilakukan dengan cara pengasapan. Mumi yang terdapat di Kabupaten Jayawijaya merupakan hasil karya intelektual nenek moyang suku Hubula yang mendiami lembah Baliem bernilai sangat tinggi, kehadirannya sebagai warisan budaya dapat membangkitkan kebanggaan akan sejarah peradaban manusia dan kebudayaan daerah Jayawijaya, dan juga sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia. Mumi merupakan Cagar Budaya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau

kebudayaan, ini sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Jumlah mumi yang ada di Kabupaten Jayawijaya diketahui ada lima buah yaitu Mumi Pumo, Mumi Aikima, Mumi Araboda, Mumi Jiwika dan satu mumi lainnya masih dirahasiakan masyarakat setempat. Mumi tersebut semuanya berada dalam perlindungan masyarakat adat dan ada juga yang telah dimanfaatkan sebagai objek wisata. Kondisi fisik mumi saat ini cukup memprihatinkan dan tingkat kerusakan dan pelapukan yang terjadi cukup tinggi. Kerusakan yang terjadi pada umumnya berupa pengelupasan pada bagian kulit, tulang belulang dan jaringan otot yang telah rapuh, tulang yang terlepas dari persendiannya, goyang, ada bagian tulang yang hilang, otot-otot kering atau serat daging yang bergantung, permukaan kulit yang berlubang-lubang, dan ada bagian-bagian tubuh mumi yang sudah sangat rapuh, beberapa bagian tubuh yang dimakan binatang, dan ulat, serta menjadi tempat serangga bersarang. Kerusakan yang terjadi pada mumi disebabkan karena faktor usia, dan faktor lingkungan.

Dalam tulisan ini penulis akan memilih mumi Araboda sebagai objek kajian, mengingat bahwa diantara mumi yang ada di kabupaten Jayawijaya mumi yang dianggap paling tua. Selain itu, kondisi penyimpanan mumi dianggap unik karena disimpan dalam keranjang yang kemudian digantung dekat perapian dalam Honai. Tingkat ancaman juga cukup tinggi mengingat bahwa mumi berada di perkampungan yang kondisi kurang layak, karena mumi ini disimpan dalam Honai yang hampir rapuh dan ketika terjadi musim hujan, maka mumi ini akan lembab. Upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian mumi Araboda dengan upaya konservasi sudah dianggap tepat. Namun untuk tetap menjaga kelestarian keberadaan mumi Araboda ini tidak hanya sampai pada upaya konservasi tetapi upaya lain yang dianggap penting adalah dengan melakukan pelibatan masyarakat dalam menjaga kelestariannya. Hal yang menarik sehingga perlu dilakukan upaya pelibatan masyarakat yang bermukim diperkampungan ini masih menunjukkan nuansa masyarakat tradisional. Karakteristik masyarakat petani masih dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, upacara adat pada hari-hari tertentu, serta berburu binatang. Kondisi ini masih mendukung integrasi lingkungan alam dan

kehidupan tradisional masyarakatnya. Hal tersebut dapat menjadi dukungan bagi sistem pelestarian dan pengembangan perkampungan tradisional Batankima. Untuk tetap menjaga kondisi tersebut diperlukan sebuah usaha. Usaha yang dimaksud adalah pelibatan masyarakat dalam upaya pelestarian. Dalam usaha ini, masyarakat dilibatkan dan diberikan pengetahuan tentang cara mencegah dan mengatasi kerusakan lingkungan yang berakibat pada penurunan kualitas Mumi sebagai akibat aktivitas manusia.

B. Maksud dan Tujuan

Tulisan ini bertujuan untuk membuat strategi pelibatan masyarakat dalam upaya pelestarian mumi Araboda, dengan tujuan agar dapat mencegah dan mengatasi kerusakan yang terjadi selama ini pada mumi. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menciptakan kelestarian Mumi Araboda dan lingkungannya yang beriringan dengan perkembangan dan pertumbuhan masyarakat.

C. Metode

Pada penelitian ini dilakukan pengumpulan data dengan sebanyak-banyaknya yang terkait dengan sejarah Mumi Araboda, upaya-upaya apa yang telah dilakukan, jenis kerusakan Mumi Araboda dan peran *stakeholder*. *Stakeholder* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah individu/perorangan atau kelompok yang berkepentingan dengan pengelolaan dan pelestarian Mumi Araboda, baik yang terkait secara langsung maupun yang tidak langsung.

1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui tiga cara yaitu studi pustaka, observasi, dan wawancara.

- a) Studi pustaka yang dimaksudkan adalah penelusuran dan mendapatkan data serta informasi dari berbagai sumber baik berupa laporan, buku, makalah, tesis, skripsi, dan artikel-artikel baik dari sumber internet maupun sumber lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.

- b) Observasi atau pengamatan dilakukan dengan melakukan pengamatan pada perkampungan dan Mumi Araboda. Pengamatan baik berupa aktivitas penduduk, pengunjung, kondisi mumi dan lingkungannya. Observasi ini dilakukan dengan membuat catatan, dan pendokumentasian.
- c) Wawancara dilaksanakan untuk mendapatkan data yang belum terhimpun dalam pengamatan. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini, cenderung tidak formal, bersifat mendalam, dan dapat dikembangkan oleh peneliti sendiri. Wawancara ini dilakukan terhadap masyarakat yang bermukim di sekitar dan di dalam perkampungan Batankima, pengunjung, dan instansi yang memiliki keterkaitan dan hubungan dengan lokasi dan masalah penelitian.

2) Analisis Data

Analisis data meliputi analisis faktor-faktor penyebab kerusakan dan kepentingan *stakeholder*. Pada analisis dilakukan identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada Mumi Araboda, baik faktor alam maupun faktor manusia. Faktor alam mengacu pada hasil analisis klimatologi yang telah dilakukan dan faktor manusia meliputi aktivitas para *stakeholder*. *Stakeholder* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah individu/perorangan atau kelompok yang berkepentingan dengan pelestarian perkampungan Batankima khususnya untuk tinggalan Mumi Araboda. Dalam analisis *stakeholder* hal utama yang dilakukan adalah melakukan identifikasi beragam individu/perorangan, kelompok dan institusi yang terkait dengan kelestarian dan pemanfaatan perkampungan Batankima.

3) Perumusan Bentuk Pelibatan Masyarakat

Tahapan terakhir adalah perumusan bentuk keterlibatan masyarakat dalam upaya pelestarian mumi dan perkampungan Batankima. Berdasarkan perolehan data tentang apresiasi dan posisi, kepentingan dan keinginan masyarakat, maka dapat dirumuskan bentuk pelibatan masyarakat dalam upaya pelestarian yang mengedepankan masyarakat sebagai pemangku kepentingan.

D. Pembahasan

1. Sejarah Mumi Araboda

Mumi Araboda adalah mumi seorang kepala suku perang yang berkuasa di wilayah adat Araboda Omarekma. Kepala suku (mumi) tersebut bernama "Alongkah Hubi" yang berarti Hubi yang tertua. Dari generasi Alongkah Hubi ke generasi sekarang tidak diketahui dengan pasti ada berapa jumlahnya, namun dari informasi yang diberikan oleh bapak Pabu adalah mulai mumi Alongkah Hubi, kemudian ada beberapa generasi yang tidak diketahui nama-namanya, kemudian Nagalel, Alikmo, Mokateak, Malukunti, Polikpalek, dan Pabu beserta anak cucu (generasi sekarang ini).

Alongkah Hubi mati karena usia tua, kemudian tubuhnya dikeringkan oleh masyarakat karena ia seorang kepala suku perang. Mumi Alongkah Hubi awalnya berada di Kampung Tua (di Asologaima), namun karena terjadi perang suku maka mumi tersebut dibawa keluar untuk dilindungi oleh keturunan, dan sekarang ini mumi ditempatkan di Kampung Batankima.

Proses pembuatan mumi Alongkah Hubi dilakukan oleh dua orang laki-laki di dalam Honai khusus dengan cara pengasapan, sebelum diasapi terlebih dahulu isi organ tubuh bagian dalam mayat dikeluarkan melalui dubur, kemudian tubuh tersebut ditempatkan di atas perapian selama beberapa bulan hingga tidak mengeluarkan cairan lagi atau telah kering. Dalam proses pemumian tersebut, kedua orang yang melakukannya berpuasa untuk berbagai aktivitas maupun makan-minum, dan selama itu mereka hanya boleh makan petatas (*hipere*) dan mengisap tebu (*el*) sebagai pengganti air. Setelah jasad menjadi kering atau mumi, kemudian mereka dan seluruh masyarakat melakukan upacara adat khusus untuk mumi sebelum menempatkannya ke dalam Honai adat.

Saat ini, kondisi fisik mumi Araboda telah mengalami cukup banyak kerusakan, baik karena umur mumi yang semakin tua, juga karena dipindah-pindahkan saat perang suku terjadi, ada bagian organ mumi yang dimakan

rayap/serangga, ruang dalam mumi pernah menjadi sarang tikus, sarang laba-laba, dan tempat bersarang ulat serta karena kelembaban udara. Melihat kondisi fisik mumi tersebut, jika tidak segera mendapat perawatan maka tingkat kerusakannya akan menjadi semakin banyak dan mumi terancam rusak.

2. Keadaan Lingkungan dan Masyarakat Kampung Batankima

Secara administrasi Kampung Batankima terletak di Desa Araboda, Distrik Asologaima. Kampung ini merupakan kampung adat dari klan Hubi, dan merupakan tempat tinggal kepala suku perang. Nama kampung Batankima diambil dari nama Kali Bantak yaitu kali yang mengalir didekat kampung.



Gambar. Kampung Batankima

Kampung Batankima dibangun di area lembah dengan pola perkampungan yang sama seperti umumnya perkampungan suku Hubula yaitu pola memanjang dengan orientasi bangunan rumah tertata mengelilingi halaman tengah kampung, rumah laki-laki (*honai/pilamo*) berkonstruksi bulat berada di posisi paling belakang yang didirikan dengan arah hadap pintunya sejajar dengan gapura masuk kampung di depannya, sedangkan rumah perempuan

(*ebeai*) berkonstruksi bulat dan dapur (*hunila*) berkonstruksi panjang berada pada posisi kirikan halaman kampung antara pilamo dan gapura (*mokaraila*). Pada bagian sisi-sisi bangunan terdapat pagar (*leget*) yang menghubungkan satu bangunan dengan lainnya sehingga tampak halaman kampung yang terlindungi di tengahnya. Pada bagian luar kampung dibuat pagar keliling kampung yang menyatu di bagian depan dengan gapura /pintu masuk kampung.

Semua bangunan dalam kampung memiliki satu pintu masuk berukuran kecil, kecuali dapur yang memiliki dua pintu masuk. Honai/pilamo berukuran lebih besar dari ebeai, namun sama-sama memiliki dua lantai dan pada lantai satu terdapat perapian di tengahnya. Honai/pilamo dalam kampung ini berjumlah dua buah, yang lama dibagian belakang dan yang baru dibangun di halaman kampung sebagai tempat tinggal dan tempat penyimpanan mumi. Karena ada penambahan bangunan Honai baru di halaman kampung tepat di depan hunila, maka hunila dibongkar dan dibangun baru dengan letak yang sedikit menggeser ke arah depan samping ebeai.



Gambar. Pagar Pembatas Pilamo dan Halaman Kampung

Sebelum pembangunan Honai baru, di halaman kampung terdapat pagar yang memisahkan antar ruang pilamo dengan ebeai dan hunila. Pagar tersebut sebagai pembatas ruang gerak kaum perempuan dan anak-anak sehingga tidak memasuki area sakral. Pada area pekarangan samping dan belakang Honai maupun ebeai dan hunila menjadi tempat menanam tembakau, petatas (*hipere*), pisang, jeruk, alpukat, pisang, jambu dan

tumbuh berbagai jenis tanaman pohon maupun rumput. Halaman kampung berfungsi sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas sosial budaya seperti acara adat, kremasi mayat, tempat anak-anak bermain, dan lainnya.



Gambar. Aktivitas di Dalam Kampung

Keadaan lingkungan sekitar kampung terdapat kali Bantak, beberapa kampung lain yang penduduknya masih satu kerabat, ada kandang babi dan kebun, serta tumbuh sejumlah pohon-pohon besar seperti kasuarina, cemara, pum, jagat, alpokat, jeruk, jambu dan lainnya.



Gambar. Keadaan Lingkungan Sekitar Kampung

Iklm di kampung dan sekitarnya cukup dingin dan lembab, curah hujan cukup tinggi, sehingga tanah yang terkena air hujan menjadi berlumpur dan becek didukung lagi oleh ternak babi yang berkeliaran bebas dan menyungkur tanah serta membuang kotoran dimana-mana.

Masyarakat Kampung Batankima hidup bersama dan terlihat kompak dengan masyarakat dari kampung-kampung sekitarnya, yang merupakan kerabat mereka. Aktivitas masyarakat kampung adalah berkebun di ladang masing-masing, ada yang pergi ke pasar, ada yang merajut noken, mengasuh anak, dan lainnya.



Gambar . Pembangunan Kampung Adat

Selain itu nampak juga suatu pola hidup gotong royong dan bagaimana masyarakat adat berswadaya dalam rangka pembangunan kampung adat, terutama bangunan Honai untuk mumi dan kaum laki-laki, rumah perempuan, dan dapur. Dalam pembangunan ini tampak suatu kerjasama antara laki-laki dan perempuan dengan menjalankan peran masing-masing, serta anak-anak yang juga tidak kalah dalam mengambil bagian di kegiatan tersebut. Secara umum suasana kampung Araboda cukup ramai, namun terkadang di pagi dan siang hari terlihat sepi karena penghuninya sebagian besar pergi ke kebun dan ada juga yang berjualan di pasar.

3. Faktor- Faktor Penyebab kerusakan

Hasil pengamatan yang telah dilakukan di lapangan, diketahui bahwa kerusakan dan pelapukan yang terjadi pada mumi Araboda berupa kerusakan mekanis, pelapukan fisis, pelapukan khemis, dan pelapukan biotis. Berikut akan diuraikan faktor-faktor penyebab terjadinya kerusakan dan pelapukan pada mumi Araboda.

a) Kerusakan mekanis

Kerusakan mekanis yang terjadi pada mumi Araboda disebabkan oleh aktivitas manusia dan binatang. Kerusakan mekanis yang terjadi berupa retak, pecah, ada bagian yang hilang, dan ada beberapa bagian yang patah. Kerusakan mekanis yang terjadi pada mumi Araboda yang disebabkan oleh binatang seperti anjing dan tikus, aktivitas binatang ini berdampak pada bagian tubuh mumi. Aktivitas tikus memberikan dampak yang cukup tinggi terhadap kondisi mumi, mengingat bahwa pada saat observasi dan pembersihan pada bagian-bagian tubuh mumi banyak ditemukan sisa-sisa alang-alang, tulang, kotoran tikus. Selain itu, kerusakan juga disebabkan karena adanya aktivitas manusia (vandalisme). Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan pada saat pengumpulan data di lapangan diketahui bahwa mumi Araboda ini sering dibawa pindah – pindah tempat ketika terjadi perang suku. Selain itu, diperoleh

juga informasi bahwa ada bagian mumi yang hilang kulit seperti, telapak tangan dan beberapa buah ruas jari kaki dipotong oleh orang asing yang datang berkujung ke tempat tersebut.

b) Pelapukan secara fisis

Pelapukan fisis yang terjadi pada mumi Araboda disebabkan karena tempat penyimpanan mumi pada *Honai* yang kondisi kurang terawat. Selain itu karena pengaruh tingkat kelembaban yang cukup tinggi sehingga mempercepat terjadinya pelapukan. Berdasarkan hasil pengamatan suhu dan kelembaban selama pelaksanaan konservasi dengan *ranges* waktu pengamatan pukul 08.00, 12.00, dan 16.00 diperoleh suhu rata-rata 25°C dan 69.2%. Pelapukan fisis yang terjadi pada mumi dapat kita lihat pada kondisi mumi yang telah mengalami pengelupasan pada bagian kulit mumi. Bagian-bagian tulang mumi yang sudah tidak memiliki kulit mengalami tingkat kerapuhan yang cukup tinggi. Bagian-bagian mumi ini yang telah mengalami tingkat kerapuhan terjadi pada bagian leher, badan, bahu, tangan, paha, betis, dan bagian telapak kaki mumi.

c) Pelapukan secara biotis

Pelapukan secara biotis merupakan proses penghancuran bahan baku (kulit) mumi itu sendiri yang akibatkan dari aktivitas makhluk hidup, sehingga menyebabkan kerusakan yang bersifat mekanis dan pelapukan secara khemis. Contoh pelapukan biotis yang bersifat mekanis adalah berlubang-lubang dan pemecahan bagian dari mumi tersebut akibat aktivitas rayap dan tikus.

Pertumbuhan mikroorganisme/jamur pada mumi tidak merata. Pertumbuhan jamur pada umumnya ditemukan pada bagian kepala, punggung, lengan, di dalam tubuh mumi, betis, paha, kaki, dan pada bagian tumit. Adapun jenis-jenis pertumbuhan mikroorganisme pada mumi adalah jamur, bakteri, dan rayap.

1) Jenis Jamur

Jenis tumbuhan jamur ini akan tumbuh pada kondisi yang lembab dan berpori. Sumber makanan dari jamur tersebut adalah debu yang melekat pada pori-pori tubuh mumi. Kehidupan yang lama dan menutupi permukaan tubuh mumi mengakibatkan pelapukan yang selanjutnya menjadikan sumber makanan, kemudian akan mati, kering dan mengelupas pada saat musim kemarau/kondisi kering. Pada saat terjadi pengelupasan maka akan membawa partikel/ kulit yang sudah rapuh, sehingga mengakibatkan terjadinya aus dan rapuh pada tubuh mumi.

2) Rayap

Rayap (anai-anai) atau semut putih (*white ant*) dibedakan menjadi dua golongan yaitu rayap tanah dan rayap kayu kering. Rayap tanah adalah rayap yang hidup dalam tanah, membuat sarang dalam tanah, namun kadang-kadang juga membuat sarang diatas permukaan tanah, diantaranya ditemukan di atas plafon suatu gedung bertingkat. Rayap kayu kering yaitu rayap yang bersarang di dalam kayu kering baik dalam kayu kering yang digunakan untuk bahan bangunan maupun dalam ranting atau batang mati yang terdapat di lapangan.

Rayap adalah serangga sosial pemakan selulosa yang keberadaannya di dunia meliputi 1990 jenis. Mereka hidup dalam masyarakat-masyarakat dengan organisasi yang tinggi dan terpadu, atau koloni-koloni dengan individu yang secara morfologi dibedakan menjadi bentuk-bentuk berlainan yang disebut dengan kasta yaitu kasta reproduktif, kasta pekerja dan kasta prajurit yang melakukan fungsi biologi yang berbeda tetapi mempunyai kepentingan yang sama untuk koloninya (Subyanto, 2006).

Mengacu dari hasil uraian diatas dan berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan di lapangan, diketahui bahwa rayap yang terdapat pada mumi Araboda adalah rayap kayu kering. Rayap kayu kering ini sangat berbahaya terhadap mumi dan apabila tidak dilakukan penanganan maka lama kelamaan

akan menyebabkan pelapukan yang cukup tinggi terhadap tubuh mumi tersebut.



Gambar. Jenis rayap yang ada di mumi Araboda

3) Kumbang Penggerek

Kumbang penggerek dibedakan menjadi tiga kelas yaitu; 1) kumbang bubuk (*Lyctidea, Bostrychidae*), 2) penggerek lubang jarum (*Scolytidae, platypodidae*), 3) cacing kayu (*brentidae, lymexylidae*). Kumbang-kumbang ini hidup dengan cara menggerek objek/ mumi untuk mendapatkan pati yang dikandung di dalamnya, pati merupakan makanan bagi kumbang-kumbang tersebut. Namun jenis kumbang penggerek yang ditemukan pada mumi Araboda adalah kumbang bubuk (*Lyctidea, Bostrychidae*) dan kumbang penggerek lubang jarum. Mengacu dari hasil observasi yang dilakukan pada mumi Araboda, dapat diidentifikasi mengenai tingkat pelapukan biotis pada umumnya disebabkan oleh aktivitas rayap (anai-anai atau semut putih) dan kumbang penggerek. Tingkat pelapukan yang disebabkan oleh aktivitas rayap (anai-anai atau semut putih) umumnya terjadi pada bagian kepala, badan, punggung, lengan, paha dan betis, serta pada bagian kaki mumi.



Gambar. Jenis kumbang yang ditemukan pada mumi Araboda

a. Identifikasi Kerusakan dan pelapukan

Kondisi Awal Mumi Araboda



Gambar. Mumi di dalam Honai dan di Ruang Kerja



Gambar. Kondisi Mumi Setelah Dibuka dari Kurungan Kawat

1) Bagian Kepala

Mumi Araboda memiliki lingkaran kepala dengan ukuran 54,2 cm, pada bagian tengkorak kepala masih terdapat sisa pertumbuhan rambut yang menempel pada sisi kanan dan kiri. Pengelupasan kulit kepala terjadi pada hampir keseluruhan permukaan kepala yakni sekitar 80 % sehingga yang nampak tinggal tempurung kepala, pengelupasan juga terjadi pada kulit wajah sebesar 10 %. Pada bagian dagu sebelah kiri bawah kulit wajahnya sudah hilang sehingga nampak berlubang dengan ukuran 5 cm x 3 cm. Lubang – lubang serangga baik makro maupun mikro merata hampir pada keseluruhan wajah, leher dan kepala.

Akumulasi debu, dan larva serangga serta jasad renik lainnya masih kita jumpai terutama pada bagian kulit kepala yang terkelupas dan pada bagian rongga lubang makro dan mikro. Pertumbuhan

jamur juga masih terlihat terutama pada bagian kulit wajah, leher dan tengkorak kepala bagian depan.



Gambar.

1. Kepala mumi yang telah mengalami pengelupasan kulit kepala,
2. Bagian bibir yang sudah hilang,
3. Kondisi muka/ wajah yang ditumbuhi jamur,
4. Kondisi kepala yang banyak ditumbuhi jamur dan serangga

2) Bagian Badan

Bagian punggung memiliki ukuran tinggi 56 cm dengan lebar 37,5 cm, terdapat lubang besar dimana kulit punggungnya sudah hilang dengan ukuran 20 cm x 27 cm. Punggung sebelah kanan atas juga sudah hilang dan berlubang dengan ukuran 4 cm x 10 cm. Badan bagian depan diukur dari dada sampai perut memiliki tinggi 54 cm x 35 cm.

Pengelupasan kulit pada bagian badan mumi terjadi pada sebagian kulit perut, sebagian kulit punggung, dan sebagian kulit dada. Pengelupasan kulit tersebut ditandai dengan terlepasnya kulit mumi dari rangka tulang akan tetapi kulit tersebut belum hilang. Badan mumi di bagian bokong terdapat lubang besar dengan ukuran 4 cm x 6 cm, sedangkan rongga dalam badan mumi terdapat sisa – sisa makanan pengerat (tikus) berupa serabut pohon, rumput dan beberapa buah potongan kecil tulang babi.



Gambar.

1. Bagian kulit badan yang telah hilang,
2. Kondisi tulang rusuk yang telah patah

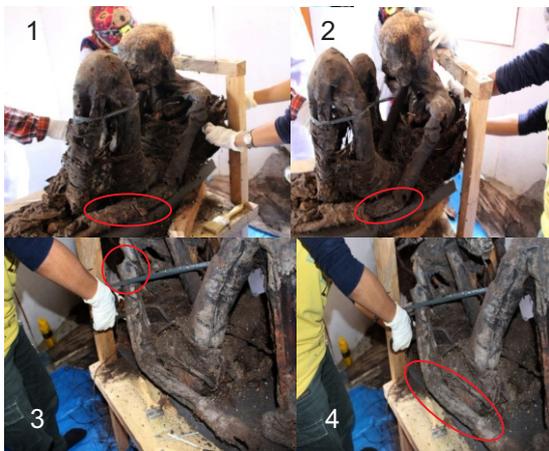


Gambar
3. Kotoran yang ada didalam tubuh mumi,
4. Jamur yang ada di bagian badan

3) Bagian Tangan

Ukuran tangan kanan panjangnya adalah 73,8 cm sedangkan tangan kiri memiliki ukuran panjang 62 cm, perbedaan ukuran panjang ini dikarenakan pada tangan kiri seluruh pergelangan tangan sampai jari sudah hilang. Hasil observasi pada bagian tangan kanan diketahui bahwa, telah terjadi pengelupasan kulit pada lengan atas dengan ukuran 9 cm x 10,5 cm, lengan bawah mengalami pembusukan yang diakibatkan oleh aktifitas yang mengakibatkan kulit tangan kanan berlubang sedangkan jamur tampak pada bagian siku.

Tangan kiri sudah tidak utuh lagi oleh karena telapak tangan sudah hilang, kulit lengan atas terkelupas dan hilang dengan ukuran 11,5 cm x 15 cm, telapak tangan bagian kiri dan kanan dibungkus dengan kulit pohon. Akumulasi debu, lubang mikro dan makro, larva dan rumah serangga juga masih terdapat pada kedua tangan mumi yakni tangan kanan maupun tangan kiri.



Gambar. Kerusakan yang terjadi pada bagian tangan mumi

4) Bagian Kaki

Panjang kaki kiri adalah 93 cm, sedangkan panjang kaki kanan adalah 94,8 cm, perbedaan panjang kaki kiri dan kaki kanan terjadi karena telapak dan jari-jari kaki kanan/kiri sudah tidak utuh. Pengukuran panjang kaki mumi ini diukur dari pangkal paha hingga ujung jari kaki.

Kulit kaki sebelah kiri di bagian betis terkelupas dan hilang dengan ukuran 26,3 cm x 3,2 cm, kulit bagian paha hilang dengan ukuran 6 cm x 3 cm. Sedangkan telapak kaki sudah tidak utuh beberapa ruas jari terlepas bahkan ada yang sudah hilang. Kerusakan dan pelapukan lainnya yang terjadi adalah pengelupasan kulit kaki, akumulasi debu, jamur serta lubang – lubang serangga baik yang berukuran mikro maupun berukuran makro.

Pada kaki sebelah kanan dibagian paha terjadi kerusakan berupa lubang sebesar 8,5 cm x 3 cm, betis bagian depan juga terjadi pengelupasan kulit sepanjang 29 cm x 9 cm sehingga tulang betis kelihatan. Bagian telapak kaki kanan terbungkus oleh kulit pohon, yang ketika dibuka ternyata kulit telapak kaki tersebut sudah terlepas yang tinggal hanya pada bagian tumit saja. Hasil identifikasi pada bagian kaki ini juga menunjukkan bahwa caput tulang paha yang menghubungkan antara kaki kanan dan badan mumi telah bergeser lepas, berbeda halnya dengan kaki sebelah kiri kondisinya hanya goyang. Secara keseluruhan kondisi mumi Araboda sangat kotor, berdebu, dipenuhi belatung dan larva serangga, serta beberapa buah tulangnya telah terlepas dan hilang.



Gambar. kerusakan yang terjadi pada bagian kaki

1. Kepentingan Stakeholder terhadap Mumi Araboda

Kebijakan dan pelestarian sumber daya arkeologi, tidak lagi harus dilihat dari perspektif arkeologi semata, tetapi dari berbagai perspektif pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini, dilakukan untuk mengetahui keinginan dari berbagai pihak (*stakeholder*) terhadap sumber daya arkeologi, serta untuk mengurangi potensi munculnya konflik kepentingan. Di sisi lain, hal ini dilakukan untuk mewujudkan pelestarian sumber daya arkeologi yang dilakukan secara bersama oleh pihak-pihak terkait dan paling utama adalah melibatkan masyarakat setempat. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang arkeologi, diketahui bahwa untuk menjaga kelestarian sumber daya arkeologi masyarakat setempat harus dilibatkan. Tujuan pelibatan masyarakat tersebut yaitu agar masyarakat dapat memahami dan terlibat secara langsung dalam upaya menjaga kelestarian Mumi Araboda. Berkaitan dengan adanya kepentingan-kepentingan dari para *stakeholder* yang tidak dapat diketahui melalui pengamatan langsung, berikut ini akan diuraikan hasil pengumpulan informasi melalui penelusuran wawancara dengan para *stakeholder*.

a) Masyarakat Kampung Batankima

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat yang bermukim di perkampungan Batankima ini sangat minim, dalam hal ini hanya beberapa warga yang memiliki pendidikan itupun hanya sampai pada tingkat sekolah dasar (SD). Pengetahuan mereka tentang Cagar Budaya tidak ada, mereka hanya sebatas mengetahui bahwa di wilayah mereka ada sebuah Mumi yang dipercaya sebagai nenek moyang mereka dan akan mereka jaga dengan sebaik mungkin. Namun, pemahaman mereka tentang bagaimana cara untuk menjaga kelestarian dan perawatan mumi tersebut sama sekali mereka tidak memiliki pengetahuan.

b) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Jayawijaya melalui

pengembangan di sektor pariwisata menyusun rencana kerja tahunan yang berisi visi, misi dan program sebagai penjabaran dari misi. Visi Disbudpar adalah menjadikan pariwisata sebagai sektor penggerak pembangunan daerah yang berbasis masyarakat dan dijiwai oleh nilai-nilai agama dan adat istiadat. Misi dari Disbudpar adalah 1) menguatkan peran, fungsi dan kapasitas kelembagaan kebudayaan dan pariwisata; 2) mengembangkan destinasi ekowisata yang berbasis penduduk; 3) membangun kesiapan sosial (kesadaran masyarakat) dalam membangun destinasi pariwisata; 4) membangun jejaring dan kemitraan dalam pengembangan produk dan promosi pariwisata; 5) meningkatkan fasilitas pengembangan seni dan budaya daerah.

Visi dan misi, Disbudpar Kabupaten Jayawijaya diwujudkan dengan membuat program kerja berupa 1) program pelayanan administrasi perkantoran; 2) peningkatan sarana dan prasarana aparatur; 3) peningkatan disiplin aparatur; 4) peningkatan sumber daya aparatur; 5) peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan; 6) pengembangan destinasi pariwisata; 7) pengelolaan kekayaan budaya; 8) pengembangan nilai budaya; 9) pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya; 10) pengembangan kemitraan; 11) pengelolaan keragaman budaya.

Langkah awal yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk melaksanakan program kerjanya adalah melakukan pembuatan rumah adat (Honai) di beberapa perkampungan yang ada di wilayah Puncak Jaya. Selain itu, upaya yang dilakukan oleh Dinas dalam rangka menjaga warisan nenek moyang mereka adalah dengan cara melakukan konservasi pada beberapa mumi yang ada di daerah Puncak Jaya, salah satunya adalah Mumi Araboda. Upaya ini dianggap sangat penting sehingga pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berusaha semaksimal mungkin untuk upaya pelestariannya.

5. Analisis Kepentingan Stakeholder

No	Pihak	Posisi	Kepentingan	Kebutuhan
1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Jayawijaya	Instansi Pemerintah yang memiliki wewenang untuk pemanfaatan sumber daya arkeologis	Menjadikan Mumi dan Perkampungan Tradisional Batankima sebagai daerah tujuan wisata	Meningkatkan PAD
2	Masyarakat Lokal	Melakukan aktivitas di sekitar perkampungan dan perawatan terhadap Mumi	Memanfaatkan lahan untuk bertani dan menjaga keberadaan Mumi sebagai penghargaan terhadap nenek moyang mereka	Lahan untuk aktivitas sehari-hari untuk peningkatan ekonomi keluarga dan tempat yang layak untuk tempat penyimpanan Mumi

6. Upaya Konservasi dan pelibatan masyarakat

1. Penanganan kerusakan (konservasi)

Pelaksanaan kegiatan konservasi mumi terdiri dari beberapa jenis kegiatan meliputi pembersihan secara mekanis, sterilisasi, konsolidasi, dan perbaikan serta pengawetan lemari vitrin menggunakan bahan-bahan tradisional.

a) Pembersihan mekanis

Pembersihan secara mekanis dimaksudkan untuk menghilangkan debu yang menempel pada permukaan mumi, serangga, sarang serangga, kotoran hewan, dan kotoran-kotoran lainnya yang dibawa oleh binatang (tikus) masuk kedalam tubuh mumi. Langkah awal sebelum pembersihan mumi yaitu dengan melepas pembungkus yang bukan bagian dari tubuh mumi seperti tali rotan, kulit kayu dan dudukan kulit kayu. Untuk menghilangkan debu yang terdapat pada permukaan mumi, cukup dibersihkan dengan kuas, sikat gigi, secara perlahan-lahan. Akan tetapi untuk serangga, sarang serangga, kotoran hewan dan kotoran lain yang telah

masuk pada sela-sela maupun bagian dalam tubuh mumi dapat dihilangkan dengan bantuan alat-alat seperti lidi, sikat gigi, jarum *stick*, scapel ataupun di-*setting* set. Namun perlu diperhatikan penggunaan alat-alat seperti jarum *stick* ataupun di-*setting* set harus sangat hati-hati, jangan sampai alat-alat tersebut menggores atau merusak mumi. Pembersihan mekanis ini juga dilakukan pada asesoris mumi berupa topi dan kulit pohon pembungkus mumi.

Pada saat penanganan mumi dengan pembersihan mekanis ditemukan ada beberapa jenis *insect* (serangga), antara lain



Gambar. Beberapa jenis serangga ditemukan saat pembersihan

Sterilisasi dilakukan untuk membersihkan mikroorganisme berupa bakteri dan pertumbuhan jamur yang menempel pada permukaan mumi. Kegiatan ini dilakukan dengan langkah-langkah yaitu mempersiapkan bahan dan peralatan teknis seperti kuas, spoit, masker dan sarung tangan. Aplikasi bahan dengan cara mengoleskan bahan pelarut yaitu larutan Alkohol 96% pada seluruh permukaan mumi menggunakan kuas secara hati-hati. Selain pengolesan, aplikasi bahan juga dilakukan dengan cara menginjeksi pada bagian tertentu mumi yang sudah lapuk. Perlakuan sterilisasi ini dilakukan sebanyak 3 kali sehingga diperoleh hasil yang lebih maksimal. Kegiatan sterilisasi juga dilakukan dengan pengolesan pada bahan aksesoris mumi dan bahan baru kulit pohon.

c) Perbaikan

Kegiatan perbaikan yang dilakukan untuk mumi Araboda yaitu pengeleman dan penguatan. Bahan perekat yang dipakai adalah lem fox. Pengeleman dilakukan pada rambut-rambut mumi yang terlepas dari kepala, pada bagian tulang-tulang mumi yang terlepas dari rangkanya dan bagian kulit-kulit yang terlepas. Pada bagian tulang-tulang dari rangka mumi yang telah rekat sempurna, diperkuat dengan menggunakan kawat baja

d) Konsolidasi

Konsolidasi adalah bentuk perkuatan struktur permukaan mumi yang lapuk dan rapuh. Pengolesan larutan konsolidasi merupakan kegiatan terakhir dari kegiatan konservasi sebelum mumi disimpan, larutan konsolidasi berfungsi sebagai lapisan pelindung agar terhindar dari faktor-faktor yang mempercepat proses pelapukan. Bahan yang digunakan untuk konsolidasi adalah bahan kimia berupa Paraloid B-72 dengan menggunakan bahan pelarut berupa Ethyl acetat dengan konsentrasi terdiri dari 1%, 2%, dan 3%. Penggunaan larutan dengan kadar 3% diperuntukkan pada bagian mumi yang telah mengalami tingkat pelapukan yang cukup tinggi, khususnya di bagian badan dan kaki.

e) Pemasangan Kulit Kayu

Penanganan terakhir terhadap mumi Araboda dengan memakaikan kulit kayu, namun terlebih dahulu pada bagian dalam

tubuh mumi diberi akar wangi. Pemasangan kulit kayu pada mumi seperti cawat hingga ke bagian dada. Ada juga pada bagian telapak kaki dan tangan.

2. Upaya pelibatan Masyarakat

Upaya pelibatan masyarakat untuk menjaga kelestarian Mumi Araboda menurut Tanudirjo (2005) mengatakan bahwa masyarakat adalah elemen utama yang berperan dalam upaya menjaga kelestarian Cagar Budaya. Masyarakat dapat memberikan arti dan nilai terhadap Cagar Budaya yang ada di lingkungan mereka atau diperkampungan Batankima. Pandangan masyarakat terhadap sumber daya arkeologi bervariasi, ada yang beranggapan sebagai sarana hiburan dan rekreasi, pelampiasan hobby, atau ada juga yang beranggapan sebagai bagian dari industri pariwisata yang dapat menghasilkan uang dan memberikan manfaat secara ekonomi pada masyarakat setempat (Tanudirdjo, 2005: 1).

Hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan pada masyarakat pada saat pengumpulan data lapangan, diketahui bahwa Mumi Araboda yang selama ini hanya disimpan dalam Honai dan tidak dimanfaatkan atau di *publish* sebagai objek wisata. Keterbatasan pengetahuan masyarakat yang ada di perkampungan Batankima ini menyebabkan kondisi Mumi yang sangat mengkhawatirkan dan tingkat kerusakan dan pelapukannya cukup tinggi. Melalui penelitian ini, penulis mencoba membuat strategi pelibatan masyarakat agar semua elemen khususnya masyarakat setempat dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hal utama yang harus dilakukan sebelum perumusan pelibatan masyarakat dalam pelestarian Mumi Araboda adalah memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada mereka tentang upaya perawatan Mumi agar tidak terjadi kerusakan yang lebih lanjut serta bagaimana cara agar dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Upaya yang dilakukan untuk pelibatan masyarakat dalam pelestarian Mumi Araboda adalah bagaimana cara agar masyarakat bisa menikmati secara langsung dalam hal ini dampak ekonomi. Mengingat masyarakat yang ada di perkampungan Batankima ini pada umumnya lebih mengutamakan masalah ekonomi daripada keterawatan Mumi tersebut. Untuk mendukung keberhasilan pelestarian yang berbasis masyarakat dalam usaha menjaga kelestarian Mumi Araboda

dan lingkungannya, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keahlian. Maka dari itu, masyarakat diberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keberdayaan masyarakat. Contoh pelatihan yang dilakukan adalah manajemen organisasi, pembuatan souvenir, pengolahan makanan tradisional dan pengemasannya, dan yang paling utama adalah membangun masyarakat yang sadar lingkungan dan peduli terhadap kondisi serta keberadaan Mumi Araboda sehingga pengetahuan masyarakat tentang penyebab terjadinya kerusakan dan jenis-jenis kerusakan Mumi, dan lingkungannya sudah dipahami dan diketahui, sehingga dengan melihat kondisi kerusakan yang terjadi masyarakat sudah mengetahui bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang sedang terjadi. Untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam penanganan kerusakan dan pelapukan yang terjadi pada Mumi Araboda dan lingkungannya, maka perlu dilakukan pendekatan pengembangan masyarakat. Keberhasilan kegiatan pengembangan suatu wilayah sangat tergantung pada dukungan komunitas disekitarnya, dimana karakter masyarakat secara fisik sosial budaya merupakan sumber daya utama. Maka pelestarian lingkungan fisik ini perlu memandang masyarakat lokal sebagai sumber daya yang dinamis yaitu sebagai subjek dan bukan sekedar objek. Pendekatan ini perlu ditempuh karena masyarakat di perkampungan Batankima adalah orang-orang yang paling tahu kondisi sosial budaya setempat.

Setiap kegiatan yang dilakukan harus memperhitungkan keinginan masyarakat di sekitar wilayah tersebut. Oleh karena itu, setiap langkah keputusan perencanaan harus mencerminkan masyarakat lokal yang secara aktif ikut terlibat di dalamnya. Dengan melibatkan masyarakat dari awal maka akan lebih menjamin kesesuaian program pengembangan dengan aspirasi masyarakat setempat, kesesuaian dengan kapasitas yang ada, serta menjamin adanya komitmen masyarakat karena adanya rasa memiliki yang kuat. Konsep pendekatan ini secara jangka panjang akan meningkatkan kontinuitas yang tinggi. Dalam melakukan pengembangan masyarakat setempat, ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan yaitu memajukan tingkat hidup masyarakat sekaligus melestarikan identitas budaya dan tradisi lokal, meningkatkan tingkat pendapatan secara ekonomis sekaligus mendistribusikan merata pada masyarakat lokal, berorientasi pada pengembangan usaha berskala kecil dan menengah dengan daya serap

tenaga besar dan berorientasi pada teknologi tepat guna, mengembangkan semangat kompetisi sekaligus kooperatif, dan memanfaatkan pariwisata seoptimal mungkin sebagai agen penyumbang tradisi budaya dengan dampak seminimal mungkin. Merujuk dari penjelasan di atas mengenai pelibatan masyarakat dalam upaya pelestarian Mumi dan perkampungan Batankima, akan memberikan manfaat secara sosial ekonomi secara adil.

E. Penutup

Mumi Araboda beserta perkampungannya dan lingkungannya memiliki nilai penting yang sangat tinggi berupa nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan dan nilai penting kebudayaan. Melihat pentingnya Mumi Araboda ini dalam kajian arkeologi, maka Mumi Araboda ini perlu mendapat perhatian yang serius. Hal ini, seiring dengan berlakunya Undang-undang No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang memberikan arahan yang jelas dan mengakomodasi berbagai kepentingan tentang perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan situs cagar budaya untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengumpulan data lapangan, diketahui bahwa kondisi Mumi dan perkampungannya, saat ini telah mengalami tingkat kerusakan yang cukup tinggi, sehingga perlu dilakukan upaya penanganan kerusakan dan penataan lingkungan beserta pemukimannya. Kerusakan Mumi pada umumnya disebabkan oleh faktor alam, sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan yang cukup tinggi. Kerusakan akibat pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat ini disebabkan karena ketidaktahuan mereka bahwa aktivitas yang mereka lakukan mengakibatkan terganggunya kelestarian Cagar Budaya beserta lingkungannya. Melihat kondisi kerusakan yang terjadi pada Mumi Araboda dan lingkungannya, maka perlu dilakukan upaya konservasi. Konservasi yang dilakukan pada Mumi Araboda ini tidak hanya difokuskan pada objek semata, tetapi perlu adanya pelibatan masyarakat yang tinggal di sekitar dan di dalam perkampungan Batankima tersebut. Dalam melakukan konservasi yang berbasis masyarakat perlu ada sebuah konsep tentang bentuk upaya yang bisa dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat. Konsep yang dibuat dapat disepakati oleh masyarakat adalah dalam bentuk organisasi desa. Organisasi ini menunjukkan bahwa masyarakat merupakan bagian penting (pemangku kepentingan). dalam pelestarian tinggalan arkeologi dan lingkungannya.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip, Sumber resmi tercetak, dan sumber internet

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Buku, makalah, dan tulisan ilmiah

Anonim. 1989. **Kamus Besar Bahasa Indonesia**. Jakarta : Balai Pustaka.

Abd., San Afri Awang, Ris Hadi Purwanto dan Erny. Manusia dan Lingkungan, Vol. 20, No.1, Maret. 2013: 11-21. Analisis Stakeholder Pengelolaan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, Provinsi Sulawesi Selatan (*Stakeholder Analysis of Bantimurung Bulusaraung National Park Management, South Sulawesi Selatan Province*).

Atmosudiro, Sumijati. 2012. Konsep Pelestarian Cagar Budaya. Makalah disampaikan dalam Pembinaan Teknis Pelestarian Cagar Budaya. Medan 2 sampai 8 Juli 2012.

Emilia, Fransisca. 2013. Pengelolaan Sumber daya Alam Berbasis Masyarakat dalam Upaya Konservasi Daerah Aliran Sungai (Studi Kasus Desa Keseneng, Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang). *Tesis*. Semarang: Program Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro.

Gunawan Suratmo, 1991, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Press.

Karikasam, S.N. 2000. Mengelola Konflik (Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak). Jakarta: The British Council.

KS, Timbul, dkk. 2001. Laporan Pemetaan dan Pengukuran Gua-Gua Prasejarah Kompleks Bellae, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Makassar: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar.

Maizer Said Nabdi. Karunia, Vol. IV, No. 2, Oktober 2008: 159-172. Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Hutan Tropis Berbasis Masyarakat.

Salle, Salmunius. 2006. Studi Persepsi Masyarakat terhadap Hutan dan Keberadaan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.

Setyowati, Endah. 2014. Worskhop Analisis Konflik dalam Pengelolaan Sumber daya Arkeologi. Disampaikan dalam workshop Analisis Konflik Mahasiswa Pasca Sarjana Jurusan Arkeologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Tanudirjo, Daud Aris. 2003. Warisan Budaya untuk Semua Arah Kebijakan Pengelolaan Warisan Budaya Indonesia di Masa Mendatang. Makalah disampaikan dalam Kongres Kebudayaan V. Bukit Tinggi, Sumatera Barat 19-23 Oktober 2003.

----- . 2005. Peranan Masyarakat dalam Pelestarian Bangunan dan Kawasan Bersejarah. Makalah disampaikan dalam Penguatan Pelestarian Warisan Budaya dan Alam. Badan Pelestari Pusaka Indonesia 22 September 2005.



KONSEP REVITALISASI DAN ADAPTASI BENTENG BALANGNIPA

*Andini Perdana
Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan*

Benteng Balangnipa merupakan situs Cagar Budaya yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1999. Meskipun penetapannya belum berdasar pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya namun benteng tetap diperlakukan sebagai Cagar Budaya. Perlakuan khusus tersebut dari segi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, baik terhadap fisik maupun nilai yang terkandung didalamnya.

Benteng Balangnipa telah beberapa kali mengalami alih fungsi. Ketika pertama kali didirikan oleh Persekutuan tiga kerajaan, *Tellu Limpoe*, di tahun 1557, benteng dijadikan sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan pertahanan *Tellu Limpoe*.

Setelah dikuasai Belanda, Benteng Balangnipa dijadikan sebagai pusat pemerintahan dan juga sebagai tempat hunian pasukan tentara Belanda serta pusat berbagai aktivitas. Untuk mempertahankan posisinya yang sering mendapatkan serangan dari kerajaan-kerajaan di Sinjai, Belanda pun memperkuat dinding benteng dengan pemasangan tembok keliling. Mereka juga mendirikan bangunan berarsitektur Eropa didalam benteng yang hingga kini masih dapat kita saksikan.



Foto 1 Benteng Balangnipa
tampak atas (Dokumentasi BPCB Sul-Sel)

Pada masa pendudukan Jepang di Sinjai, fungsi Benteng Balangnipa kemudian kembali mengalami perubahan. Benteng dijadikan sebagai pusat latihan kemiliteran Jepang. Setelah Indonesia merdeka, benteng difungsikan sebagai markas Polisi Republik Indonesia untuk Daerah Sinjai dan pusat pemerintahan Daerah Sinjai sementara. Sampai pada akhirnya benteng dikosongkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan di tahun 1984-1985.

Benteng Balangnipa kemudian dikelola oleh Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan (saat ini bernama Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan, disingkat BPCB Sul-Sel). Pemugaran benteng untuk pertama kalinya dilakukan oleh BPCB Sul-Sel pada tahun 1985, kemudian ditempatkan juru pelihara untuk memelihara benteng. Upaya pelestarian terus digalakkan dan saat ini benteng dialihfungsikan sebagai museum, tempat pembinaan budaya, dan arena seni budaya tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai.



Foto 2 Museum Daerah Kabupaten Sinjai
di Gedung A Benteng Balangnipa
(Dokumentasi BPCB Sul-Sel)

Pemanfaatan terus dilakukan, namun di lain sisi, penurunan kondisi fisik benteng pun tidak dapat dihindari. Dinding benteng, bangunan, struktur, bastion, hingga lingkungan sekitarnya terus mengalami degradasi kualitas fisik. Kondisi tersebut membuat benteng kusam dan tidak terawat. Padahal Benteng Balangnipa dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, sosial, kebudayaan, dan pariwisata.

Penurunan kualitas fisik Benteng Balangnipa yang disebabkan oleh berbagai faktor tersebut, jika dibiarkan akan menambah kerusakan bahkan kehancuran benteng. Salah satu upaya pengembangan yang dapat dilakukan oleh BPCB Sul-Sel adalah revitalisasi dan adaptasi. Dengan harapan Benteng Balangnipa dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Peningkatan vitalitas Benteng Balangnipa beserta lingkungannya dilakukan dengan mempertimbangkan aspek sosial budaya, karakteristik benteng dan tinggalan didalamnya, lingkungan, serta masyarakat sekitar. Revitalisasi merupakan bentuk intervensi fisik yang berpotensi merusak, sehingga harus dilakukan oleh pihak yang kompeten dan dibarengi dengan kajian.

Tulisan ini membahas tentang kajian revitalisasi Benteng Balangnipa yang berdasar pada prinsip pelestarian untuk kesejahteraan masyarakat. Tulisan akan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu *pertama*; sejarah Benteng Balangnipa, menjelaskan tentang sejarah pendirian benteng, tinggalan didalamnya, dan alihfungsinya sejak dibangun hingga kini. *Kedua*; konsep revitalisasi Cagar Budaya, sebagai dasar revitalisasi benteng. *Ketiga*; persepsi masyarakat, menjelaskan ekspektasi masyarakat tentang pengembangan dan pemanfaatan benteng. *Keempat*; konsep revitalisasi Benteng Balangnipa, sebagai hasil kajian revitalisasi.

Situs Benteng Balangnipa

Benteng Balangnipa terletak di jalan Sungai Tangka, dusun Takinjong, kelurahan Balangnipa, kecamatan sinjai Utara, ibukota Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Penamaan Balangnipa sendiri merupakan perpaduan dari dua kata *balang* dan *nipa*. *Balang* artinya sungai sedangkan *nipa* adalah nama pohon sagu yang banyak tumbuh di sekitar sungai Tangka.

Benteng yang didirikan pada tahun 1557 ini, memiliki denah segi empat, dengan empat bastion, dan menghadap utara ke arah Sungai Tangka. Konstruksinya berupa susunan batu gunung yang direkatkan dengan lumpur Sungai Tangka. Dinding keliling benteng berukuran panjang dinding utara 49,45m; sisi barat 49,10m; sisi selatan 30,37m; dan sisi timur 49,27m. Ketinggian dinding tembok 4m dari permukaan tanah dan ketebalannya 40-50 cm.

Benteng ini dijadikan sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan pertahanan oleh *Tellu Limpoe*, sebuah aliansi persekutuan tiga kerajaan, yaitu Kerajaan Bulu-Bulo, Tondong dan Lamatti. Tidak mengherankan, benteng ini kerap disebut dengan nama Benteng *Tellu Limpoe*.

Setelah pertempuran yang hebat dengan pihak belanda, disebut *Rumpa'na Manggarabombang* atau perang Mangarabombang, tahun 1559, Benteng Balangnipa pun jatuh ke tangan Belanda. Pemerintah Belanda kemudian mendirikan bangunan berarsitektur Eropa didalam benteng, dalam kurun waktu 1684-1868, sebagaimana yang tertera pada dinding pintu masuk benteng. Pada masa itu, benteng dijadikan sebagai tempat hunian pasukan tentara Belanda, sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat berbagai aktivitas.

Pada masa kependudukan Jepang, Benteng Balangnipa dijadikan sebagai pusat latihan kemiliteran Jepang yang merekrut pemuda-pemuda Sinjai. Sebagai upayanya untuk memenangkan perang Asia Timur Raya. Pada akhir masa pendudukan Jepang, Benteng Balangnipa di bom oleh pihak sekutu yang menyebabkan hancurnya dua bangunan di sebelah barat dan tenggara benteng.

Setelah Indonesia merdeka, benteng kemudian dijadikan sebagai markas Polisi Republik Indonesia untuk Daerah Sinjai. Juga pernah dijadikan sebagai pusat pemerintahan Daerah Sinjai untuk sementara pada masa pemberontakan DI/TII tahun 1956 – 1959. Sampai pada akhirnya Benteng Balangnipa dikosongkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 1984-1985 dan dikelola oleh BPCB Sul-Sel.

Berbagai upaya pelestarian terus dilakukan oleh BPCB Sul-Sel, diantaranya membentuk sebuah unit kerja Kabupaten Sinjai, yang mengelola Cagar Budaya di kabupaten tersebut, termasuk Benteng Balangnipa. Selain itu dilakukan kajian, pendataan, zonasi, pemugaran, revitalisasi, dan adaptasi di benteng.

Benteng Balangnipa juga telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya oleh Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan, dengan nomor Surat Keputusan 240/M/1999 tanggal 4 Oktober 1999. Sementara nomor inventarisasinya adalah 278 yang diberikan oleh BPCB Sul-Sel. Didalam benteng juga terdapat bangunan atau struktur Cagar Budaya, sebagai berikut :

1. Gedung A, terletak pada bagian depan dengan arah hadap ke selatan. Gedung ini merupakan bangunan utama, terdiri dari dua lantai. Pada lantai dasar terdapat selasar di tengah yang dijadikan sebagai pintu masuk satu-satunya ke dalam benteng. Sementara lantai dua, dijadikan sebagai perkantoran dan ruang pameran tetap Museum Kabupaten Sinjai. Terlihat dari tata ruangnya, bangunan ini dahulunya juga berfungsi sebagai perkantoran.
2. Gedung B, terletak di sebelah timur gedung A yang memanjang hingga bastion 2. Bangunan ini terdiri dari satu lantai yang terdiri dari 4 ruang. Salah satu ruang di gedung ini terindikasi difungsikan sebagai dapur yang memiliki cerobong asap pada bagian atas dan lubang penyimpanan kayu bakar di bagian bawah.
3. Gedung C terletak di bagian timur benteng. Bangunan ini terdiri dari dua lantai, yang dihubungkan oleh tangga kayu unik, berbentuk melingkar. Bangunan dulunya difungsikan sebagai barak komandan atau perwira.
4. Struktur D, terletak dekat dengan dinding timur benteng ke sudut tenggara dekat bastion 3. Struktur ini tampak sudah tidak terlihat lagi.
5. Gedung E, terletak di dinding selatan agak menyudut ke tenggara bastion 3. Bangunan ini terdiri dari dua lantai yang masing-masing memiliki dua kamar besar dan serambi. Bangunan dulunya difungsikan sebagai barak pasukan.
6. Struktur F, terletak berdempetan dengan dinding gedung E di bagian baratnya. Posisi struktur ini juga berdekatan dengan sumur.

7. Struktur G, terletak di sebelah selatan dinding benteng. Struktur yang merupakan bekas pondasi ini, kondisinya hampir rata dengan tanah dan diperkirakan sebagai bekas dinding benteng yang telah runtuh.



Foto 3. Struktur H Benteng Balangnipa
(Dokumentasi BPCB Sul-Sel)

8. Struktur H, terletak di sisi selatan benteng. Struktur membujur dari utara selatan ini merupakan reruntuhan bangunan tanpa atap yang tidak diketahui bentuknya. Diduga, struktur ini difungsikan sebagai tempat penyimpanan amunisi atau mesiu.
9. Struktur I terletak memanjang dari utara ke selatan, berbentuk persegi panjang dan tidak diketahui fungsinya.
10. Gedung J, terletak di sebelah barat gedung A, memanjang dari timur ke barat hingga mendekati sudut barat laut bastion 2. Gedung ini terdiri dari satu lantai dengan 4 ruangan. Salah satu ruangan digunakan sebagai dapur yang bentuknya mirip dengan gedung B.
11. Bastion, terletak di setiap sudut benteng. Bastion 1 berada di sudut barat laut, bastion 2 di sudut timur-laut, bastion 3 di sudut tenggara, dan bastion 4 di sudut barat-daya. Bentuk dari keempat bastion tersebut sama dan terdiri dari dua lantai. Bagian bawah merupakan sebuah ruangan yang dilengkapi dengan pintu dan jendela berjeruji. Ruang bawah di setiap bastion

difungsikan berbeda, seperti ruang bawah bastion sudut barat-daya diperkirakan merupakan penjara, karena dilengkapi dengan pintu masuk yang dapat dikunci, jendela kecil yang diperkuat, dan terdapat bak air kecil. Hal ini tidak ditemukan di ruang bawah bastion lainnya, yang mungkin hanya digunakan sebagai tempat pengintaian. Sementara bagian atas bastion merupakan dinding tanpa atap yang kemungkinan difungsikan sebagai tempat senjata meriam.



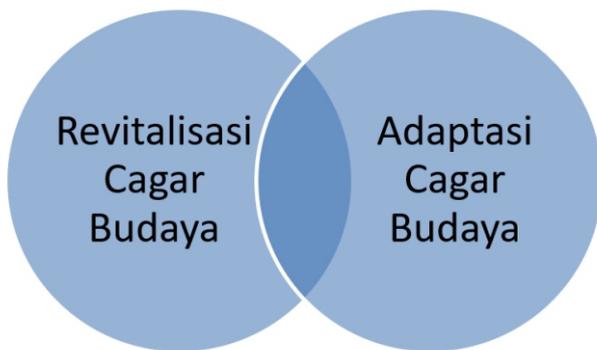
Foto 4. Ruang Bawah Bastion Benteng Balangnipa

12. Sumur, berjumlah 6 buah, dimana empat buah terletak di dalam dan dua buah di luar benteng. Sumur ini ada yang ditutup serta tidak digunakan dan juga ada yang masih digunakan.

Konsep Revitalisasi dan Adaptasi Cagar Budaya

Revitalisasi Cagar Budaya merupakan kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat. Revitalisasi harus memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, serta lansekap budaya asli berdasarkan kajian.

Sementara adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting. Oleh karenanya, adaptasi Cagar Budaya harus mempertahankan bagian terpenting dengan konsep intervensi minimal.



Bagan 1 Revitalisasi dan Adaptasi Cagar Budaya

Revitalisasi dan adaptasi Cagar Budaya memang tidak dapat dipisahkan. Bahkan dapat dikatakan bahwa pekerjaan adaptasi merupakan unsur dalam revitalisasi dalam upaya pengembangan. Oleh karenanya, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 menyatakan bahwa dilarang untuk mengubah fungsi ruang Cagar Budaya yang memiliki peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya.

Revitalisasi Cagar Budaya, terdiri dari tiga cakupan, dimana adaptasi termasuk didalamnya, seperti pada bagan di bawah.



Bagan 2 Cakupan Revitalisasi dan Adaptasi Cagar Budaya

Sementara penataan kembali fungsi ruang yang digunakan untuk kepentingan sekarang tidak dapat terlepas dari konsep adaptasi Cagar Budaya, khususnya terkait alih fungsi (*adaptive reuse*). Cagar Budaya dapat dimanfaatkan secara adaptif, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian Cagar Budaya, serta tidak menyebabkan kemerosotan nilai penting Cagar Budaya. Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan saat ini harus menghormati bentuk, karakter, struktur, dan integritas bersejarahnya.

Pemanfaatan tersebut sering membutuhkan beberapa perubahan, namun harus dilakukan seminimal mungkin mengubah bentuk, material, struktur, dan tata letak. Selain itu, Adaptasi Cagar Budaya yang bertujuan untuk membangun tambahan baru dengan kapasitas lebih besar tidak diperbolehkan. Hal ini untuk meminimalisir dampak negatif pada cagar budaya dan untuk melestarikan nilai penting pada setiap komponennya.

Perubahan atau penambahan ruang harus bersifat dapat dikembalikan ke bentuk semula (*reversible*), sehingga tidak menghalangi upaya pelestarian di masa mendatang. Elemen baru tersebut harus dirancang dan dibangun sedemikian rupa, sehingga jika akan dibongkar di masa depan, bentuk asli dan integritas cagar budaya tetap utuh. Perubahan *non-reversible* merupakan pilihan terakhir pada pengembangan Cagar Budaya. Melalui upaya revitalisasi dan adaptasi, diharapkan Cagar Budaya dapat dimanfaatkan secara maksimal, agar meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.

Persepsi Masyarakat terhadap Benteng Balangnipa

Kajian Revitalisasi didahului dengan penyebaran instrumen untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap ekspektasinya dalam pengembangan dan pemanfaatan benteng. Masyarakat yang dimaksud adalah mereka yang bertempat tinggal di sekitar Benteng Balangnipa dan pernah berkunjung. Berdasarkan hasil kajian itu, ditemukan bahwa mereka mengetahui Benteng Balangnipa adalah Cagar Budaya yang memiliki nilai

penting bagi sejarah dan ilmu pengetahuan baik di tingkat lokal maupun nasional.

Saat ini, Benteng Balangnipa dijadikan sebagai objek wisata budaya yang dapat dikunjungi oleh siapapun. Akan tetapi hanya satu gedung yang digunakan sebagai museum daerah sinjai dan kantor museum. Bangunan dan lingkungannya belum dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal, sehingga belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil analisis persepsi masyarakat, diketahui bahwa mereka berharap benteng tetap difungsikan sebagai museum, namun dilengkapi dengan atraksi budaya masa lampau, sebagai tempat wisata, tempat kegiatan budaya, café atau restoran, dan wisma yang dapat digunakan oleh mereka.

Masyarakat juga berharap, berbagai informasi tentang Kabupaten Sinjai di masa lalu dan kini dapat ditemui di museum, seperti sejarah terbentuknya Sinjai sejak masa kerajaan hingga kini, perubahan fungsi, dan tinggalan yang terdapat dalam benteng Balangnipa, serta Kota Tua Sinjai yang didalamnya termasuk Sungai Tangka. Informasi tersebut disampaikan dengan berbagai media, berupa panel informasi yang dilengkapi koleksi dan media digital. Bahkan, lebih jauh lagi, mereka berharap Kota Sinjai memiliki sebuah kawasan Kota Tua atau Kota Lama, dimana Benteng Balangnipa termasuk di dalamnya. Masyarakat juga memahami bahwa diperlukan kajian lebih lanjut untuk menentukan dan menetapkan Kawasan Kota Tua Sinjai.

Untuk saat ini, mereka berharap Benteng Balangnipa dapat dimanfaatkan oleh siapapun, tentunya dengan prosedur tertentu. Mereka juga ingin dilibatkan dalam pengembangan dan pemanfaatan benteng, seperti menjadi pemandu, diperbolehkan untuk berjualan di area benteng, terlibat dalam atraksi budaya, dan dapat menyewakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan pengunjung.

Dengan melakukan kajian persepsi masyarakat ini, diketahui tentang ekspektasi pengembangan dan pemanfaatan Benteng

Balangnipa bagi mereka. Selain itu, hasil kajian tersebut dapat dijadikan acuan dalam penyusunan konsep revitalisasi Benteng Balangnipa.

Konsep Revitalisasi Benteng Balangnipa

Mengamati kualitas fisik Benteng Balangnipa yang terus mengalami penurunan, maka diperlukan upaya revitalisasi dan adaptasi Cagar Budaya. Revitalisasi bertujuan untuk memvitalkan kembali Benteng Balangnipa, baik dari aspek fisik, sosial, budaya, ekonomi, maupun pendidikan. Sementara adaptasi bertujuan untuk pemanfaatan kembali benteng dengan fungsi ruang baru.

Benteng Balangnipa dan lingkungan di dalamnya termasuk dalam zona inti Cagar Budaya. Oleh karenanya, pelestarian dan pengelolaannya, tetap mengacu pada aturan pemanfaatan zona inti, seperti yang dijelaskan pada tabel dibawah:

No	Boleh Dilakukan	Persyaratan	Tidak Boleh Dilakukan
1	Penambahan bangunan tidak permanen yang bersifat reversible atau mudah dibongkar dan dipindahkan.	<ul style="list-style-type: none"> Konsultasi dengan BPCB Sulawesi Selatan Harus didahului dengan kajian atau penelitian. 	Penambahan/pendirian bangunan permanen.
2	Penataan situs dan lingkungannya.	<ul style="list-style-type: none"> Konsultasi dengan BPCB Sulawesi Selatan Harus didahului dengan kajian atau penelitian. 	Menanam pohon yang dapat mengancam kelestarian Cagar Budaya.
3	Kegiatan yang bersifat keagamaan, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan kebudayaan, sosial, dan ekonomi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pelestarian.	<ul style="list-style-type: none"> Konsultasi dengan BPCB Sulawesi Selatan Harus didahului dengan kajian atau penelitian. 	Kegiatan yang melanggar norma dan etika masyarakat, khususnya masyarakat setempat.

Sumber: Laporan Zonasi Benteng Balangnipa, Situs Batu Pake Gojeng dan Sekitarnya. Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar Tahun 2013.

Konsep revitalisasi secara keseluruhan adalah melindungi Benteng Balangnipa secara berkelanjutan, mengembangkan dan memanfaatkannya menjadi sarana pendidikan, seni budaya, dan wisata yang dapat menumbuhkan jati

diri dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, revitalisasi ini mencakup tinggalan dan lingkungannya yang mengacu pada prinsip pelestarian. Model pengembangan tersebut, sebagai berikut:

1. Konsep Penataan kembali fungsi ruang dan lingkungan

Penataan kembali fungsi ruang dan lingkungan di Benteng Balangnipa dilakukan dengan:

a. Melestarikan Cagar Budaya dan lingkungannya.

Hal ini dilakukan dengan mengendalikan pertumbuhan bangunan baru berdasarkan ketentuan zonasi. Hasil zonasi Benteng Balangnipa, menunjukkan zona inti benteng adalah keseluruhan struktur dinding benteng yang di dalamnya terdapat bangunan, struktur, dan areal taman. Luas zona inti tersebut adalah 0,57 Ha. Zona inti merupakan zona yang dilindungi secara mutlak agar keaslian benda, bangunan, dan struktur Cagar Budaya dipertahankan.

b. Memanfaatkan dan mengubah fungsi ruang untuk kepentingan sekarang.

Bangunan dan struktur di dalam benteng akan dialihfungsikan (*adaptive reuse*) sesuai dengan konsep adaptasi Cagar Budaya. Adaptasi untuk pemanfaatan baru merupakan salah satu upaya mensejahterakan masyarakat karena memiliki nilai tambah secara ekonomi. Terutama bila benteng tersebut dimanfaatkan untuk tujuan ekonomi, misalnya jika dialihfungsikan untuk menjadi kafe, restoran, perkantoran atau pemanfaatan komersial lainnya.

Salah satu syarat adaptasi adalah telah dilakukan pemugaran, oleh karenanya kegiatan revitalisasi fisik akan didahulukan sebelum pemanfaatan fungsi baru. Konsep pengalihfungsian di benteng ini terdiri dari area publik dan non publik, yaitu sebagai berikut :

- 1) Gedung A, terdiri dari dua lantai yang sebagian besar dijadikan sebagai area publik. Lantai 1 dialihfungsikan untuk kebutuhan museum, seperti laboratorium, *storage*, pembelian tiket, toko cinderamata, dan kantor museum. Lantai 2 sebagai ruang pameran dan ruang edukasi museum. Dengan pertimbangan bahwa fungsi sebagai Museum Daerah Sinjai akan dipertahankan dengan penyesuaian ulang tata pameran yang ada saat ini.
- 2) Gedung B, terdiri dari satu lantai yang hampir keseluruhan merupakan area publik dengan pengaturan tertentu. Dialihfungsikan menjadi musala laki-laki dan perempuan untuk publik, ruang penyimpanan barang pengelola benteng. Ditambah kafe, pantry, dan dapur kafe yang akan digunakan oleh masyarakat yang akan berjualan di kafe.
- 3) Gedung C, terdiri dari dua lantai. Lantai 1 dialihfungsikan untuk wisma Unit Sinjai BPCB Sul-Sel yang dilengkapi dengan toilet baik umum maupun khusus. Sedangkan lantai 2 diperuntukkan untuk perkantoran Unit Sinjai BPCB Sul-Sel, ruang pertemuan, Ruang Penerima tamu/transit, dan ruang baca. Hampir keseluruhan ruangan di gedung ini merupakan area non publik.
- 4) Gedung E terdiri dari dua lantai. Keduanya direkomendasikan peruntukannya untuk publik. Lantai 1 untuk aula dan ruang audiovisual dan lantai 2 untuk wisma laki-laki dan perempuan.
- 5) Gedung J, terdiri dari satu lantai yang peruntukannya untuk publik. Gedung ini direkomendasikan menjadi ruang komunitas seni dan budaya serta dapur untuk publik. Selain itu juga terdapat tempat penyimpanan perlengkapan pemeliharaan benteng milik pengelola.
- 6) Struktur D, diperuntukkan untuk kafe tenda. Masyarakat dapat berjualan ditempat ini tentunya dengan regulasi yang harus disusun kemudian. Keseluruhan area ini adalah area publik.

- 7) Struktur H, di bagian depannya akan dilengkapi dengan plaza. Dengan pertimbangan perlu dilakukan *testpit* sebelum pembangunan plaza tersebut. Area sekitar struktur H ini juga dapat dijadikan sebagai area untuk *photobooth* karena latarnya yang *instagramable*. Keseluruhan area ini adalah area publik.
- 8) Struktur G, direkomendasikan untuk diekskavasi dan diekspose untuk diperlihatkan kepada publik. Selain itu, struktur baru yang berada di area struktur G perlu dihilangkan. Keseluruhan area ini adalah area publik.
- 9) Struktur I dan F, direkomendasikan untuk upaya penyelamatan dan restorasi.
- 10) Bastion 1 dan 2. Bastion 1 dijadikan sebagai area publik, yaitu kantin/kafe jajanan kuliner tradisional sedangkan bastion 2 dijadikan sebagai kantin/kafe dengan menu makanan modern. Masyarakat akan diminta untuk mengelola area ini dengan pengaturan regulasi. Selain itu, ruang dibawah bastion dapat dijadikan sebagai dapur atau tempat penyimpanan kantin.
- 11) Bastion 3 dan 4, dijadikan sebagai daerah lapang dan diekspose. Pengunjung dapat melihat pemandangan sekitar benteng dari bastion ini. Ruang bawah bastion dapat difungsikan sebagai Ruang Informasi Non Koleksi, yang berisi panel-panel informasi. Keseluruhan area ini adalah area publik.

2. Konsep Penumbuhan kembali nilai budaya

Menumbuhkan kembali nilai budaya di Benteng Balangnipa dilakukan dengan mengkomodasikan aktivitas budaya. Salah satu alih fungsi baru disalah satu gedung dalam benteng adalah disediakan ruang komunitas dan atraksi budaya. Penyediaan ruang ini didasarkan atas keinginan masyarakat untuk menjadikan Benteng Balangnipa sebagai pusat atraksi budaya.

3. Konsep Penguatan informasi Cagar Budaya

Penguatan informasi Cagar Budaya Benteng Balangnipa dilakukan dengan dua upaya, yaitu:

- a. Memunculkan kembali cagar budaya yang sudah hilang, misalnya dengan melakukan ekskavasi terhadap Struktur G yang terletak di sebelah selatan dinding benteng agak ke barat. Struktur tersebut merupakan bekas pondasi yang hampir rata dengan tanah. Tujuan ekskavasi tersebut adalah untuk memperlihatkan sisa struktur benteng kepada publik.
- b. Mengembangkan museum di gedung A yang telah dikelola oleh Pemerintah Daerah Sinjai sebagai media edukasi nonformal bagi masyarakat. Adapun informasi yang disajikan di museum ini disesuaikan dengan ekspektasi masyarakat, diantaranya sejarah Sinjai mulai dari masa kerajaan hingga terbentuknya kabupaten Sinjai, Benteng Balangnipa, baik bangunan, struktur, maupun lingkungan serta alih fungsinya sejak didirikan hingga kini, Kota tua Sinjai, potensi alam dan budaya kabupaten Sinjai, dan sebagainya

Penutup

Sejak didirikan pada tahun 1557, Benteng Balangnipa terus mengalami alih fungsi. Saat ini, salah satu gedung di dalam benteng dijadikan sebagai museum, tempat pembinaan budaya, dan arena seni budaya tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai. Meskipun dimanfaatkan dengan fungsi baru, namun degradasi kualitas fisik tidak dapat dihindari. Oleh karenanya, perlu dilakukan revitalisasi dan adaptasi pada dinding benteng, tinggalan didalamnya, serta lingkungan sekitar.

Agar konsep revitalisasi dan adaptasi tersebut sesuai dengan ekspektasi masyarakat, maka dilakukan kajian persepsi masyarakat. Dari hasil kajian tersebut, diketahui bahwa masyarakat ingin terlibat dalam pengembangan dan

pemanfaatan Benteng Balangnipa. Mereka berharap dapat menjadi pemandu, diperbolehkan mengelola kafe atau kantin di dalam benteng, terlibat dalam atraksi budaya, dapat menyewakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan pengunjung, dan berbagai bentuk keterlibatan lainnya.

Hasil kajian persepsi pengunjung tersebut dijadikan sebagai salah satu dasar dalam penyusunan konsep revitalisasi dan adaptasi Benteng Balangnipa. Konsep pengembangan tersebut, mencakup tiga hal, yaitu *pertama*; menata kembali fungsi ruang, dengan menggunakan konsep adaptasi Cagar Budaya. Area didalam benteng kemudian dibagi menjadi area publik dan non publik. *Kedua*; menumbuhkan kembali nilai budaya, yang dilakukan dengan mengkomodasi aktivitas budaya masyarakat Sinjai di dalam benteng. *Ketiga*; menguatkan informasi Cagar Budaya, yang dilakukan dengan pengembangan Museum Daerah Sinjai yang saat ini terletak di gedung A benteng.

Konsep pengembangan dan pemanfaatan oleh masyarakat harus didahului dengan penentuan badan pengelola dan perjanjian kerja sama antar para *stake holder*. Selain itu, perlu diatur pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan zona inti Benteng Balangnipa.

DAFTAR BACAAN

- Australia ICOMOS Incorporated. 2013. *The Burra Charter, ICOMOS Charter for Places of Cultural Significance*. Australia: Australia ICOMOS Incorporated, International Council on Monument and Sites.
- Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan. 2013. *Zonasi Benteng Balangnipa, Situs Batu Pake Gojeng, dan Sekitarnya, Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan*. Makassar: t.tb
- _____. 2019. *Laporan Studi Teknis Revitalisasi Benteng Balangnipa Kabupaten Sinjai*. Makassar: t.tb.
- Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan. "Benteng Balangnipa", diakses dari <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id> tanggal 16 Mei 2020, pukul 13.40 Wita.
- De Silva, Dilantha. "Barriers and Challenges of Adaptive Reuse of Building". Conference Paper, diakses dari researchgate.net tanggal 16 Mei 2020, pukul 11.30 Wita.
- Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. 2013. *Pedoman Revitalisasi Cagar Budaya*. Jakarta: Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. 2013. *Pedoman Adaptasi Cagar Budaya*. Jakarta: Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. t.th. "Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya Benteng Balangnipa, diakses dari <https://cagarbudaya.kemdikbud.go.id>, tanggal 15 Mei 2020, pukul 11.40 Wita.
- Gao, Jing, Bihu Wu. 2017. "Revitalizing traditional villages through rural tourism: A case study of Yuanjia Village, Shaanxi Province, China" dalam *Tourism Management 63 (2017) 223-233*, diakses dari www.elsevier.com tanggal 15 Mei 2020, pukul 09.20 Wita.
- Kaluppa, Bahru. 1985-1986. *Laporan Studi Kelayakan Benteng Balangnipa di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan*. Makassar: Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Provinsi Sulawesi Selatan.
- Mohamed, Rayman. 2016. "Adaptive Reuse: A Review and Analysis of its Relationship to the 2 Es of Sustainability, dalam *Emerald Insight*. diakses dari www.emeraldinsight.com tanggal 16 Mei 2020, pukul 10.00 Wita.
- Muhaeminah. 2009. "Benteng Kolonial Belanda di Balangnipa Kabupaten Sinjai", dalam *Walennae Vol.11 No.1-Februari 2009: 51-64*. Makassar: Balai Arkeologi Makassar.
- Penica, Milja. 2015. "Revitalization of Historic Buildings as an Approach to Preserve Cultural and Historical Heritage" dalam *Procedia Engineering 117 (2015) 883 – 890*. diakses dari www.elsevier.com tanggal 15 Mei 2020, pukul 09.30 Wita.
- Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2015 tentang Museum
- Portal Resmi Kabupaten Sinjai. "Benteng Balangnipa", diakses dari <https://www.sinjaikab.go.id> tanggal 18 Mei 2020, pukul 10.00 Wita
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- Vasilevska, Ljiljana. 2018. "Adaptive Reuse in Function Cultural Heritage Revitalization. Conference Paper, diakses dari researchgate.net tanggal 16 Mei 2020, pukul 11.50 Wita.



POTENSI ANCAMAN DAN TINGKAT KETERANCAMAN SUMBER DAYA BUDAYA DI KAWASAN BENTENG CENRANA

Abdullah, Iswadi

(lamun_laut@yahoo.com, iswasimakkarakka@gmail.com)

Pendahuluan

Pada awalnya Cenrana merupakan bagian dari Kerajaan Luwu tetapi pada tahun 1520 kerajaan Luwu mengalami kemunduran kekuasaan dan akhirnya Cenrana berhasil direbut oleh Kerajaan Bone (Andaya, 2004). Setelah menjadi wilayah kekuasaan Bone, tepatnya pada masa pemerintahan Sultan Alimuddin Idris (La Patua Matanna Tikka 1696-1714) Cenrana menjadi ibu kota kerajaan Bone (Sarjiyanto, 200:67).

Kondisi tersebut disebabkan oleh letak strategis Cenrana sebagai tempat untuk mengontrol zona-zona tepi danau besar di wilayah Sulawesi Selatan bagian tengah, dataran rendah Walennae dan pesisir sekitar Teluk Bone, Tanjung Bira hingga ke Pulau Selayar (Wulandari, 2017:102).

Dasar tersebut kemudian membuat Cenrana menjadi salah satu wilayah yang memiliki nilai penting untuk menjelaskan perkembangan sejarah yang pernah terjadi di jazirah selatan Sulawesi, sekaligus untuk menumbuhkan jati diri bangsa dan memupuk rasa bangga terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Bone.

Bukti kebesaran Cenrana masih dapat ditelusuri berdasarkan sumber daya budaya yang berada di sepanjang aliran Sungai Cenrana,

sayangnya sampai saat ini kondisinya sudah banyak mengalami kerusakan, baik yang diakibatkan oleh lingkungan maupun aktivitas manusia. Sehingga perlu dilakukan kajian tentang pelestarian.

Lokasi tersebut sudah pernah diteliti oleh berbagai pihak di antaranya; oleh, penelitian kerja sama antara Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dengan *Australian National University* pada tahun 1999, Sarjiyanto pada tahun 2000 dan Feby Wulandari pada tahun 2017. Pada dasarnya penelitian-penelitian tersebut lebih fokus terhadap potensi Arkeologi untuk menjelaskan tentang sejarah budaya dan proses budaya, penelitian yang membahas tentang pelestarian belum dilakukan secara maksimal, sehingga dianggap perlu untuk dilakukan.

Metode

Ruang lingkup penelitian ini meliputi data-data yang terkait dengan potensi ancaman dan tingkat keterancaman sumber daya budaya di kawasan situs Cenrana. Oleh karena itu, penelitian ini diawali dengan pengumpulan data meliputi; studi pustaka yang mencakup sumber tertulis yang berkaitan dengan wilayah Cenrana, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data lapangan

melalui observasi dan melakukan wawancara terbuka kepada orang-orang yang dianggap mengetahui tentang sumber daya budaya dan lingkungannya.

Tahap berikutnya adalah pengolahan data, yang dititikberatkan pada kondisi sumber daya budaya dan lingkungannya dengan melakukan pendeskripsian, pengklasifikasian kemudian dilanjutkan dengan melakukan penafsiran data untuk menjelaskan tentang kerusakan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Hasil dan Pembahasan

1. Lokasi Penelitian

Kabupaten Bone (Watangpone) merupakan salah satu daerah otonomi di Provinsi Sulawesi Selatan yang paling luas dibandingkan dengan daerah lainnya (4.559,00 km²). Secara astronomi daerah ini terletak pada posisi antara 04° 13' – 05° 06' Lintang Selatan dan antara 119° 42' – 120° 40' Bujur Timur, Kabupaten Bone terdiri atas 27 kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 333 dan 39 kelurahan.

Secara administratif Situs Cenrana berada di Kecamatan Cenrana, tepatnya di Desa Nagauleng dan Desa Ujung Tanah. Umumnya wilayah Cenrana merupakan tanah datar yang berawa serta keadaan permukaan lahan yang landai dan sedikit bergelombang dengan kemiringan 0-15% (Ali, 1989).

2. Potensi Sumber Daya Budaya

Berdasarkan hasil pengambilan data di lapangan, Kawasan Situs Cenrana merupakan lokasi yang memiliki sumber daya budaya yang terdiri dari benteng, kompleks makam kuno, sumur kuno, bekas istana dan masjid tua.

a. Benteng

Di dalam Kawasan Benteng Cenrana masih ditemukan dua buah benteng yang memiliki bentuk yang masih cukup jelas, yaitu Benteng Cenrana yang berada di sebelah utara Sungai Cenrana dan Benteng Wajo yang berada di sebelah selatan Sungai Cenrana.

Benteng Cenrana merupakan sebuah bukit yang kemudian diberi gerbang pada sisi barat yang dikenal masyarakat setempat dengan nama Timuangge, gerbang tersebut berupa struktur yang dibuat dari susunan batu karang dengan ukuran; tinggi 4.3 meter, lebar pintu gerbang 3.2 m, dan tebal 3.8 meter. Benteng ini dikelilingi oleh sungai baik oleh bentukan alam maupun buatan manusia.

Benteng Wajo merupakan bukit kecil berbentuk segi empat yang dikelilingi oleh parit, berdasarkan hasil wawancara benteng ini dulunya dilengkapi dengan susunan batu karang sebagai dinding benteng, tetapi sekarang sebagian besar batunya sudah hilang, di lokasi saat ini tinggal bekas-bekas struktur yang pada beberapa bagian masih ditemukan batu karang yang masih melekat.



Foto 1. Benteng Wajo dan Gerbang Timuangge

b. Kompleks Makam

Kawasan Benteng Cenrana merupakan lokasi yang mengandung banyak tinggalan budaya berupa kompleks makam yang tersebar di sisi selatan dan utara Sungai Cenrana, di antaranya: Kompleks makam

Naga Uleng (La Patau Matanna Tika), Kompleks Makam Mapolo Bombang, Kompleks Makam Timuange, Kompleks Makam Petta Matinroe Ri Pallae, Kompleks Makam Batu Tanre, Kompleks Makam Jera Mele'e dan Kompleks Makam Kajao Bone.

Pada umumnya kompleks makam yang terdapat dikawasan Benteng Cenrana memiliki bentuk dan teknologi yang sama, yaitu memiliki jirat yang terbuat dari batu padas dan susunan batu karang dengan bentuk papan batu yang dilengkapi dengan nisan yang berbentuk Arca, Palus dan Pipi. Dari ketujuh kompleks makam yang ada di lokasi tersebut, Kompleks Makam Naga Uleng (La Patau Matanna Tikka) yang telah dilakukan pemugaran dan telah memiliki juru pelihara sehingga kondisinya lebih terawat dibandingkan dengan kompleks makam yang lainnya.



Foto 2. bentuk Makam Dan Nisan di kawasan Benteng Cenrana

c. Sumur Kuno

Di dalam Situs Cenrana terdapat juga tujuh sumur kuno. Menurut informan, ketujuh sumur ini di sebut *Baba Pitu'e*. Tersebar pada beberapa lokasi dan memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Dari informasi

yang di dapatkan, dulunya sumur tersebut memiliki fungsi yang berbeda beda. Sumur 1 difungsikan sebagai tempat berwudhu, sumur 2 difungsikan sebagai tempat mencuci pakaian dan peralatan makan, sumur 3 difungsikan sebagai tempat pencuci beras, sumur 4 difungsikan sebagai tempat minum kuda, sumur 5 hingga sekarang masih dimanfaatkan penduduk sebagai sumber air bersih, sumur 6 masih difungsikan penduduk sebagai sumber air bersih dan sumur 7 difungsikan sebagai tempat mencuci kaki.



Foto 3. beberapa sumur tua yang ada di kawasan benteng Cenrana

d. Bekas Istana

Lokasi bekas istana berada di dalam wilayah Kampung Mojong, menurut informasi luas lokasi bekas istana berukuran kurang lebih 60 meter persegi. Di riwayatkan oleh warga bahwa dulunya, pernah ada bangunan yang disebut Bone Balla dengan orientasi menghadap ke timur. Lokasi bekas istana ini sekarang di jadikan kebun, area gudang rumput laut dan beberapa tempat terdapat bekas galian tambang golongan C. Hasil penelitian menyebutkan bahwa sekitar lokasi ini terdapat banyak fragmen gerabah dan keramik asing, menjadi indikasi dulunya pernah terdapat pemukiman dan aktivitas manusia di lahan ini.



Foto 4. Bekas Istana

e. Masjid tua

Lokasi masjid Tua Cenrana berada di Kampung Cenrana, tepatnya di sisi Utara Sungai Cenrana. Masjid ini merupakan masjid pertama yang di bangun pada wilayah Cenrana. Kondisi saat ini secara keseluruhan bentuk, ukuran dan bahan masjid telah berubah dan diganti. Hingga saat ini masjid tersebut masih difungsikan sebagai sarana ibadah.



Foto 5. Masjid Tua Yang sudah di renovasi

3. Potensi Ancaman dan Tingkat Ancaman

Potensi ancaman dapat diartikan sebagai semua aktivitas dengan berbagai proses yang mungkin akan terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dan akan berpengaruh terhadap kelestarian sumber daya budaya, sedangkan tingkat keterancaman adalah seberapa besar potensi ancaman tersebut telah berlangsung sehingga berdampak langsung terhadap sumber daya budaya. Kedua aktivitas tersebut merupakan penyebab utama terjadinya kerusakan di mana prosesnya dapat berlangsung dari luar maupun dari dalam.

Potensi ancaman dan tingkat keterancaman dapat diakibatkan oleh lingkungan dan aktivitas manusia di sekitar lokasi dan objek, kondisi lingkungan terdiri dari tanah, udara, air, iklim, kelembaban, cahaya, tumbuhan, hewan dan mikro organisme, sedangkan aktivitas manusia meliputi segala aktivitas yang berhubungan langsung dengan sumber daya budaya, baik berupa pemanfaatan lahan maupun pemanfaatan terhadap Cagar Budaya itu sendiri.

a. Lingkungan

Iklim merupakan salah satu faktor lingkungan yang memiliki peranan besar dalam proses kerusakan yang dialami oleh sumber daya budaya, lokasi penelitian termasuk daerah beriklim sedang dengan kelembaban udara berkisar antara 95%-99% dengan temperatur berkisar 26 °C – 34 °C. Memiliki dua tipe hujan, yaitu tipe hujan Monsoon (Januari dan Februari) dan tipe hujan lokal (Mei - Juni). Rata-rata curah hujan tahunan di wilayah Bone bervariasi, yaitu: rata-rata < 1.750 mm; 1750–2000 mm; 2000–2500 mm dan 2500–3000 mm (BMKG wilayah Bone).

Kondisi tersebut sangat banyak mempengaruhi kondisi sumber daya budaya dan lingkungannya terutama terhadap Kelembaban yang akan menyebabkan terjadinya pelapukan dan kerusakan, perkembangan mikro organisme juga akan berdampak terhadap objek dan lingkungan terutama terhadap kerusakan (Suhartono, 2012: 15:18). Terlebih lagi terhadap lanscape baik untuk kepentingan pengembangan, seperti perubahan fungsi lahan dengan melakukan pemanfaatan lahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

b. Aktivitas Manusia

Faktor lain yang berperan besar terhadap keberadaan sumber daya Budaya adalah manusia. Keberadaan sumber daya budaya tidak bisa terlepas dari aktivitas manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup membuat masyarakat memanfaatkan sumber

daya budaya dan lingkungannya sesuai dengan kebutuhan, tanpa mempertimbangkan kelestarian dan nilai yang terkandung terhadap Cagar Budaya tersebut.

1. Pertumbuhan Penduduk

Aktivitas tersebut tidak lepas dari perkembangan jumlah penduduk yang semakin tahun semakin bertambah, sehingga kebutuhan terhadap ruang juga semakin bertambah, jumlah penduduk yang semakin besar tentu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial dan kebijakan politik sehingga terkadang akan merombak tata ruang yang sudah ada sebelumnya.

Berdasarkan data yang diperoleh, perkembangan penduduk di Kecamatan Cenrana dapat dilihat pada tabel Berikut:

Tabel 1. Perkembangan Penduduk
Kec. Cenrana lima Tahun Terakhir

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk				Keterangan
		2014	2015	2016	2017	
1	Kecamatan Cenrana	23.929	24.047	24.155	24.263	

Data di atas menunjukkan perkembangan penduduk di Kec. Cenrana mengalami perkembangan yang cukup tinggi, di mana pada tahun 2014 hanya 23.929 jiwa dan pada tahun 2017 mencapai 24.263 jiwa. Perkembangan tersebut tentu akan mempengaruhi kebutuhan lahan baik untuk hunian maupun untuk lahan olahan (Sumber BPS Kab. Bone)

2. Sosial Budaya

Menurut Mattulada (1998) dalam masyarakat Bugis - Makassar juga dikenal stratifikasi sosial yang menunjukkan derajat seseorang di dalam masyarakat. Di kalangan atas yang dikenal dengan "elit", tidak hanya ditempati oleh seorang berdasarkan garis darah kebangsawanan, tetapi orang-orang biasa atau To maradeka dengan tiga kategori, yaitu to panrita (cendikawan agama) dan to acca

(cendikiawan umum); to sugi, yaitu orang kaya, to warani, yaitu "pemberani" dan (4) to sulesana, yakni orang yang mempunyai keahlian khusus.

Kehidupan sosial budaya seperti ini tentu masih dapat berpengaruh terhadap kondisi sumber daya budaya yang ada di Kawasan Benteng Cenrana, seperti perlakuan terhadap sumber daya budaya sebagai rasa penghormatan terhadap leluhur dengan melakukan berbagai aktivitas yang tanpa disadari bisa merusak keberadaan sumber daya budaya seperti kegiatan renovasi dan ziarah.

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh melalui pengumpulan data lapangan berupa survei dan wawancara, maka potensi dan tingkat keterancaman yang dihadapi tinggalan arkeologi di Kawasan Benteng Cenrana dan tinggalan lainnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.Potensi Ancaman

No	Nama Objek dan Situs	Potensi Ancaman
1	Benteng Cenrana dan benteng Wajo	<p>1. Jaringan jalan. Keberadaan jaringan jalan yang saat ini dalam proses pembuatan ke depan akan memudahkan aksesibilitas di lokasi tersebut, sehingga semua aktivitas yang akan dilaksanakan di lokasi tersebut akan semakin dimudahkan dan tentunya akan menghidupkan lokasi-lokasi yang saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga akan menciptakan kebutuhan baru terhadap lahan yang ada. Adanya jaringan jalan yang memotong alur dinding benteng tanah dari arah timur ke barat, mengakibatkan kerusakan pada struktur benteng, selain itu aktivitas ini dapat menyebabkan hilangnya sisa tinggalan arkeologi di bagian permukaan. Selain itu jaringan jalan yang direncanakan yang akan melewati pintu gerbang, dikhawatirkan akan menyebabkan kerusakan yang lebih parah pada struktur gerbang.</p> <p>2. Kepemilikan dan Penguasaan Lahan. Lokasi tersebut telah dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat, berdasarkan peta belok dari Kelurahan Cenrana, sehingga akan sangat berpengaruh terhadap kegiatan yang akan dilakukan baik dari kegiatan pertanian, jual beli penggalian tambang mengingat lokasi tersebut masih bagian dari Bukit Timuangnge.</p> <p>3. Kerusakan dan Pelapukan. Kerusakan yang terjadi pada struktur pintu gerbang, terbilang cukup parah, kondisi gerbang sebelah kanan, patah pada bagian atas (sisa potongan bagian atas ditemukan pada bagian bawah/lereng bukit), sedangkan bagian lainnya mengalami keretakan. Pelapukan juga terjadi pada lapisan bagian luar (bagian Spesi/plesteran).</p> <p>4. Aktivitas Tambang Galian C. Pada beberapa bagian dinding benteng terutama pada lokasi Mallobo dan Marraga telah mengalami kerusakan akibat dari aktivitas penggalian dan pengerukan, sehingga lokasi tersebut mengalami kerusakan yang sangat tinggi.</p>

		<p>5. Kondisi Topografi dan Keletakan. Letaknya yang berada di punggung bukit (lereng) yang cenderung miring menyebabkan kondisi temuan tidak stabil akibat adanya pergerakan tanah, hal ini diperparah oleh kondisi jenis tanahnya yang tidak stabil.</p> <p>6. Batuan Penyusun. Bahan penyusun struktur parit yang tidak kompak, menyebabkan kondisi struktur yang tidak kuat dan stabil. Batuan penyusun dari bahan batuan yang mudah lapuk dan bergerak (boulder berukuran kecil).</p> <p>7. Tanaman Berbatang Keras. Dari informasi masyarakat pada salah satu bagian pintu gerbang, dahulu terdapat tanaman berbatang keras berukuran besar yang tumbuh di atas struktur yang menyebabkan kerusakannya, selain itu masih ditemukan tanaman lainnya yang berpotensi menyebabkan kerusakan pada struktur di bagian lainnya.</p> <p>8. Juru Pelihara. Belum adanya juru pelihara pada situs ini, sehingga faktor keterawatan dan keamanannya belum terjamin.</p>
2	Kompleks Makam	<p>1. Jaringan Jalan. Keberadaan jaringan jalan yang saat ini dalam proses pembuatan telah memotong kompleks makam pada sisi timur dan sisi utara kompleks, sehingga posisi makam terbagi menjadi dua dan makam utama sekarang ini posisinya tepat berada di sisi utara jalan. Selain menimbulkan kerusakan, keberadaan jalan tersebut akan semakin memudahkan aksesibilitas di lokasi tersebut. Akibatnya semua aktivitas akan semakin menghidupkan lokasi-lokasi yang saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga akan menciptakan kebutuhan baru terhadap lahan yang ada.</p> <p>2. Pemakaman Baru. Keberadaan kompleks pemakaman baru di sebelah timur kompleks makam Mapolo Bombang menjadi salah satu ancaman tersendiri karena arealnya semakin meluas dengan memanfaatkan lahan makam kuno yang sudah tidak terurus</p> <p>3. Pelapukan dan Kerusakan. Kerusakan dan pelapukan yang terjadi pada kompleks makam diakibatkan oleh faktor biologis dan mekanis, yaitu tumbuhnya beberapa jenis lumut dan moa di permukaan makam yang mengakibatkan penurunan kualitas bahan, selain itu kerusakan akibat pelapukan menyebabkan beberapa makam patah dan hancur baik pada Jirat maupun pada nisan makam</p>

		<p>4. Perluasan Area Permukiman. Pada lokasi ini sudah mulai terdapat pembangunan rumah, meskipun masih difungsikan sebagai rumah kebun tetapi ke depan perluasan areal permukiman akan berpengaruh besar terhadap kompleks makam mengingat adanya jaringan jalan dan informasi akan pembangunan lokasi perumahan di sebelah tenggara kompleks makam.</p> <p>5. Kepemilikan dan Penguasaan Lahan. Kompleks makam telah dikuasai oleh masyarakat, terbukti dengan adanya kebun jagung yang tepat berada di areal pemakaman.</p> <p>6. Topografi dan Keletakan. Berada di area bukit kecil, menyebabkan beberapa makam dalam kondisi miring terutama nisan.</p> <p>7. Pencurian Nisan. Sudah terjadi pencurian nisan terutama untuk nisan yang berbentuk arca.</p> <p>8. Juru Pelihara. Belum adanya juru pelihara pada situs ini, sehingga faktor keterawatan dan keamanannya belum terjamin.</p>
3	Sumur Tua	<p>1. Perluasan Area Permukiman. Perluasan area permukiman membuat keberadaan sumur tua semakin terdesak, beberapa sumur tua saat ini sudah berada di antara permukiman masyarakat sedangkan kondisi ruang yang semakin sempit sehingga ke depan akan berpengaruh terhadap penggunaan dan pengelolaan.</p> <p>2. Jaringan Jalan. Keberadaan jaringan jalan yang saat ini dalam proses pembuatan akan semakin memudahkan aksesibilitas di lokasi tersebut, sehingga semua aktivitas akan semakin menghidupkan lokasi-lokasi yang saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga akan menciptakan kebutuhan baru terhadap lahan yang ada. Adanya jaringan jalan yang melewati beberapa sumur mengakibatkan kerusakan pada struktur.</p> <p>3. Polusi Visual (penambahan elemen baru). Penambahan elemen baru dan pemasangan mesin air beserta kelengkapannya, pemasangan tersebut tidak dikelola dengan baik sehingga keberadaan mesin air beserta pipa paralon sangat amburadul, akibatnya pemandangan yang dilihat secara langsung sangat tidak memiliki estetika.</p> <p>4. Kerusakan dan Pelapukan. Kerusakan dan pelapukan yang terjadi di beberapa sumur tua yang ada di kawasan Benteng Cerrana diakibatkan oleh faktor biologis dan mekanis, yaitu tumbuhnya beberapa jenis tanaman pada permukaan dari susunan batu yang ada pada bagian dalam sumur, adanya kegiatan pengerukan yang dilakukan dengan menggunakan ekskavator dan pembongkaran bagian atas sumur yang terjadi pada saat pembuatan jaringan jalan.</p>

		<p>5. Juru Pelihara Situs. Belum adanya juru pelihara pada situs ini, sehingga faktor keterawatan dan keamanannya belum terjamin.</p>
4	Lokasi Istana Bekas Balla Bone	<p>1. Aktivitas Tambang Galian C. Lokasi bekas istana sudah dikeruk untuk kepentingan pembangunan pabrik rumput laut dan di sebelah timur terdapat galian dalam akibat dari aktivitas tambang galian C, sehingga lokasi tersebut mengalami kerusakan yang sangat tinggi.</p> <p>2. Jaringan Jalan Baru. Jaringan jalan baru yang menghubungkan lahan yang tidak produktif dengan jalan desa membuat akses yang semakin mudah sehingga berpeluang untuk terjadinya aktivitas baru terhadap lokasi yang selama ini sangat sulit untuk dicapai</p> <p>3. Aktivitas Pengolahan Lahan. Pengolahan lahan sebagai perkebunan dengan menanam lokasi berbagai macam tanaman berbatang keras membuat keberadaan lokasi ini menjadi semakin terancam.</p> <p>4. Adanya Bangunan Baru. Bangunan pabrik rumput laut yang dibangun di lokasi ini telah merusak lokasi keberadaan bekas istana Balla Bone.</p>
5	Lokasi Masjid Tua Cenrana	<p>1. Bangunan Baru. Masjid telah direnovasi tanpa memperhatikan arsitektur lama, sehingga kondisi masjid sekarang sudah tergantikan dengan bangunan baru. Selain itu pembangunan gedung untuk madrasah di sebelah Tour masjid membuat ruang semakin berkurang. struktur bekas tempat wudhu lama masih dapat ditemukan tetapi sudah dalam kondisi tidak terawat dan terancam oleh bangunan baru.</p>



Foto 6. 1. Perubahan Fungsi lahan, 2 Jaringan jalan Baru, 3 Kerusakan, 4. Tambang golongan C

Tabel 3. Tingkat Keterancaman Dalam Kawasan Benteng Cenrana

No	Potensi Ancaman	Tingkat keterancaman		
		Tinggi	Sedang	Rendah
1	Benteng Cenrana dan Benteng Wajo			
	1. Jaringan jalan.	√		
	2. Kepemilikan dan Penguasaan Lahan.	√		
	3. Kerusakan dan Pelapukan.	√		
	4. Aktivitas Tambang Galian C.	√		
	5. Kondisi Topografi dan keletakan.	√		
	6. Batuan Penyusun.	√		
	7. Tanaman Berbatang Keras.	√		
	8. Juru Pelihara.			√
2	Kompleks Makam			
	1. Jaringan Jalan.	√		
	2. Pemakaman Baru.		√	
	3. Pelapukan dan Kerusakan.	√		
	4. Perluasan Area Permukiman.	√		
	5. Kepemilikan dan Penguasaan Lahan.	√		
	6. Topografi dan Keletakan.		√	
	7. Pencurian Nisan.		√	
	8. Juru Pelihara.		√	
3	Sumut Tua			
	1. Perluasan Area Permukiman.	√		
	2. Jaringan Jalan.		√	
	3. Polusi Visual (penambahan elemen baru).	√		
	4. Kerusakan dan Pelapukan.	√		
	5. Juru Pelihara Situs.			√
4	Bekas Istana			
	1. Aktivitas Tambang Galian C.	√		
	2. Jaringan Jalan Baru.	√		
	3. Aktivitas Pengolahan Lahan.	√		
	4. Adanya Bangunan Baru.	√		
5	Masjid Tua			
	1. Bangunan Baru.	√		

Tingkat keterancaman dibagi menjadi tiga kategori untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan terhadap sumber daya budaya yang ada di kawasan Benteng Cenrana. Adapun pembagian tersebut terdiri dari:

1. **Rendah** adalah aktivitas tersebut masih dalam wacana atau masih dalam bentuk perencanaan berdasarkan kondisi masyarakat setempat.
2. **Sedang** adalah aktivitas tersebut sudah mulai berjalan dan menimbulkan pengaruh terhadap sumber daya budaya terutama pada saat pengerjaan maupun setelah pekerjaan
3. **Tinggi** adalah aktivitas sudah berlangsung dan pengaruhnya langsung merusak sumber daya budaya, baik objek maupun lingkungan yang memiliki konteks.

Potensi ancaman dan tingkat keterancaman yang terjadi pada sumber daya budaya didominasi oleh aktivitas manusia yang diakibatkan oleh tingginya kebutuhan terhadap pemanfaatan lahan yang sebagian besar belum di kelola di kawasan Benteng Cenrana, perubahan fungsi lahan, pembangunan fasilitas seperti pembuatan jaringan jalan, tambang colongan C dan pemukiman baru memiliki tingkat keterancaman yang sangat tinggi sehingga perlu dicarikan solusi agar kegiatan tersebut dapat tetap berjalan dengan tetap memperhatikan pelestarian sumber daya budaya.

Kesimpulan

Sumber daya budaya yang ada di wilayah Cenrana merupakan bagian dariinggalan dari abad ke 16 sampai dengan abad 17, pada masa pemerintahan Raja Bone ke XVI La Patau Matanna Tikka. Tinggalan tersebut terdiri dari struktur benteng, pintu gerbang, bekas istana, makam kuno, sumur kuno, dan masjid. Sumber daya budaya tersebut merupakan potensi yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan, sehingga keberadaanya penting untuk dilestarikan.

Kondisi Sumber daya budaya saat ini sudah mengalami banyak perubahan yang diakibatkan oleh lingkungan dan aktivitas manusia, tingginya tingkat kerusakan terhadap sumber daya tersebut menjadi ancaman tersendiri terhadap keberadaannya, sehingga perlu dilakukan kajian tentang potensi ancaman dan tingkat keterancaman untuk menjadi acuan awal dalam melakukan penanganan yang termasuk dalam kegiatan pelestarian dan pengelolaan sumber daya budaya.

Potensi ancaman tersebut diidentifikasi berupa perubahan dan alih fungsi lahan situs menjadi area pemukiman, pertanian sawah dan tambak, adanya pencurian nisan, perusakan dinding benteng dan lokasi penting lainnya dengan adanya perintisan jalan, pendirian pabrik dan gudang rumput laut dalam benteng. Potensi tersebut memiliki tingkat keterancaman yang berbeda, tetapi dari keseluruhan potensi ancaman sebagian besar memiliki tingkat keterancaman yang besar dan perlu segera dicari solusi penangan yang sesuai.

Daftar Pustaka

- Anonim, 2013. Zonasi Istana Raja Bone dan Situs Terkait Lainnya di Watangpone Kabupaten Bone, Provinsi Sulaesi Selatan, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar.
- _____ 2014. Kabupaten Dalam Angka (*Bone Regency in Figures*). Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone.
- _____ 2015. Kabupaten Dalam Angka (*Bone Regency in Figures*). Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone.
- _____ 2016. Kabupaten Dalam Angka (*Bone Regency in Figures*). Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone.
- _____ 2017. Kabupaten Dalam Angka (*Bone Regency in Figures*). Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone.
- _____ 2018. Kabupaten Dalam Angka (*Bone Regency in Figures*). Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone.
- _____, 2019. Kabupaten Dalam Angka (*Bone Regency in Figures*). Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone.
- Andaya. Leonard Y,dkk., 2004. *Warisan Arung Palakka Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17. Penerjemah. Sirimorok, Nurhadi*. Makassar. Ininnawa.
- Mattulada, 1998. Sejarah, Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan, Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Sarjiyanto, 2000. Potensi Data Arkeologi Situs Cenrana: Kajian Awal Bagi Pemukiman. *Jurnal Walennae*, Vol. 15, No. 4/III, Juli 2000: Hal. 67-82, Makassar: Balai Arkeologi Makassar
- Suhatono Yudi, 2012. Faktor-Faktor Penyebab Kerusakan Lukisan Gua Prasejarah Di Maros Pangkep dan Upaya Penanganannya. *Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur*, Volume 6, Nomor 1, Oktober 2012, Hal 14-25. Borobudur
- Wulandari Feby, 2017. Aspek ruang pemukiman di sisi selatan tepi Aliran sungai cenrana, kabupaten One. *Jurnal Walennae*, Vol. 15, No. 2, November 2017: Hal. 101-116, Makassar: Balai Arekologi Makassar.

mudah dan sangat efektif. Kemampuan QR Code untuk menyimpan berbagai jenis data bisa dimanfaatkan sebagai sarana penyebaran informasi Cagar Budaya kepada masyarakat, terlebih kode ini bisa dipindai dengan menggunakan *smartphone* memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengaksesnya dan penyebaran informasi Cagar Budaya lebih interaktif dan menarik bagi masyarakat.

B. PEMBAHASAN

Quick Response Code

Quick Response Code (QR Code) atau kode respon cepat merupakan teknik yang mengubah data tertulis menjadi kode-kode dua dimensi yang tercetak dalam suatu media yang lebih ringkas. *QR Code* ialah *image* berupa matriks dua dimensi yang memiliki kemampuan menyimpan data di dalamnya (Wijaya dan Gunawan, 2016). Pertama kali diperkenalkan oleh perusahaan Jepang *Denso-Wave* yang merupakan anak dari perusahaan Toyota pada tahun 1994, digunakan untuk pendataan inventaris produksi suku cadang kendaraan. Kode ini dirancang untuk dapat dibaca oleh kamera dibandingkan laser yang jauh lebih ketat yang biasanya digunakan untuk *UPC bar codes* yang tradisional. *QR Code* merupakan perkembangan dari barcode satu dimensi, *QR Code* adalah salah satu tipe dari kode batang (*barcode*) yang dapat dibaca dengan menggunakan kamera *handphone* (Rouillard dalam Mustofa, Dkk, 2016).



BPCB MALUT

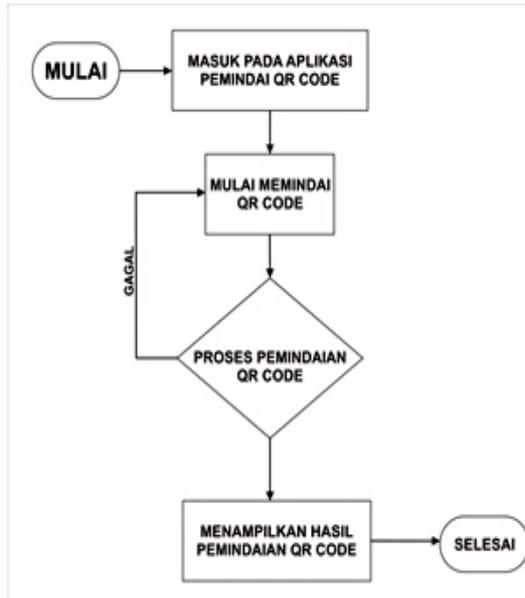
Gambar 1. Contoh *QR Code*
(silakan dipindai)

Kode ini mampu menyimpan berbagai jenis data seperti data angka/*numeric*, *alphanumeric*, biner, dan lain-lain. Saat ini *QR Code* sangat banyak digunakan karena fitur-fiturnya yang baik seperti daya berkapasitas besar, memindai dengan kecepatan tinggi, dan mencetak dalam ukuran kecil. Selain itu, kemampuan *QR Code* untuk dapat diakses dengan kamera *smartphone* memudahkan orang untuk memindai kode ini. *QR code* digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti mengakses website, melakukan panggilan telepon, mereproduksi video atau dokumen teks terbuka dan menyimpan data tujuan (Nugraha dan Munir dalam Wijaya dan Gunawan, 2016). Kelebihan dari *QR Code* antara lain mampu menyimpan data hingga ribuan karakter dengan berbagai tipe data seperti numerik atau alphanumerik, kanji, kana, hiragana, simbol, binary, dan *control code*. Sedangkan kelemahannya, semakin panjang teks/URL/konten maka *image* akan semakin lebar dan dibutuhkan kamera beresolusi tinggi untuk dapat membaca setiap tanda dengan detail.



Gambar 2. Memindai *QR Code* dengan *smartphone*

Cara kerja dari *QR Code* sangatlah mudah, menggunakan *smartphone* untuk memindai *QR Code* kemudian akan diarahkan menuju data yang tersimpan, lalu akan muncul informasi yang dicari. Secara sederhana dijelaskan pada diagram di bawah ini:



Gambar 3. Diagram kerja QR Code

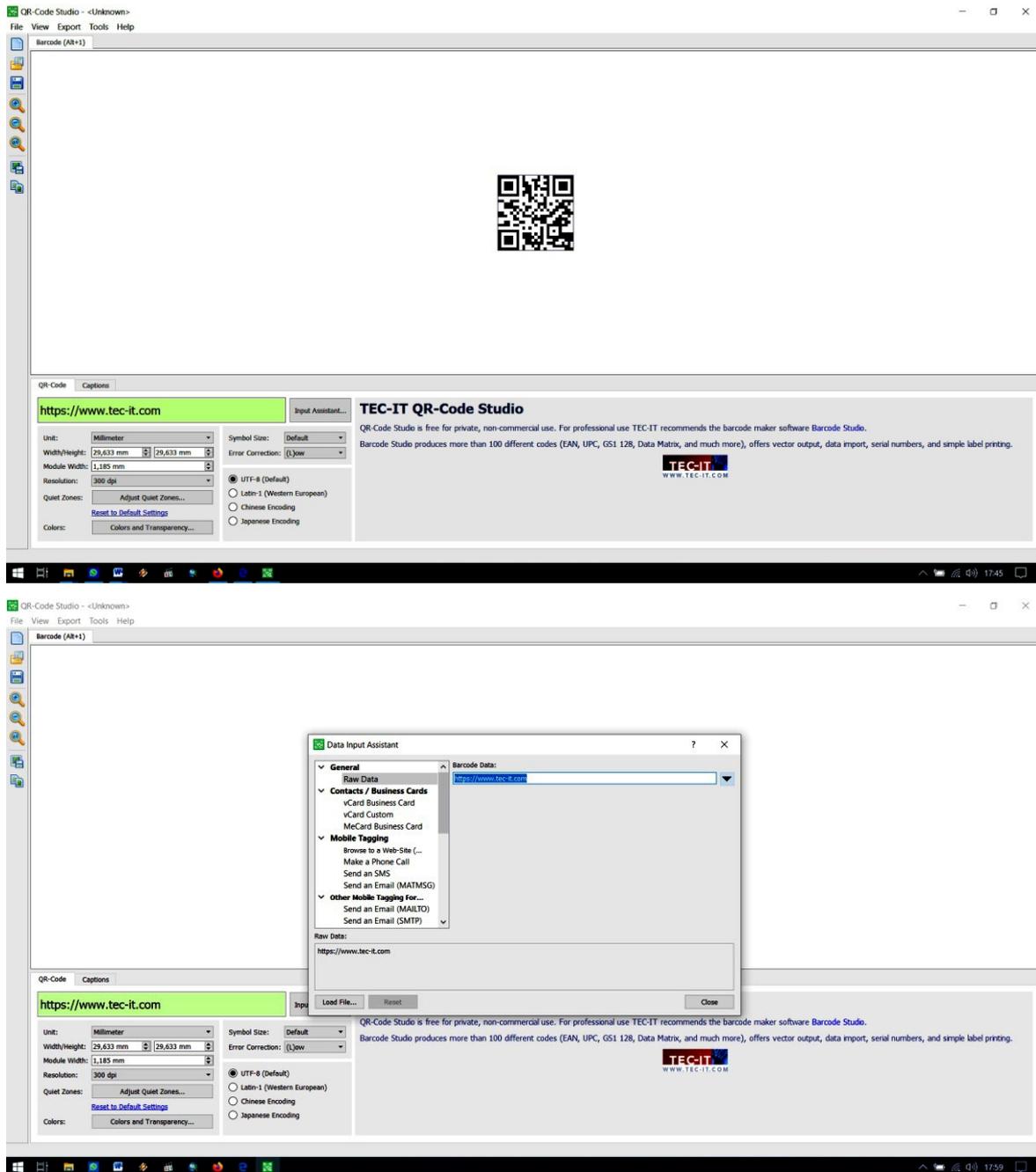
QR Code tergolong sangat mudah untuk dibuat, sebuah QR Code dapat dibuat menggunakan QR Generator yang tersedia di website online atau piranti lunak yang bisa di-instal di komputer. Dalam

tulisan ini, penulis mencotohkan pembuatan QR Code dengan menggunakan piranti lunak QR Code Studio yang bisa diunduh secara gratis di laman web <https://www.tec-it.com/en/download/free-software/qrcode-studio/Download.aspx>

Dengan menggunakan piranti lunak tersebut, pengguna dapat membuat QR Code dengan mendesain tampilan sesuai kebutuhan, jenis informasi yang akan disimpan dalam QR Code juga dapat diatur sesuai sasaran penerima informasi. Pada software ini, data informasi yang dapat disimpan dalam sebuah QR Code bisa berupa teks, alamat surat elektronik, alamat web, tautan URL, nomer telpon, alamat media sosial dan beberapa data informasi lainnya. QR Code yang telah dibuat dapat diekspor dengan format file berupa bitmap, png, jpeg, atau tiff. Kemudian QR Code dapat disematkan dalam media informasi sesuai untuk disebar dan diakses oleh masyarakat.



Gambar 4. Tampilan piranti lunak QR Code Studio



Gambar 5

Atas: klik tanda kotak merah untuk memasukkan tautan informasi
Bawah: pilih tautan informasi yang akan disimpan dalam QR Code

Penyampaian informasi CAGAR BUDAYA dengan menggunakan QR Code

Penyampaian informasi tentang Cagar Budaya yang selama ini sudah banyak dilakukan oleh beberapa instansi pemerintah yang bertanggung jawab mengenai pelestarian Cagar

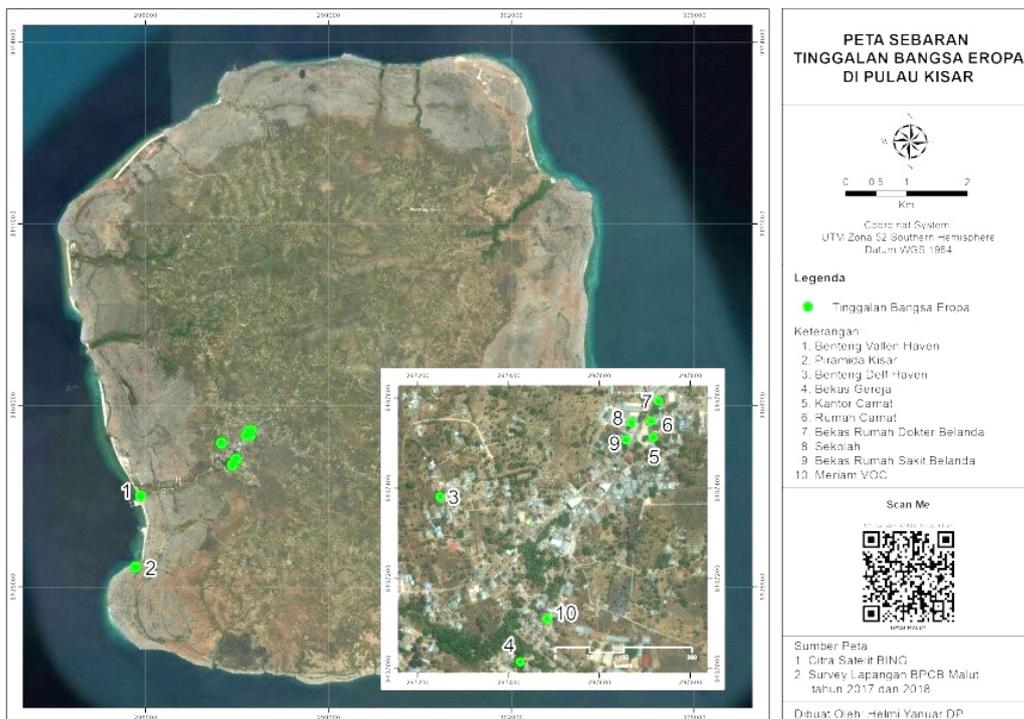
Budaya bahkan oleh masyarakat umum. Penyebaran informasi tentang Cagar Budaya kepada masyarakat biasa dilakukan dengan acara-acara seperti pameran, seminar, sosialisasi, pembuatan poster, buku, dan lainnya, namun juga saat ini dilakukan dengan menggunakan media sosial seperti Instagram,

Youtube, Facebook, Twitter dan yang lainnya. Kecanggihan teknologi membawa perubahan dalam penyampaian informasi Cagar Budaya kepada masyarakat, dengan menggunakan jaringan internet semua informasi Cagar Budaya dapat disampaikan kepada masyarakat secara cepat dan mudah. Nilai positif yang dimiliki oleh penyebaran informasi melalui internet atau *cyberspace* menjadikannya media yang perlu terus dikembangkan dengan tidak mengurangi nilai penting dari objek aslinya (Amril, 2016).

Pemanfaatan *QR Code* dalam penyampaian informasi Cagar Budaya merupakan perkembangan dari penyebarluasan informasi Cagar Budaya yang saat ini sedang dilakukan. Hal tersebut bertujuan agar informasi yang akan dibagikan dapat diterima dengan mudah dan cepat oleh masyarakat. Jenis informasi tentang Cagar Budaya tentunya sangat beraneka ragam, dapat

berupa deskripsi, peta, foto, maupun video. Banyaknya jenis informasi tentang Cagar Budaya tidak akan cukup untuk dimuat dalam sebuah poster, peta, buklet, atau leaflet. Namun dengan memanfaatkan *QR Code*, informasi tersebut dapat disimpan dan bisa diakses oleh masyarakat kapan pun dan dimana pun. *QR Code* yang telah dipindai akan membawa kita menuju tautan yang disimpan dalam kode tersebut, sehingga informasi yang belum tersampaikan bisa dijelaskan lebih rinci.

Salah satu contoh pemanfaatan *QR Code* dalam penyampaian informasi tentang Cagar Budaya dapat dilakukan dalam bentuk peta sebaran Cagar Budaya. Peta sebaran Cagar Budaya biasanya hanya menampilkan informasi tentang lokasi dari objek Cagar Budaya namun informasi tentang deskripsi dan foto tidak bisa disajikan, sehingga perlu media lain untuk menjelaskan secara rinci setiap objek Cagar Budaya. Hal tersebut dapat



TINGGALAN KOLONIAL PULAU KISAR



BPCB MALUT

Gambar 6
Atas: Peta sebaran tinggalan Bangsa Eropa di Pulau Kisar
Bawah: *QR Code* tentang informasi CB tinggalan Bangsa Eropa di Pulau Kisar (Silakan dipindai)

berupa deskripsi, peta, foto, maupun video. Banyaknya jenis informasi tentang Cagar Budaya tidak akan cukup untuk dimuat dalam sebuah poster, peta, buklet, atau leaflet. Namun dengan memanfaatkan *QR Code*, informasi tersebut dapat disimpan dan bisa diakses oleh masyarakat kapan pun dan dimana pun. *QR Code* yang telah dipindai akan membawa kita menuju tautan yang disimpan dalam kode tersebut, sehingga informasi yang belum tersampaikan bisa dijelaskan lebih rinci.

Salah satu contoh pemanfaatan *QR Code* dalam penyampaian informasi tentang Cagar Budaya dapat dilakukan dalam bentuk peta sebaran Cagar Budaya. Peta sebaran Cagar Budaya biasanya hanya menampilkan informasi tentang lokasi dari objek Cagar Budaya namun informasi tentang deskripsi dan foto tidak bisa disajikan, sehingga perlu media lain untuk menjelaskan secara rinci setiap objek Cagar Budaya. Hal tersebut dapat diatasi dengan menyematkan *QR Code* yang berisi tentang informasi lainnya dengan tujuan ketika peta dicetak maka informasi tentang deskripsi tiap objek Cagar Budaya juga dapat diakses dan dapat diunduh oleh setiap orang.

Selain peta sebaran Cagar Budaya, penyampaian informasi dengan memanfaatkan *QR*

Code juga bisa dilakukan pada papan informasi Cagar Budaya. Papan informasi yang terdapat di lokasi Cagar Budaya seringkali kurang informatif dan kurang menarik, dengan menggunakan *QR Code* diharapkan papan informasi di Cagar Budaya lebih interaktif kepada pengunjung untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Cagar Budaya yang mereka kunjungi. Papan Informasi dapat dibuat sederhana namun dikemas secara menarik, menampilkan sedikit informasi yang membuat penasaran pengunjung dan untuk informasi lebih lanjut dapat memindai *QR Code* yang tersemat dalam papan informasi tersebut.

Penyampaian informasi tentang Cagar Budaya dengan *QR Code* bisa disematkan dalam sebuah buklet atau leaflet. Buklet atau leaflet biasanya hanya berisi tentang informasi singkat atau infografis mengenai Cagar Budaya, untuk lebih menarik dapat ditambahkan *QR Code* yang berisi tautan video atau foto-foto agar masyarakat bisa menikmati informasi tersebut dengan visualisasi lebih menarik. Bahkan media sekecil pembatas buku yang sederhana pun bisa memberikan informasi yang sangat luas dengan memanfaatkan teknologi *QR Code* dan yang lebih penting adalah masyarakat dapat dengan mudah dan cepat untuk mendapatkan informasi tentang Cagar Budaya.



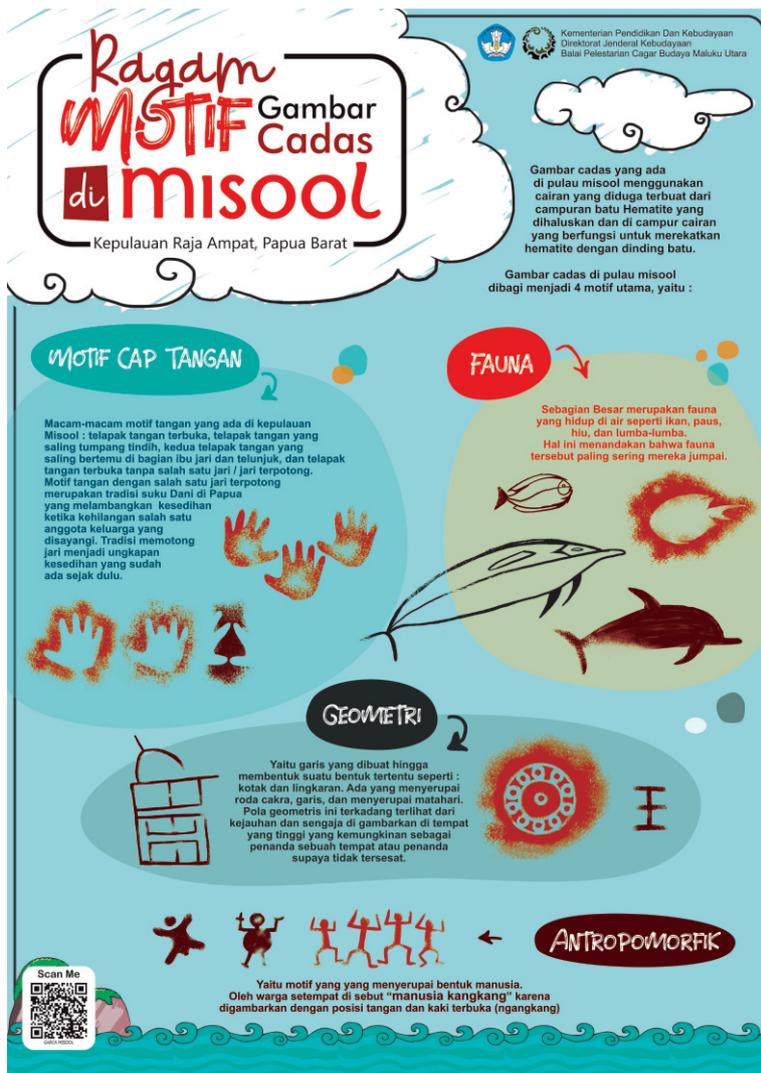
Benteng Kalamata

Gambar 7
Samping : Contoh papan informasi dengan menyematkan *QR Code* (Design oleh: Aan Nurdian Saputra)
Atas : *QR Code* informasi lebih lanjut tentang Benteng Kalamata (Silakan dipindai)

C. PENUTUP

Kemajuan teknologi mendorong setiap orang untuk mendapatkan informasi dengan cara cepat dan mudah, begitu pula dengan informasi yang berkaitan dengan Cagar Budaya. Penyampaian informasi Cagar Budaya dituntut untuk dapat diakses oleh masyarakat luas dimana saja dan kapan saja, oleh karena itu strategi penyampaian secara konvensional dengan mengadakan *event* atau acara seperti pameran, sosialisasi dan seminar kurang efisien. Ditambah dengan adanya pandemi Covid-19 ini akan sangat terkendala jika harus mengadakan acara yang mengumpulkan kerumunan massa, oleh sebab itu penyebaran informasi Cagar Budaya dengan menggunakan jaringan internet menjadi langkah yang paling tepat.

Memanfaatkan kecanggihan *smartphone* sebagai media penyebaran informasi tentang Cagar Budaya kepada masyarakat kiranya jauh lebih efektif. Selain itu, kemajuan teknologi mendorong untuk membuat inovasi dalam penyampaian informasi Cagar Budaya dan pelestariannya agar lebih menarik dan informatif. Penggunaan *QR Code* sebagai sarana untuk penyebaran informasi Cagar Budaya kepada masyarakat bisa dilakukan sebagai alternatif untuk menarik perhatian dan menambah interaksi. Keunggulan *QR Code* yang bisa dipindai oleh kamera *smartphone* sangat membantu dalam mengarahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi Cagar Budaya yang lebih lengkap dan detail.



GARCA MISOOL

Gambar 8
Samping : Infografis tentang motif gambar cadas di Misool (Design oleh: Iffah Izatun Nida)
Atas : QR Code video dokumenter gambar cadas Misool (Silakan dipindai)

Sumber Referensi:

- Amri, Fauzan. 2016. "Cyber Arkeologi Dalam Komunikasi Arkeologi Publik Sebagai Sarana Pelestarian Cagar Budaya" dalam Jurnal Keconservasi Cagar Budaya Borobudur Volume 10 No. 2 Desember 2016. Magelang: Balai Konservasi Borobudur
- Marwoto, Irmawati dan Johan. 2012. "Arkeologi menurut Interpretasi Siapa?: Mencari Tempat untuk Arkeologi Alternatif di Indonesia". https://www.researchgate.net/publication/317382864_Arkeologi_menurut_Interpretasi_Siapa_Mencari_Tempat_untuk_Arkeologi_Alternatif_di_Indonesia, diakses pada tanggal 20 Juli 2020.
- Mustofa, Novan Adi, Dkk. 2016. "Implementasi Quick Response (Qr) Code Pada Aplikasi Validasi Dokumen Menggunakan Perancangan Unified Modelling Language (UML)" dalam Antivirus: Jurnal Ilmiah dan Teknik Informatika Vol 10 No 1 Mei 2016. Blitar: Universitas Islam Blitar
- Numatias. 2018. "Penguatan Teknologi Informasi untuk Publikasi Cagar Budaya dan Permuseuman". <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsubar/penguatan-teknologi-informasi-untuk-publikasi-cagar-budaya-dan-permuseuman/>. Diakses pada tanggal 20 Juli 2020.
- Wijaya, Adiguna dan Gunawan, A. 2016. "Penggunaan QR Code Sarana Penyampaian Promo dan Informasi Kebun Binatang Berbasis Android" dalam Jurnal Bianglala Informatika Vol 4 No 1-Maret 2016. Yogyakarta: LPPM Universitas Bina Nusantara Yogyakarta

Sumber Internet:

<https://www.tec-it.com/en/download/free-software/qrcode-studio/Download.aspx>



TAWARAN KONSEPTUAL PENGELOLAAN BANGKAI KAPAL JEPANG SUNGAI BALANTANG-MALILI SEBAGAI OBJEK WISATA BERBASIS WARISAN SEJARAH BUDAYA

Andriany

A. Prolog

Sebuah bangkai kapal teronggok di sungai Balantang Kota Malili, Provinsi Sulawesi Selatan, yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan sebutan “bangkai kapal Jepang”.

Bangkai kapal tersebut terletak di sekitar pemukiman penduduk, dimana masyarakat sering melakukan aktifitas yang bersentuhan dengan bangkai kapal tersebut. Kondisi ini menyebabkan bangkai kapal yang notabene merupakan bukti sejarah dalam kondisi terancam punah, akibat vandalisme dan pengambilan bagian-bagian kapal.

Disisi lain bangkai kapal tersebut telah menjadi tujuan wisata lokal yang ikonik dan ramai dikunjungi, karena memiliki daya tarik tersendiri sebagai jejak peninggalan kolonialis di Indonesia khususnya di Luwu Timur. Bangkai kapal ini menjadi objek wisata bukan alam, yang mana umumnya objek wisata kota-kota kecil di Indonesia adalah wisata alam.

Oleh karena itu bangkai kapal Jepang di Sungai Malili yang bersifat monumental ini perlu dikelola dan dikembangkan berdasarkan kaidah-kaidah pelestarian cagar budaya sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar Budaya, agar dapat

dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masyarakat khususnya masyarakat di sekitar lingkungan bangkai kapal, masyarakat Malili dan masyarakat Luwu Timur pada umumnya. Sebagaimana amanah Undang-undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010 yang menyatakan bahwa “Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda cagar budaya, Bangunan cagar Budaya, Situs cagar Budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan”. Konsep pelestarian yang dimaksudkan dalam undang-undang ini dijabarkan sebagai “upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya.

B. Pendahuluan

Dahulu paradigma pelestarian adalah perlindungan benda cagar budaya, yang terkesan melindungi cagar budaya agar “tidak tersentuh” oleh orang lain, dan hanya dinikmati oleh orang yang berkecimpung dalam dunia pelestarian cagar

budaya saja (arkeologis sentris), hal ini bahkan memicu munculnya stigma, bahwa pelestarian cagar budaya sebagai sesuatu yang dapat menghambat pembangunan. Dalam sistem kapitalisasi negara pun, pelestarian cagar budaya dicap sebagai *cost center* yang kurang memberi kontribusi dalam pembangunan dan tidak memberikan dampak balik bagi roda perekonomian negara, padahal cagar budaya dinilai memiliki potensi untuk dapat memberikan profit bagi negara karena dapat dimanfaatkan melalui ekonomi kreatif dan kepariwisataan.

Seiring terbitnya undang undang cagar budaya Nomor 11 Tahun 2010 tentang pelestarian cagar budaya di Indonesia, paradigma pelestarian cagar budaya pun berubah, dewasa ini paradigma pelestarian cagar budaya dilakukan/dan atau dapat dilakukan oleh semua kalangan, melalui mekanisme yang diatur dalam regulasi dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau dahulu tugas dan tanggungjawab pelestarian cagar budaya adalah kewenangan pemerintah, maka saat ini masyarakat ikut dilibatkan dalam upaya pelestarian sebagai pemangku kepentingan. Pemerintah dan pemangku kepentingan juga harus melibatkan masyarakat setempat dalam mengembangkan dan mengelola objek warisan sejarah budaya agar masyarakat mempunyai *sense of belonging* yang tinggi sehingga dapat mengintegrasikan dengan tradisi keseharian dan kehidupan sosialnya. Warisan budaya baik berupa benda, hingga lansekap dapat memacu kreativitas dan mampu memberikan pengalaman yang unik bagi penikmatnya.

Menurut Andre Donas, pengejawantahan Undang-undang cagar budaya nomor 11 tahun 2010 adalah;

- a) (ekonomi) cagar budaya harus mampu meningkatkan harkat hidup masyarakat
- b) (tanggung jawab publik) Pelestarian cagar budaya adalah tanggung jawab semua masyarakat.

- c) (peradaban) Pelestarian cagar budaya harus membuka peluang upaya pengembangan dan pemanfaatannya oleh masyarakat
- d) (tata kelola negara) pemerintah meringankan beban pelestarian yang ditanggung masyarakat.

C. Data Arkeologis Bangkai Kapal Jepang

Bangkai kapal Jepang di Sungai Balintang saat ini dalam kondisi fisik masih relatif utuh dengan presentase sekitar 60%, dan masih memungkinkan untuk langsung dikenali sebagai struktur kapal, baik bentuk maupun fungsinya tanpa harus melakukan analisis terlebih dahulu. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, kerusakan yang terjadi pada bangkai kapal tersebut hampir merata di semua bagian, walaupun volume kerusakan masing-masing berbeda beda. Berdasarkan analisa, kerusakan struktur bangkai kapal tersebut umumnya diakibatkan oleh dua faktor yaitu faktor lingkungan dan faktor manusia.

Kerusakan yang diakibatkan oleh faktor lingkungan adalah letak bangkai kapal di sungai yang terpengaruh pada dinamika pasang surut air laut, pada saat air pasang sebagian besar badan kapal, terutama yang berada di sisi kanan dan cenderung di tempat rendah akibat kemiringan akan tenggelam, namun pada saat air surut bagian struktur kapal yang berada di bagian yang tinggi, dan tadinya terendam air akan muncul kembali ke permukaan. Persoalan berikutnya adalah, ketika dalam kondisi kering bangkai kapal terpapar panas matahari. Kedua hal tersebut terjadi secara berulang dan terus menerus dalam waktu yang lama. Analisa terhadap dinamika tersebut menunjukkan bahwa faktor tersebut juga berkontribusi terhadap terjadinya proses kimiawi yang memicu terjadinya kerusakan berupa korosi. Faktor ancaman lainnya, bagi struktur kapal adalah, sedimentasi lumpur, yang diakibatkan oleh aktifitas pasang surut perairan, serta kebiasaan warga membuang sampah di sungai. Akibat sedimentasi pasir di bagian dalam kapal, di beberapa bagian nampak tumbuh tanaman.



Kondisi eksisting bangkai kapal

Faktor manusia juga menjadi penyebab utama dari kerusakan dan hilangnya sebagian besar struktur kapal, terutama aktifitas pengambilan besi-besi bagian struktur kapal, menurut informasi yang diperoleh pengambilan bagian-bagian dari struktur kapal untuk dijual atau dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut diperparah dengan aksi vandalisme berupa grafiti pada bagian dinding kapal.

Secara umum, struktur kapal terbagi atas tiga bagian general, yaitu haluan, buritan dan palka, yang dalam kegiatan ini diidentifikasi satu persatu agar dapat memberikan gambaran kondisi terkini bangkai kapal tersebut. Mengacu pada hasil observasi yang dilakukan, bangkai kapal nampak dalam posisi miring 10° ke arah kanan, sehingga sisi kanan geladak hingga haluan bangkai kapal terendam air. Bangkai kapal memanjang dengan orientasi barat-timur, dimana bagian haluan berada di sisi timur, dan bagian buritan kapal berada di sisi barat, searah aliran air. Pada saat kondisi pasang, 90% struktur bangkai kapal tenggelam atau terendam air, di beberapa bagian kapal akan tenggelam seperti lambung secara keseluruhan, palka, ruang mesin dan dudukan senjata pada bagian haluan, yang muncul hanya sebagian kecil dek dan bagian atap ruangan dapur. Ketika air laut surut, maka bagian-bagian kapal yang tadinya tenggelam akan muncul kembali di permukaan kecuali bagian tengah lambung hingga lunas yang sudah tertimbun pasir dan lumpur, begitu pula dengan *canon set* yang terdapat di haluan kapal,

bagian buritan kapal nampak di atas permukaan air.

Berdasarkan hasil pengukuran, dimensi bangkai kapal yaitu panjang 40 meter dan lebar 7 meter, sayangnya ketinggian kapal tidak dapat diukur, oleh karena sebagian struktur kapal tenggelam ke dalam air.

Gambaran dan deskripsi detail kapal dapat dilihat pada *laporan kegiatan penggambaran bangkai kapal Jepang Malili* yang disusun oleh Unit Pengendalian Peninggalan Bawah Air BPCB Makassar TA 2017.

D. Historical

Periode kolonialisasi, khususnya era kolonialisasi Jepang di Nusantara, tak bisa dipisahkan dengan sejarah *Pacific Teater* pada masa perang dunia II, yang menyisakan banyak jejak sejarah dan bukti arkeologis di berbagai ruang geografis Indonesia saat ini. *Pacific Teater* adalah istilah yang didefinisikan oleh *Chester Nimiz* Komandan tertinggi sekutu (Amerika, Inggris, Australia, Belanda) untuk menggambarkan area secara luas meliputi Samudra Pasifik dan negara-negara kepulauan yang ada di dalamnya (termasuk Nusantara) yang menjadi arena pertempuran antara pasukan sekutu dan pasukan Jepang. Sebagian besar bukti arkeologis tersebut tertinggal sebagai jejak militerisme dan peperangan seperti bangunan-bangunan militer (markas, bunker) serta armada peperangan. Armada peperangan yang dimaksud adalah sisa-sisa sistem persenjataan serta bangkai kapal dan bangkai pesawat yang teronggok, baik di darat maupun di dasar perairan tersebar di seluruh Indonesia.

Salah satunya adalah bangkai kapal di Sungai Malili, desa Balantang, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Menurut penduduk setempat, cerita yang diwarisi secara turun temurun meyakini bangkai kapal tersebut merupakan bangkai kapal Jepang. Hal itu didasarkan pada memori kolektif warga kampung Balantang, bahwa dahulu daerah ini dibombardir oleh pesawat sekutu, yang mengejar armada Jepang yang berada di area tersebut, dan kapal tersebut adalah salah satu target yang berhasil dilumpuhkan oleh serangan udara.

Cerita tersebut diperkuat dengan bukti arkeologis yang ditemukan pada struktur kapal, berupa huruf kanji pada bagian tungku pembakaran di bagian dapur. Sayangnya, informasi yang diperoleh di lapangan tidak dapat merincikan jenis apakah kapal tersebut dan musabab kenapa kapal tersebut bisa sampai ke sungai Balintang Malili.



Gambar 1-2: Huruf kanji pada dapur set/tungku pembakaran yang berarti "milik Jepang"

Keberadaan kapal tersebut memang menjadi pertanyaan yang cukup menggelitik, karena dari sekian temuan bangkai kapal perang di Sulawesi, bangkai kapal ini adalah yang pertama ditemukan berada di sungai.

Pada masa pendudukan Jepang, Sulawesi merupakan salah satu pusat pemerintahan Jepang di wilayah Indonesia Timur dimana *minseifu* berada, yang dipimpin oleh *Kaigun* atau Angkatan laut kekaisaran Jepang.



Patut diduga, keberadaan armada perang Kekaisaran Jepang ke daerah tersebut ada kaitannya dengan daerah Soroako sebagai daerah sumber

nikel. Sebagaimana diketahui semangat memenangkan perang Asia Pasifik/Asia Timur Raya, menyebabkan Jepang mengincar wilayah-wilayah di Nusantara yang kaya akan sumber daya alam dan mineral. Penguasaan Jepang atas wilayah-wilayah di Nusantara dan beberapa negara di Asia Tenggara lainnya, didorong oleh praktek sistem *autarki* yaitu eksplorasi sumber daya ekonomi dikerahkan untuk memenuhi kebutuhan di negara Jepang, dan yang terpenting untuk menunjang kegiatan perang. Selain Soroako, Pomalaa di daerah Sulawesi Tenggara yang juga kaya akan nikel telah lebih dulu dikuasai oleh Jepang.

Berdasarkan sumber-sumber tertulis disebutkan bahwa daerah sumber nikel di Sulawesi yaitu Pomalaa di Sulawesi Tenggara dan Soroako di Sulawesi Selatan tak luput dari penguasaan tentara Jepang. Secara geografis Pomalaa dan Soroako berada dalam ruang geologis yang sama, yang mengandung batuan ultra basa sebagai sumber nikel, dan berdasarkan penelitian yang dilakukan pada masa VOC era 1930an, wilayah-wilayah tersebut diketahui mengandung potensi nikel yang cukup besar sehingga kedua tambang tersebut tidak dapat dipisahkan.

Ketika kampanye teater pacific digencarkan oleh sekutu untuk melumpuhkan kekuatan armada perang Jepang, pasukan sekutu yang diwakili oleh *USAAF* dan *RAAF*, sepakat membagi wilayah Nusantara untuk memudahkan mengusir pasukan Jepang. Khusus wilayah yang mencakup geografis Pomalaa dan Soroako berada di bawah kendali **RAAF** (*Royal Australian Air Force*), sehingga dapat disimpulkan bahwa bangkai kapal Jepang yang teronggok di sungai Balintang Malili saat ini adalah korban pengeboman yang dilakukan oleh pasukan sekutu dalam hal ini pasukan dari Australia.

Pacific teater atau perang Asia Timur raya adalah arena parade kekuatan dan kecanggihan armada perang antara Jepang versus sekutu. Pada masa itu, Kekaisaran Jepang membangun kekuatan armada perang secara besar-besaran, dan menjadikannya armada perang terbesar ketiga setelah armada perang Britania Raya dan Amerika. Armada perang yang dinamai *Japan Imperial Navy* atau Angkatan Laut Kekaisaran Jepang terdiri dari

kapal-kapal perang (battle ships), berupa kapal induk (mother ship/aircraft carriers), kapal penjelajah (cruisers), kapal perusak (destroyers), kapal selam (submarines), serta berbagai kapal pelengkap diantaranya adalah kapal sungai (river gunboat) dan kapal dagang (*merchant ship*).

Dua jenis kapal yang disebut terakhir, merupakan armada kapal dengan ukuran yang lebih kecil dibanding ukuran kapal perang lainnya. *River Gunboat* adalah kapal perang yang dioperasikan khusus untuk perairan dangkal atau sungai, bentuk kapal memiliki draft dangkal agar lebih mudah bermanuver di sungai, kapal jenis ini dipersenjatai dengan meriam kaliber kecil, atau dua buah senjata berupa meriam dan senapan mesin. Biasanya struktur kapal perang sungai tidak dilapisi dengan baja, dan dimanfaatkan sebagai kapal pengontrol dari sungai. Sementara *Merchant ships* bukan armada perang, tetapi merupakan bagian dari armada perang, yang berfungsi komersil, yang bertugas untuk memobilisasi sumber daya alam dari negara-negara pendudukan, untuk memenuhi kebutuhan di negara Jepang serta untuk menopang kebutuhan energi peperangan. Kapal-kapal jenis ini, merupakan kapal dagang yang dipesan khusus oleh angkatan laut Kekaisaran Jepang dan mengingat pentingnya misi kapal-kapal tersebut, sehingga kapal-kapal tersebut pun dilengkapi dengan persenjataan.

E. Geografis

Sungai Balintang berada di kota Malili, Kabupaten Luwu Timur di jazirah tengah pulau Sulawesi yang secara astronomis berada pada posisi anatar 02 03' 00" – 03 03' 5" lintang selatan dan 119 28' 56" – 121 03' 25" Bujur Timur, berada di bagian paling timur dari Provinsi Sulawesi Selatan serta berbatasan langsung dengan provinsi Sulawesi Tengah di sebelah utara dan timur, sebelah selatan berbatasan dengan provinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone, serta sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Luwu Utara.

Kabupaten Luwu Timur memiliki keunikan tersendiri dibanding dengan daerah lainnya di Sulawesi selatan, baik bentang topografi maupun sumber dayanya, antara lain adanya lima sistem

danau, yang adalah danau terdalam dan terluas di Asia tenggara, kemudian sumber daya alam berupa potensi pertambangan laterit nikel dan biji besi dan daerah penghasil hutan berupa kayu dan rotan (<https://sulselprov.go.id>), serta seperti pada umumnya daerah Luwu yang memiliki makanan khas tradisional yang sangat populer berbahan sagu yang dikenal dengan nama kapurung, dan pacco ikan yaitu ikan yang dikonsumsi mentah-mentah, turut memperkaya Kabupaten ini.

Bangkai kapal terendap di muara sungai, dan berjarak sekitar dua kilo meter dari garis batas sungai dengan laut. Hal ini menyebabkan perairan di situs terpengaruh dinamika pasang surut. Berdasarkan pengamatan pada waktu pelaksanaan kegiatan, pola pasang surut yang terjadi pada saat itu adalah, air pasang pada malam hingga siang hari, dan air surut terjadi pada sore sekitar pukul 15.30 hingga 19.00. Posisi di muara juga memberi pengaruh terhadap kondisi *visibility* perairan, dimana air sungai disertai dengan partikel-partikel pasir sehingga menyebabkan perairan keruh sepanjang waktu.

Sejak masa kolonialis sungai Malili sudah difungsikan sebagai jalur transportasi, sehingga dapat disaksikan bala-bala (perahu tradisional nelayan mengkases laut melalui sungai. Selain itu, di muara sungai Malili terdapat pelabuhan PT. Vale, yang menjadikan sungai tersebut sebagai jalur bagi pengapalan hasil tambang nikel dari Soroako.

Bangkai kapal, berada di pinggiran sungai, dan menjadi bagian dari lansekap pemukiman penduduk desa Balintang. Antara pemukiman dan sungai dibatasi oleh tanggul. Perlu dikemukakan, bahwa tanggul sungai dibangun pada sekitar tahun 2016, hal mana kemudian memberikan dampak terhadap lingkungan pengendapan bangkai kapal, yaitu terjadinya pendangkalan di sisi kiri bangkai kapal yang sangat signifikan, akibat penimbunan material sisa pembuatan tanggul. Buangan sisa aktifitas pembuatan tanggul secara tidak langsung juga kemudian memicu terciptanya delta yang mengakibatkan posisi kapal menjadi miring. Dampak lain yang ditimbulkan adalah, pada saat air surut endapan pasir menutupi bagian geladak kapal.

Sepanjang bantaran sungai bagian utara merupakan area pemukiman padat penduduk, hal ini secara langsung maupun tidak memberi dampak negatif terhadap eksisting bangkai kapal. Diketahui banyak sampah yang terdampar di badan bangkai kapal, baik itu sampah yang terbawa arus dari hulu sungai maupun sampah yang dibuang langsung oleh warga disekitar bangkai kapal. Bahkan warga sekitar memanfaatkan bangkai kapal sebagai MCK.

Diatas struktur badan kapal, nampak melintang jembatan kayu yang dibangun atas inisiatif warga setempat. Jembatan tersebut, selain difungsikan sebagai dermaga juga untuk memudahkan warga mengakses bangkai kapal tersebut.

F. Potensi dan Ancaman

Keunikan landscape alam Luwu Timur antara lain adanya lima sistem danau terluas dan terdalam, yang masing-masing dihubungkan oleh sungai, serta hutan konservasi di barisan perbukitan veerbek. Keunikan lainnya adalah sumber daya alam berupa kandungan nikel, yang kesemuanya terdapat di daerah Soroako, serta keunikan sebagai bagian dari budaya kerajaan Luwu, terutama sebagai daerah pembuat senjata pusaka dan kuliner khas "kapurung". Keberadaan bangkai kapal Jepang di sungai Balantang Malili diduga terkait dengan nikel dan kekayaan sumber daya alam lainnya.

Bangkai kapal Jepang yang kemudian menjadi situs yang menjadi bukti kehadiran bangsa Jepang di Luwu Timur, saat ini presentase kondisinya sekitar 60%. Walaupun saat ini warga kota Malili telah menjadikan bangkai kapal sebagai objek wisata, namun kondisi kekinian bangkai kapal tersebut dianggap memprihatinkan karena beberapa aktivitas masyarakat yang berdampak negatif terhadap eksistensi bangkai kapal tersebut. Fakta empiris menunjukkan bangkai kapal itu sendiri yang harus menyesuaikan kondisinya dengan perubahan yang terjadi pada lingkungan dan masyarakatnya. Pada faktanya perubahan tersebut justru menjadi faktor ancaman bagi eksistensi bangkai kapal Jepang dimaksud.

Dari hasil identifikasi yang dilakukan, ditemukan beberapa faktor yang menjadi ancaman, yang kemudian secara garis besar dikelompokkan menjadi dua unsur yaitu faktor alam dan faktor manusia;

a) Faktor manusia

- I. Warga yang bermukim di sekitar situs, hingga saat ini masih memiliki kebiasaan untuk buang air besar di dalam struktur kapal.
- II. Kebiasaan buruk lainnya adalah kebiasaan membuang sampah ke sungai bahkan ke titik bangkai kapal yang mana hal ini memberi andil terhadap proses sedimentasi pada struktur kapal.



- III. Kebiasaan mengambil bagian-bagian struktur kapal, kondisi ini disebabkan karena harga jual beli besi bekas yang mahal, terutama bahan-bahan dasar pembuatan kapal.

- IV. Pemanfaatannya sebagai objek wisata menyebabkan terjadinya vandalisme atau coret-coretan pada beberapa bagian kapal.
- V. Pembangunan yang tidak mempertimbangkan konsep pelestarian cagar budaya.
- VI. Saat ini warga membangun jembatan kayu diatas struktur kapal dengan maksud agar lebih mudah mengakses ke struktur kapal, selain itu jembatan kayu tersebut difungsikan sebagai dermaga dan tempat penambatan perahu. Kondisi ini menyebabkan nilai estetika terhadap bangkai kapal sebagai objek pandang menjadi berkurang.



b) Faktor alam

- I. Lokasi bangkai kapal yang berada di muara sungai, sehingga ketika banjir membawa sedimen lumpur dari hulu, akan berdampak pada bangkai kapal.

- II. Sungai sebagai jalur lalu lintas perahu bala-bala berkecepatan tinggi, menyebabkan dampak pada bangkai terkait hantaman ombak secara terus menerus berkontribusi terhadap kemiringan bangkai kapal.



G. Paradigma Konseptual

Bangkai kapal Jepang di Sungai Balantang Malili adalah bangkai kapal dari masa kolonisasi di Indonesia, merupakan bukti sejarah yang menunjukkan bahwa wilayah Indonesia menjadi bagian dari arena pertempuran antara pihak sekutu melawan Jepang pada perang dunia II. Bangkai kapal Jepang tersebut menjadi monumen yang mengingatkan masyarakat Malili tentang peristiwa penjajahan yang pada akhirnya melahirkan rasa nasionalisme dalam menghargai perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan, oleh karena itu bangkai kapal Jepang tersebut menjadi warisan sejarah budaya, yang mengandung nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan pendidikan sehingga harus dilestarikan sesuai amanah Undang-undang nomor 11 tahun 2010. Dalam Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa *warisan budaya bersifat kebendaan adalah cagar budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan*. (Sebelum ditetapkan sebagai cagar budaya, objek warisan sejarah budaya disebut sebagai **Objek diduga cagar budaya (ODCB)** dimana perlakuan hukumnya sama dengan cagar budaya).

Dalam terminologi, warisan sejarah budaya adalah entitas yang menjadi jati diri suatu masyarakat yang diwariskan dari generasi-generasi sebelumnya ke generasi yang akan datang. Oleh karena itu warisan sejarah budaya merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pada dasarnya pengelolaan warisan budaya harus diorientasikan pada kebutuhan masyarakat, kepentingan masyarakat harus menjadi perhatian utama dalam pengelolaan cagar budaya. Oleh karena itu komitmen pengelolaan warisan sejarah budaya tersebut dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian, yang diwujudkan dalam pengelolaan berupa upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan melalui kebijakan pengaturan perencanaan pelaksanaan dan pengawasan, agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, baik untuk tujuan ilmiah, pendidikan maupun pariwisata. Pernyataan tersebut termaktub dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 bahwa *“negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya”*.

Pemberdayaan adalah memposisikan masyarakat sebagai partisipan/agen yang bertindak dimana aturan, pengetahuan dan keterampilan yang berlandaskan kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya budaya.

Sebagai sebuah sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, pengelolaan warisan budaya pada prinsipnya meliputi 3 aspek yaitu;

- a. Identifikasi sumber daya budaya, meliputi identifikasi lingkungan dan kondisi terkini objek, serta potensi ancamannya.
- b. Penanganan sumber daya budaya sebagai bentuk perlindungan, meliputi penguatan status, dan perawatan dan pemeliharaan (konservasi).
- c. Manajemen sumber daya jangka panjang yang merupakan bentuk pengembangan untuk pemanfaatannya.

Pengelolaan sumber daya budaya harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan sehingga dapat tetap mengedepankan kelestariannya dan memberi manfaat secara menyeluruh. Manajemen sumber daya budaya harus diintegrasikan dengan perencanaan tata guna lahan terkait dengan berbagai aspek kepentingan manusia, hal ini dimaksudkan agar pemerintah dapat mengurangi dampak kerusakan warisan budaya akibat proses pembangunan.

Regulasi tentang otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya budaya, dan kondisi warisan budaya di satu daerah ditentukan oleh kebijakan pemerintah setempat, apakah akan membawa kebaikan bagi warisan budaya tersebut atau malah menghancurkannya.

Berdasarkan berbagai konsep tersebut diatas, secara teoritis bangkai kapal Jepang Sungai Balantang Malili, menjadi penting untuk dilestarikan karena mengandung nilai :

1. Nilai politik dan ideologi; kehadiran bangkai kapal di area ini adalah simbol dari perjalanan sejarah, khususnya masa kolonialisme di daerah Luwu Timur, dan Indonesia pada umumnya. Bangkai kapal ini dapat menjadi simbol dari peristiwa traumatis penjajahan Jepang serta menjadi monumen sebagai bukti kongkrit kehadiran bangsa penjajah di tanah Luwu. Berakhirnya kolonialisme menjadi tonggak kebangkitan nasionalisme dan merekonstruksi jati diri bangsa. Hal yang dimana dapat menjadi pendorong dan penguat nasionalisme dan kecintaan generasi muda pada tanah air Indonesia.

2. Nilai pendidikan; bangkai kapal dapat menjadi sumber pembelajaran sejarah lokal dan nasional, dan sumber pencerahan bagi masyarakat untuk memaknai bukti sejarah. Selain itu bangkai kapal tersebut dapat menjadi objek bagi pengembangan ilmu pengetahuan, baik itu sebagai media pembelajaran mengenai teknologi perkapalan maupun sebagai objek seni visualisasi.
3. Nilai ekonomi dan pariwisata; keberadaan bangkai kapal dapat memberikan dampak peningkatan ekonomi bagi masyarakat sekitar, dengan cara menjadikannya sebagai destinasi wisata, sumber inspirasi terhadap pengembangan ekonomi kreatif, serta memberikan keuntungan ekonomi dalam pemanfaatan jasa perjalanan wisata.

Keberadaan bangkai kapal di sungai (yang sangat jarang ditemukan, baik itu di daerah Sulawesi bahkan di Indonesia), karena keunikan dan kelangkaannya, bangkai kapal Jepang sebagai sebuah entitas memiliki nilai jual sebagai objek pariwisata, akan tetapi pemanfaatan sebagai objek wisata harus dikemas dalam bentuk yang menarik. Wisata budaya adalah salah satu wisata berbasis arkeologi/cagar budaya yang dapat dikembangkan di objek ini, bangkai kapal yang menjadi daya tarik harus dikelola secara optimal, dengan cara mengemasnya sebagai objek wisata budaya.

Eksisting bangkai kapal Jepang Saat ini berada di pemukiman penduduk, sehingga dibutuhkan pengaturan ruang untuk mendukung upaya pelestariannya. Kondisi kelestarian yang diabaikan oleh masyarakat karena ketidakpahaman. Ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman masyarakat akan nilai penting sebuah objek arkeologi menyebabkan perlakuan yang salah atau menyimpang dari ketentuan seharusnya yang dapat menyebabkan pergeseran makna.

Menurut UU nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang spesifik berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat kegiatan kepariwisataan dan dilengkapi dengan ketersediaan daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta

masyarakat yang saling terkait. Menurut Cooper bahwa kerangka pengembangan destinasi pariwisata terdiri dari komponen-komponen utama yaitu :

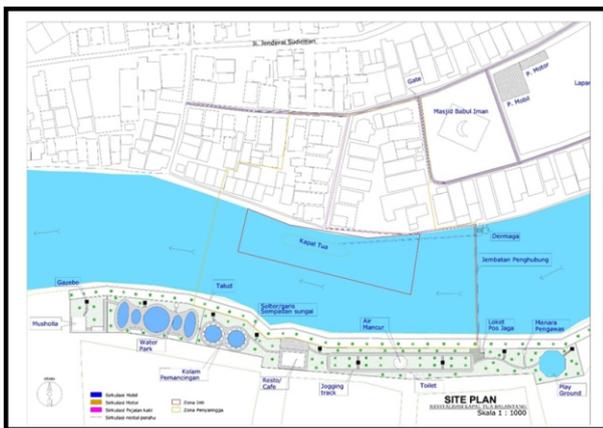
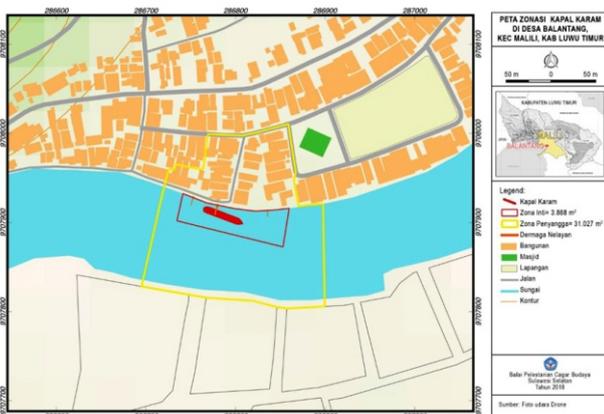
- a) Obyek daya tarik wisata (*Attraction*) mencakup keunikan dan daya tarik berbasis alam, budaya, maupun buatan.
- b) Aksesibilitas (*Accessibility*) mencakup kemudahan sarana dan sistem transportasi.
- c) Amenitas (*Amenities*) yang mencakup fasilitas penunjang dan pendukung wisata.
- d) Fasilitas umum (*Ancillary Service*) yang mendukung kegiatan pariwisata.
- e) Kelembagaan (*Institutions*) yang memiliki kewenangan, tanggung jawab dan peran dalam mendukung terlaksananya kegiatan pariwisata.

H. Rekomendasi

Saat ini bangkai kapal Jepang telah menjadi salah satu tujuan wisata yang cukup menarik antusiasme warga di Luwu Timur, agar objek ini menjadi objek wisata yang ikonik, pemerintah daerah harus mengelola dengan sebaik-baiknya dan dengan memberdayakan masyarakat setempat.

Pemanfaatan warisan sejarah budaya sebagai objek wisata, memiliki dua sisi dalam pemanfaatannya. Di satu sisi pariwisata dapat mendorong pelestarian warisan budaya dan berkontribusi dalam peningkatan perekonomian masyarakat, sedangkan di sisi lain kegiatan wisata akan merusak atau berdampak negatif terhadap warisan budaya ketika tidak dikelola dengan benar. Oleh karena itu masyarakat harus dilibatkan dalam perencanaan, implementasi/pelaksanaan, dan monitoring dari kegiatan pariwisata budaya. Pariwisata budaya ini perlu dikembangkan dengan tujuan untuk melestarikan kebudayaan itu sendiri agar tidak hilang seiring dengan perkembangan jaman. Serta didukung berbagai fasilitas serta layanan/jasa yang disediakan oleh pihak-pihak terkait seperti masyarakat, pengusaha, pemerintah maupun pemerintah daerah.

- 1) Langkah pertama dan paling penting adalah menetapkan status bangkai kapal Jepang sebagai cagar budaya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 (1) Undang-undang No.11 tahun 2010.
- 2) Aspek interpretasi terhadap nilai yang dimiliki cagar budaya harus dimunculkan dengan pengemasan dan penyajian informasi yang menarik tapi berdasarkan pada fakta. Oleh karena itu pemerintah perlu mengedukasi masyarakat, dan mensosialisasikan tentang sejarah terkait bangkai kapal tersebut, sehingga tetap memperhatikan nilai historisnya.
- 3) Pengembangan dan pengelolaan situs bangkai kapal Jepang berikut lingkungannya sebagai destinasi wisata harus disesuaikan dengan kaidah pelestarian cagar budaya, dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.
- 4) Dalam rangka pelestariannya, perlu diterapkan zona perlindungan bagi objek bangkai kapal, situsnya beserta lingkungan pemukiman. seperti zona perlindungan dan pengembangan cagar budaya yang dibuat oleh BPCB berikut ini;
- 5) Tak bisa dikesampingkan, bangkai kapal berada di area pemukiman penduduk, sehingga penataan objek dan lingkungannya, haruslah mencerminkan hubungan yang serasi diantara keduanya, sebagai upaya pemanfaatan secara optimal. Penyajian yang imajinatif antara keberadaan bangkai kapal sisa perang dunia 2, sebagai warisan sejarah budaya beserta keunikan masyarakat dan lingkungannya, yang berprofesi sebagai nelayan, akan menjadi paket wisata yang unik.
- 6) Pengembangan objek warisan sejarah budaya sebagai destinasi wisata, tidak bisa tidak disertai dengan kebutuhan akan ruang, sarana dan prasarana, oleh karena itu penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah harus dibekali dengan pemahaman tentang cagar budaya agar tidak berimplikasi terhadap berkurangnya nilai yang dikandung objek tersebut.
- 7) Sebagai objek wisata yang berada di pemukiman dan terletak di kota Malili, yang didukung dengan lansekap berupa sungai, hutan dan kawasan konsesi tambang. Bangkai kapal Jepang dapat dijadikan sebagai sebuah paket wisata urban yaitu, yang terintegrasi dengan spot-spot plaza yang terdapat di beberapa titik di pinggiran sungai Malili, dalam paket wisata ini juga menonjolkan kuliner asli tanah luwu. Selain itu paket wisata juga dapat diintegrasikan dengan susur sungai, yang melewati daerah konsesi tambang dan menonjolkan keasrian lingkungan yang masih terjaga.
- 8) Aktifitas vandalisme dan pengambilan bagian struktur kapal menjadikan Kondisi bangkai kapal saat ini memprihatinkan, berbagai grafiti dapat dijumpai dibangkai kapal, dan yang lebih memprihatinkan adalah warga sekitar bahkan menjadi bangkai kapal sebagai tempat buang air besar, sehingga menimbulkan kesan jorok, Selain itu warga juga membuang sampah langsung ke sungai, bahkan mengambil bagian dari struktur kapal. Oleh karena itu pemerintah wajib memberi pemahaman kepada masyarakat di sekitar situs dan masyarakat Malili secara umum tentang arti penting cagar budaya yang



memiliki sifat tua, rapuh, terbatas dan tidak dapat diperbaharui.

- 9) Membuka ruang terhadap proses kreatif, dengan cara mengedukasi masyarakat khususnya generasi muda, bagaimana menjadikan bangkai kapal dan lingkungannya sebagai sebuah sumber inspirasi yang dapat mendatangkan manfaat positif dan benefit.
- 10) Penataan visual pendukung, yang akan membangkitkan ketertarikan imajinatif tentang sejarah kedahsyatan pertarungan Jepang dan sekutunya di masa lalu. Hal ini dapat diimplementasikan melalui bentuk rumah informasi/papan informasi, pusat kunjungan ataupun audio-visual untuk meningkatkan pengalaman para pengunjung.
- 11) Setelah objek wisata dikelola dengan baik, pemerintah dapat mempromosikan sebagai salah satu destinasi wisata.
- 12) Dalam rangka melestarikan eksistensi bangkai kapal Jepang di Sungai Balintang Malili, maka berdasarkan data yang dikumpulkan di lapangan, maka perlu segera untuk melakukan :
 - a) Konservasi objek dan Lingkungan;
 - b) Mengeluarkan jembatan/dermaga kayu yang berada di atas struktur kapal dan yang berada disekitarnya, agar tidak mengurangi nilai estetika dan orisinalitas bangkai kapal sebagai objek
 - c) Melihat kondisi struktur kapal banyak mengalami korositas dan terbebani dengan sedimentasi lumpur.
 - d) Mendorong tumbuhnya sikap dan persepsi positif masyarakat sekitar terhadap bangkai kapal sebagai warisan sejarah yang perlu dilestarikan.
 - e) Penyusunan perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan keaslian bentuk dan lingkungan situs bangkai kapal Jepang

Dengan mengoptimalkan potensi situs bangkai kapal Jepang serta entitas-entitas yang ada di sekitarnya, diharapkan dapat memberikan dampak peningkatan ekonomi masyarakat sekitar yang pada akhirnya dapat memberi andil dalam pembangunan ekonomi lokal, regional maupun nasional. Semua dapat tercapai dengan manajemen dan pengelolaan yang terencana dengan baik dan tentu saja terpadu dengan aspek lainnya.



POTENSI CAGAR BUDAYA DI CENRANA

Hj. Inwani Rasyid

Pendahuluan

Cagar budaya sebagai warisan sejarah dan budaya merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa dan sumber daya budaya yang harus dipelihara, dilindungi dan dilestarikan karena memiliki arti dan nilai penting dalam merekonstruksi perjalanan sejarah masa lalu bangsa. Cagar budaya juga dapat menjadi kebanggaan sumber pembentukan karakter dan budi pekerti bangsa. Begitu pentingnya pelestarian cagar budaya tersebut sehingga sejak jaman Belanda telah terbit regulasi yang mengatur tentang peninggalan sejarah dan purbakala yaitu *Monumentent ordonantie*. Sejak Indonesia merdeka undang-undang yang mengatur tentang warisan budaya tersebut dikenal dengan Undang – Undang No 5 tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya kemudian sejak tahun 2010 undang – undang tersebut direvisi menjadi undang-undang No 11 tahun 2010 tentang Cagar budaya yang mengatur tentang perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya.

Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah. Cagar budaya perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam melindungi,

mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya (Anonim, 2017). Adanya paradigma pelestarian cagar budaya, maka diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan (Anonim, 2017). Temuan cagar budaya merupakan bukti data arkeologis dari peradaban masa lalu, potret masa kini sebagai wujud riil dari perkembangan masyarakat dan peradabannya. Sama halnya temuan arkeologis yang terdapat di Kawasan Cendrana, Kabupaten Bone, mencerminkan eksistensi Kerajaan Bone pada masa lalu. Hal tersebut dilihat dari tinggalan-tinggalan arkeologisnya yang sangat kompleks.

Dari hasil observasi yang dilakukan, ditemukan ragam objek peninggalan arkeologi yang terdiri dari situs, struktur serta temuan artefaktual. Selain itu, juga dilakukan penelusuran beberapa tempat yang memiliki konteks historis. Lokasi dari

masing objek terkonsentrasi di tepi selatan aliran Sungai Cenrana dalam wilayah administrasi Desa Nagauleng, Kecamatan Cenrana. Keberadaan objek tersebut menggambarkan sejak dulu kawasan ini telah menjadi ruang aktifitas yang kompleks dari komunitas kelembagaan. Dalam pelestarian warisan budaya, berdasarkan perundangan-undangan objek peninggalan arkeologi yang dimaksud dapat dikategorikan sebagai cagar budaya.

Tinggalan Arkeologis

1. Struktur Gerbang Benteng Cenrana (Timuangnge)

Masyarakat sekitar mengenal lokasi struktur gerbang tersebut dengan Toponim Timuangge. Secara harfiah berarti mulutnya, dikonotasikan tempat atau jalan keluar dan masuk. Struktur gerbang Benteng Cenrana masuk dalam wilayah Desa Nagauleng, Kecamatan Cenrana. Posisi Astronomis pada koordinat $120^{\circ} 18' 48.672''$ BT $4^{\circ} 20' 3.340''$ LS. Akses menuju objek struktur dapat dilalui dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun empat, menempuh beberapa rute dari jalan utama/poros Cenrana yang sudah terkoneksi dengan beberapa jalan tani menuju objek.

Objek struktur Gerbang Timuangnge menempati gundukan bukit yang berada di barat daya pada sebuah areal pertanian dan hutan di tepi selatan Sungai Cenrana. Kondisi lahan sekitarnya dominan dimanfaatkan untuk pertanian sehingga membentuk kawasan dengan vegetasi yang lebat dengan tanaman pepohonan berbatang keras seperti tanaman jati, kelapa, dan jambu mente. Beberapa tanaman jangka menengah dan pendek juga ditemukan, diantaranya cokelat, ubi dan jagung. Batas-batas lahan objek meliputi; sebelah utara dan selatan berbatasan dengan gundukan bukit yang kemungkinan bagian dari sistem benteng berupa dinding alam. Gundukan tersebut dimanfaatkan sebagai kebun. Adapun di sebelah barat berbatasan dengan jalan tani, area

persawahan dan Sungai Palakka. Sebelah timur berbatasan dengan bukit yang di manfaatkan menjadi kebun dan jalan tani serta beberapa lahan yang sudah diratakan akibat pengerukan.



Foto 1. Akses menuju Objek Struktur Gerbang Benteng (Timuangnge).



Foto 2. Kondisi lingkungan objek struktur tampak timur (atas) & tampak barat (bawah).
Dok. BPCB Sulsel, 2019.

Objek struktur terdiri dari dua bagian, masing-masing sisi (utara dan selatan) belahan gundukan/bukit. Terbentuk dari susunan batu karang yang direkatkan menggunakan semen kapur dengan melapisi masing-masing ujung belahan gundukan bukit. Ukuran struktur meliputi tinggi mencapai 4,2 meter dari permukaan jalan di bawahnya, lebar 3,8 meter dan tebal 1,5 s/d 2 meter. Kondisi struktur benteng masih dapat teramati dengan baik dengan bentuk dan ukurannya terlihat monumental, berdiri mengapit sebuah jalan berukuran lebar 3,2 meter menuju ke arah barat. Meskipun demikian kekuatan dan keutuhan struktur relatif terjadi pelemahan dengan adanya runtuh yang cukup signifikan terutama struktur di sebelah utara.



Foto 3. Struktur Gerbang Benteng Cenrana (Timuangge).
Dok. BPCB Sulsel, 2019

Struktur ini adalah monumen sejarah dan menjadi bukti kuat dari jejak kawasan pemukiman tua. Sebagaimana disebutkan dalam sumber-sumber sejarah bahwa wilayah Cenrana pernah menjadi pusat kota perdagangan pada zaman Kerajaan Bone pada masa pemerintahan Raja Bone ke XVI yaitu La Patau Matanna Tikka tepatnya di Desa Nagauleng.

2. Kompleks Makam We' Mappolobombang (Kalokko'e)

Kompleks Makam We Mappolobombang menempati kawasan yang sama dengan struktur gerbang Benteng Timuangge, yaitu pada areal kebun dan hutan di tepi selatan Sungai Cenrana. Akses menuju lokasi dapat mengambil beberapa rute jalan tani dari jalan poros Cenrana. Posisi astronomi objek pada koordinat $120^{\circ} 19' 5.383''$ BT $4^{\circ} 19' 58.213''$ LS - $120^{\circ} 20' 14.884''$ BT $4^{\circ} 19' 49.927''$ LS. lingkungan sekitar maupun lahan kompleks makam dimanfaatkan oleh warga sebagai kebun dengan tanaman jangka panjang

maupun pendek, diantaranya jati, kelapa dan jagung. Selain itu sebagian lahan di sebelah utara juga masih dimanfaatkan sebagai lokasi pemakaman. Adapun batas-batas lahan meliputi, sebelah utara berbatasan dengan kebun, di sebelah timur, dan selatan berbatasan dengan kebun dan jalan tani.

Kondisi objek kompleks makam telah mengalami perubahan dengan adanya pembangunan dua rute jalan. Pertama, jalan yang membujur utara-selatan yang menjadi batas kompleks makam di sebelah timur. Penyelesaian pembangunannya jalan ini dilakukan tahun 2019 dan nampak memanfaatkan lahan kompleks makam sebagai badan jalan. Terindikasi adanya beberapa komponen nisan yang ditemukan tergeletak dijadikan material jalan. Kedua, jalan yang membelah areal makam, jalan tersebut membujur timur barat. Adanya jalan ini secara keruangan membagi konsentrasi makam ke dalam tiga sektor. Sektor satu menempati sebagian lahan di sebelah utara dan barat, ditandai dengan adanya gundukan/benteng pembatas dari batu karang di sisi utara dan timur. Benteng sisi timur tersebut menjadi pembatas dengan keberadaan konsentrasi makam di sektor kedua. Sektor dua sendiri menempati separuh area makam di bagian utara. Arealnya di sebelah selatan bersama area sektor satu, telah terpotong oleh pembangunan jalan dan menjadi pemisah dengan sektor ke tiga. Adapun sektor tiga luasnya lebih dari separuh kompleks makam ini. Menempati lahan dari pertengahan kompleks makam sampai bagian selatan. Selain itu, sektor tiga adalah area yang memiliki kandungan makam yang paling banyak.

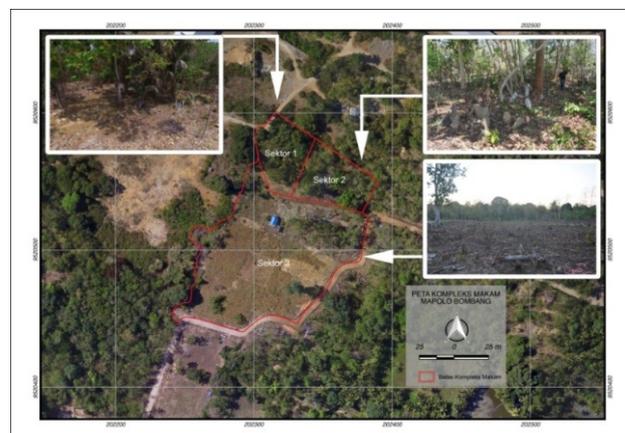


Foto 4. Situs Kompleks Makam We Mappolobombang.
Dok BPCB Sulsel 2019

Jumlah keseluruhan makam yang dapat diidentifikasi dalam kompleks ini mencapai 504 makam. Terdiri dari 24 makam di sektor 1, 44 makam di sektor dua dan 436 di sektor tiga. Tipe makam sendiri terdiri dari tipe makam berjirat, makam dengan jirat dan gunung, makam dengan sepasang nisan maupun dengan satu nisan. Adapun tipe nisan didominasi oleh tipe nisan pipih sebanyak 90 buah, balok 13 buah dan tipe lainnya adalah segi delapan 4 buah dan monolit 2 buah.

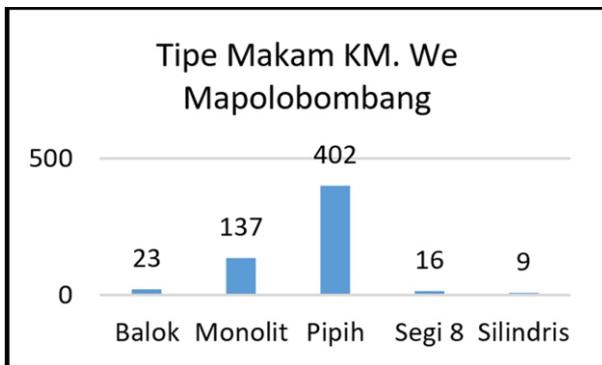
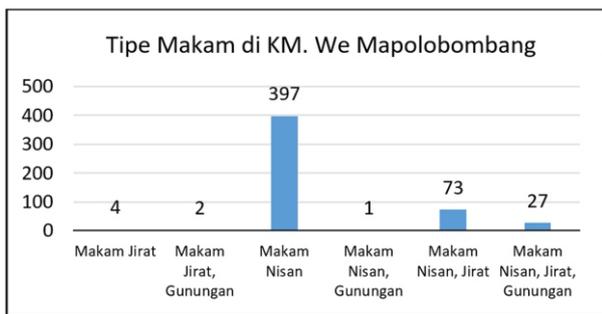


Foto 5. Kondisi lingkungan dan konsentrasi makam sektor 1. Dok BPCB Sulsel 2019



Foto 6. Makam sektor 1. Dok BPCB Sulsel 2019



Foto 7. Konsentrasi makam sektor 1 (atas) dan sektor 2 (bawah). Dok BPCB Sulsel 2019

Salah satu makam yang dikenal oleh warga setempat adalah makam We Mappolobombang. Ibu dari Raja Bone ke XVI, Lapatau Matanna Tikka. Area makam We Mappolo Bombang dibatasi dengan struktur balok batu yang terletak di sektor satu. Makamnya terdiri dari jirat (badan) susunan persegi balok batu. Untuk nisannya menggunakan sepasang nisan pipih. Dari tipe nisan tersebut merupakan nisan aceh tipe K. Berdasarkan hasil kajian oleh beberapa ahli, nisan aceh tipe K tersebar di Sumatera dari abad 16 masehi. Beberapa kompleks makam raja yang di Sulawesi Selatan juga menggunakan nisan dengan tipe tersebut, salah satunya di Kompleks Makam Sultan Hasanuddin di Kabupaten Gowa, Kompleks Makam Lakkoe di Kota Palopo dan Kompleks Makam Manjangloe di Kabupaten Jeneponto.



Foto 8. Makam We Mappolobombang dengan nisan aceh tipe K, tahun 19.. (atas) & tahun 2019 (bawah).
Dok BPCB Sulsel.

3. Kompleks Makam Jaramele'e

Kompleks Makam Jaramele'e menempati lahan di Sebelah Barat dari kantor Camat Cenrana. Tepatnya di tepi Jalan Bone Balla. Titik koordinat pada $120^{\circ} 19' 11.766''$ BT dan $4^{\circ} 19'$

$49.469''$ LS dengan ketinggian 9 mdpl. Masuk dalam wilayah administrasi Desa Nagauleng, Kecamatan Cenrana. Batas-batas lahan kompleks makam meliputi; di sebelah utara berbatasan dengan pemukiman, sebelah timur berbatasan dengan jalan Bone Balla dan kantor Kecamatan Cenrana, sebelah selatan berbatasan dengan kebun dan gudang rumput laut, sebelah barat berbatasan dengan kebun. Hingga saat sekarang, kompleks makam masih digunakan sebagai pemakaman. Pemanfaatan lahan lainnya adalah sebagai kebun dan di sebelah utara juga dimanfaatkan untuk beternak dengan mendirikan kandang peternakan ayam pedaging (potong). Kondisi vegetasi kompleks makam relatif lebat dengan tanaman pohon jangka panjang yang didominasi pohon Jati serta tumbuhan merambat yang menutupi permukaan lahan.



Foto 9 . Situs dan kondisi lingkungan kompleks makam Jaramele'e.
Dok BPCB Sulsel, 2019.

Pada kompleks ini, makam kuno yang identifikasi sebanyak 177 buah, tersebar bercampur dengan makam-makam yang relatif baru. Berdasarkan komponennya tipe makam kuno tersebut didominasi tipe makam nisan, tipe lainnya berupa makam dengan jirat, makam jirat gunung, serta makam jirat gunung dan nisan. Ukuran makam terdiri dari makam terbesar berukuran panjang 260 cm dan lebar 95 cm, dan yang terkecil berukuran Panjang 26 cm dan lebar 9 cm. berikut grafik tipe makam berdasarkan komponennya.

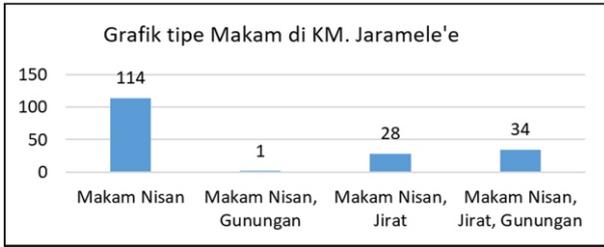


Foto 10. Makam di Situs Kompleks Makam Jaramele'e. Dok BPCB Sulsel, 2019.

Adapun jumlah nisan dari makam kuno yang diidentifikasi sebanyak 183 buah. Dalam satu makam ada yang memiliki sepasang nisan dan hanya memiliki satu nisan. Adapun tipe nisan yang paling banyak ditemukan adalah tipe pipih. Selanjutnya secara berurut juga ditemukan tipe balok (gaduh), monolit, segi 8 dan satu nisan arca manusia. Secara anatomis nisan tersebut terdiri dari kepala, wajah, badan dan tangan dengan posisi duduk. Ukuran dari masing-masing nisan bervariasi. Nisan yang paling tinggi berukuran tinggi 100cm, lebar 30 dan tebal 25 cm. Sedangkan yang paling pendek berukuran tinggi 10 cm dan lebar 70 cm. Umumnya nisan-nisan kuno tersebut menggunakan bahan batu. Berikut grafik jumlah nisan tiap tipe;

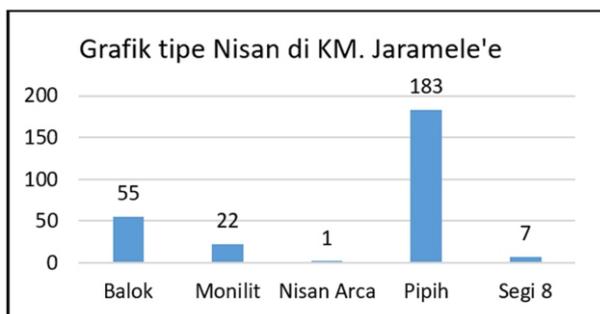


Foto 11. Beberapa tipe nisan di Kompleks Makam Jaramele'e. Dok BPCB Sulsel, 2019.

4. Kompleks Makam Kuno Bukit Timuangnge

Kompleks Makam Kuno Bukit Timuangnge adalah satu kompleks makam kuno yang juga berada di tepi selatan Sungai Cenrana. Kompleks tersebut menempati dataran Bukit Timuangnge di bagian utara, dengan titik koordinat 120° 19' 1.283" BT dan 4° 19' 47.762" LS. Secara administrasi masuk dalam wilayah Desa Nagauleng, Kecamatan Cenrana. Batas-batas lahan kompleks makam meliputi di sebelah utara berbatasan dengan puskesmas Cenrana, di sebelah barat berbatasan dengan parit dalam benteng, sebelah selatan berbatasan lahan kebun di bagian Bukit Timuangge, dimana bukit tersebut ujungnya terbelah dengan adanya parit yang bermuara keluar di Sungai Palakka yang menjadi batas di sebelah selatan.

Kondisi lahan pada kompleks makam Bukit Timuangnge relatif lebat dan teduh dengan adanya tanaman kebun berbatang keras diantaranya kelapa, jambu, dan jati. Kondisi kompleks makam relatif tidak terawat, permukaan lahan tertutup dengan rumput belukar, sehingga komponen makam yang ada sebagian besar tertutup dengan rumput dan memerlukan jarak yang dekat dan pembersihan untuk melakukan observasi dan identifikasi.



Foto 12. Lokasi dan kondisi lingkungan Kompleks Makam Kuno Bukit Timuangnge. Dok BPCB Sulsel, 2019.

Adapun makam yang dapat diidentifikasi sebanyak 39 makam. Tipe makam yang ditemukan terdiri dari makam jirat dengan nisan sebanyak 3 buah dan makam nisan sebanyak 45 buah. Makam-makam yang ada umumnya memiliki sepasang nisan. Jumlah nisan dari makam yang ada sebanyak 68 nisan. Tipe-tipe nisan yang dominan adalah nisan pipih sebanyak 50 buah, tipe lainnya meliputi tipe monolit 16 buah, tipe silindris dan segi delapan masing-masing satu buah. Kerusakan yang ditemukan pada komponen makam yang ada terdiri dari beberapa jenis. Jenis kerusakan yang paling banyak adalah aus khususnya pada bagian nisan yang tercatat sebanyak 40 nisan. Kerusakan lainnya adalah rebah (miring) sebanyak 20 makam. Juga ditemukan 2 nisan makam yang tergelatah, dan satu tertimbun.

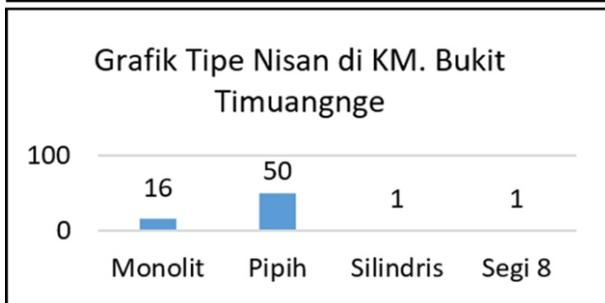
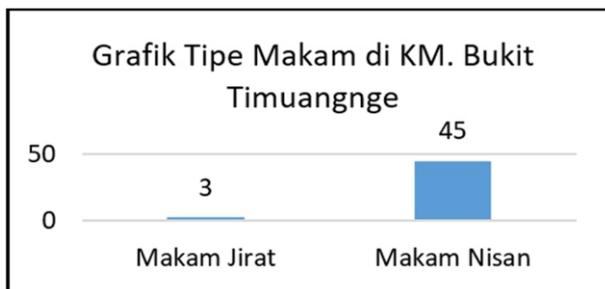


Foto 13. Nisan di Kompleks makam Bukit Timuangnge. Dok. BPCB Sulsel, 2019.

Latar sejarah dari keberadaan makam tua pada kompleks ini sangat minim informasi. Dari hasil wawancara dengan beberapa warga setempat, tidak ada yang mengetahui figur dan asal muasal komunitas masyarakat dari makam makam tersebut. Informasi yang diperoleh hanya sebatas keterangan bahwa makam tersebut merupakan makam tua yang telah ada sebelum warga tersebut lahir. Dari segi tipe makam yang ada pada kompleks makam ini, umumnya memiliki kesamaan dengan beberapa makam khususnya tipe nisan dengan kompleks makam kuno lainnya di Kawasan Benteng Cenrana. Dari segi keletakan juga relatif dekat dengan objek lainnya yaitu parit dan lokasi yang diyakini sebagai istana Balla Bone di sebelah timur, tempat pembakaran kapur (Attunuang Puale), tempat pembuatan mesiu (annampukang ubba) serta struktur gerbang benteng (Timuangnge) di sebelah selatan. dan sekitar 100 meter di sebelah utara Sungai Cenrana.

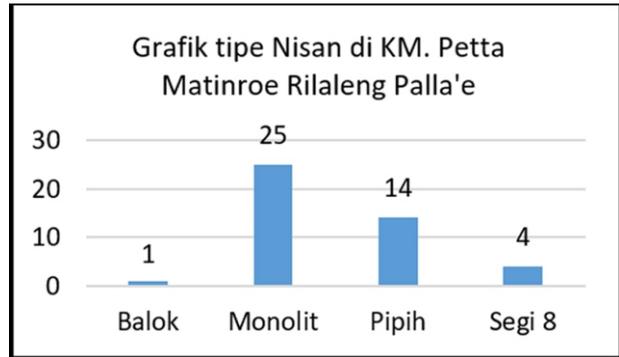
5. Kompleks Makam Petta Matinroe Rilaleng Ripalla'e

Kompleks makam Petta Matinroe Rilaleng Palla'e berada di Kampung Saliwettange, sekitar 150 meter di sebelah barat dari jalan poros Cenrana dan kantor Desa Nagauleng. Secara administrasi masuk dalam wilayah Desa Nagauleng, Kecamatan Cenrana. Terletak pada posisi koordinat 120° 19' 14.365" BT 4° 20' 3.332" LS. Kompleks makam tersebut menempati lahan dataran bukit (gundukan) seluas 361 m2. Batas-batas lahan Kompleks Makam meliputi; sebelah utara berbatasan dengan empang, sebelah timur berbatasan dengan kebun dan empang, sebelah selatan berbatasan dengan rumah dan empang.



Foto 14. Lokasi dan kondisi makam di Kompleks Makam Jaramele'e. Dok BPCB Sulsel, 2019

Dalam kompleks makam terdapat 33 makam yang masih dapat diidentifikasi. Namun hanya empat makam yang struktur dan komponennya masih utuh. Kondisi makam relatif kurang terawat. Beberapa bentuk kerusakan yang teramati diantaranya komponen makam yang terlepas, hilang, patah, dan beberapa nisan dalam posisi miring (rebah). Berdasarkan komponennya, tipe makam yang ditemukan didominasi makam nisan. Tipe lainnya adalah makam jirat dan tipe makan jirat gunung. Ukuran makam yang terbesar mencapai panjang 3 meter dan lebar 1,38 meter. Adapun makam yang paling kecil berukuran panjang 1,3 meter dan lebar 1 meter. Dari makam-makam kuno tersebut seluruhnya menggunakan bahan berupa batu. Berikut grafik jumlah makam pada masing tipe pada kompleks tersebut:



Adapun tipe nisan pada makam di kompleks ini terdiri dari tipe monolit, pipih, segi 8, dan balok (gadah). Diantara nisan yang ada, teridentifikasi dua makam yang masing-masing menggunakan sepasang nisan Aceh tipe H dan tipe K. Othman Mohd. Yatim (1988) dalam buku "Batu Aceh Early Islamic Graves Stones in Peninsular Malaysia", menuliskan tipe nisan demikian tersebar di Sumatera sejak abad 16 (tipe H) dan 17-18 masehi (tipe K). Salah satu makam dengan nisan aceh (H) dikenal oleh masyarakat sebagai Petta Matinroe Rilaleng Ripalla'e. Informasi dari H. M. idrus (72) menuturkan bahwa berdasarkan cerita yang didengar, figur beliau adalah salah satu keluarga dekat dari raja Bone XVI, La Patau Matanna Tikka.



Foto 15. Makam di situs Kompleks Makam Petta Matinroe Rilaleng Palla'e. Dok BPCB Sulsel, 2019

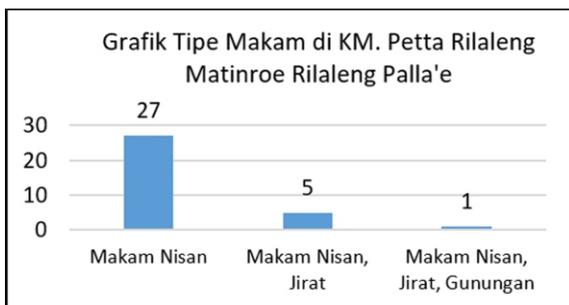


Foto 16. Nisan Aceh tipe H (kanan) & tipe K (kiri) di Kompleks Makam Petta Matinroe Rilaleng Palla'e. Dok BPCB Sulsel, 2019



Foto 17. Tipe nisan di Kompleks Makam Petta Matinroe Rialeng Palla'e. Dok BPCB Sulsel, 2019

6. Kompleks Makam Kajao Bone

Kompleks Makam Kajao Bone menempati sebuah bukit gundukan di tepi barat jalan poros Cenrana. Sekitar 15 meter di sebelah barat (seberang jalan) dari kantor desa Nagauleng. Lokasi kompleks makam juga relatif dekat dari objek kompleks Makam Petta Matinroe Ripalla'e, berjarak sekitar 100 meter. Posisi Astronomis terletak pada titik koordinat $120^{\circ} 19' 15.942''$ BT dan $4^{\circ} 20' 6.558''$ LS. Batas-batas lahan kompleks makam meliputi; sebelah utara berbatasan dengan empang (rawa) dan jalan tani, di sebelah timur berbatasan dengan jalan poros Cenrana, sebelah selatan berbatasan dengan rumah penduduk dan empang, sebelah selatan dan barat berbatasan dengan empang.

Kondisi kompleks makam terlihat tidak terawat dengan lebatnya tumbuhan belukar menutupi permukaan lahan dan dengan adanya beberapa pohon besar yang tumbuh di kompleks makam tersebut. Selain itu, ditemukan tumpukan sampah di sebelah timur sisi kompleks makam karena dijadikan tempat pembuangan sampah oleh warga.



Foto 18. Lokasi dan kondisi lingkungan Kompleks Makam Kajao Bone. Dok BPCB Sulsel, 2009

Kondisi makam yang ditemukan sebagian besar telah mengalami kerusakan. Kebanyakan makam yang ada telah terbongkar. Komponen makam yang masih dapat dikenali adalah bagian nisan yang juga mengalami kerusakan yang cukup masif. Nisan-nisan tersebut ada yang ditemukan tergetak, patah, aus, dan rebah. Dari identifikasi yang dilakukan ditemukan sebanyak 20 makam pada kompleks ini dengan ragam tipe. Berdasarkan komponennya, tipe makam tersebut terdiri dari makam nisan sebanyak 17 buah, makam dengan jirat sebanyak 2 buah, serta satu buah tipe makam dengan jirat gunung. Untuk komponen nisan ditemukan sebanyak 25 nisan. Sebagian besar makam yang ditemukan hanya memiliki satu buah nisan. Tipe nisan pada kompleks ini meliputi tipe pipih sebanyak 16 buah, tipe monolit 8 buah, serta 1 nisan tipe balok. nisan yang paling besar berukuran tinggi 115cm, lebar 45 cm dan tebal 16cm. Sedangkan makam yang paling kecil berukuran, tinggi 8 cm, lebar 27 cm dan tebal 11 cm.

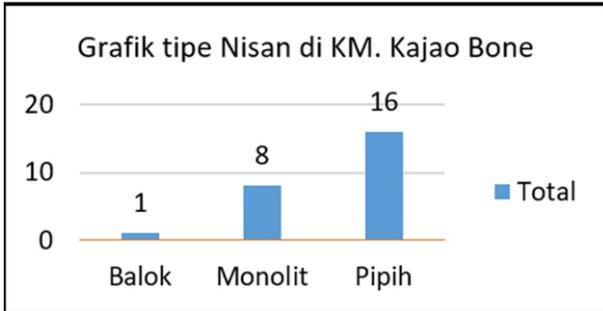


Foto 20. Nisan di di Kompleks Makam Kajao Bone. Dok BPCB Sulsel, 2009

Data maupun informasi terkait latar sejarah yang diperoleh pada kompleks makam ini sangat minim. Hanya berupa keterangan bahwa salah satu tokoh yang dimakamkan bergelar Kajao Bone yang merupakan cendikiawan kerajaan.



Foto 19. Tipe makam dengan sepasang nisan di Kompleks Makam Kajao Bone. Dok BPCB Sulsel, 2009

7. Kompleks Makam La Patau Matanna Tikka (Nagauleng)

Keberadaan Kompleks Makam Nagauleng cukup dikenal luas oleh warga setempat dengan nama makam La Patau Matanna Tikka. Posisinya berada di tepi Jl. Poros Cenrana yang merupakan akses utama menuju beberapa desa/kelurahan di Kecamatan Cenrana. Secara administrasi masuk dalam wilayah Desa Nagauleng, Kecamatan Cenrana. Secara Astronomis berada pada koordinat 120° 19' 14.353" BT dan 4° 20' 13.986" LS, dengan ketinggian 1 mdpl. Kompleks Makam Nagauleng merupakan lahan pemakaman kuno dengan luas 1.218 m2. Lahan kompleks makam telah dilengkapi dengan pagar pembatas dengan pintu utama berada di sebelah barat makam. Adapun Batas lahan meliputi; sebelah utara berbatasan dengan rumah penduduk, sebelah selatan berbatasan dengan masjid dan madrasah, sebelah barat dan timur berbatasan dengan jalan poros cenrana dan sawah/tambak (empang). Kompleks Makam Kuno Nagauleng cukup menonjol dengan adanya bangunan pelindung

makam yang berukuran relatif besar, meliputi Panjang 29,70 meter dan lebar 14,85 meter. Selain itu, terdapat unit bangunan di bagian utara yang didirikan belakangan untuk menyimpan benda ritual. Di sebelah selatan bangunan makam terdapat sumur yang merupakan salah satu dari tujuh sumur tua (Baba Pitu'e) yang bagian dari peninggalan Kawasan Pemungkiman Tua Benteng Cenrana.

nisannya. Adapun variasi ukuran makam terdiri dari, makam paling besar berukuran panjang 3,50 m, lebar 1,50 m, tinggi 0,70 m. Makam sedang berukuran panjang 2,25 m, lebar 1,20 m, tinggi 0,70 m. Makam berukuran kecil dengan panjang 1,50 m, lebar 0,80 m, tinggi 0,50 m. Berikut grafik tipe makam dan nisan pada Kompleks Makam Nagauleng (Lapatau Matanna Tikka).



Foto 21. Kompleks Makam La Patau Matanna Tikka (Nagauleng) tampak depan (barat) & halaman kompleks bagian selatan (kiri).
Dok. BPCB Sulsel 2019

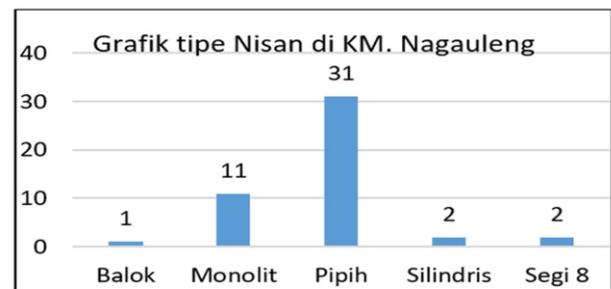
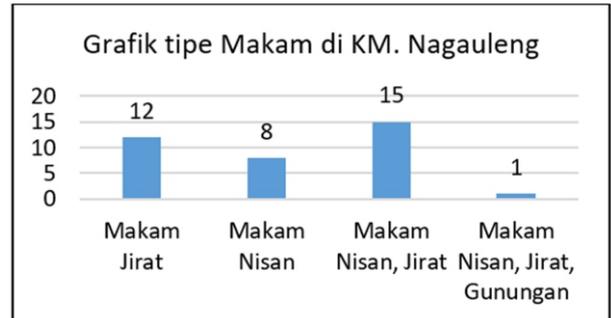


Foto 22. Konsentrasi makam dalam bangunan.
Dok BPCB Sulsel, 2019

Sebanyak 36 makam yang dapat identifikasi pada kompleks makam ini. Sebanyak 21 makam dalam bangunan dan sebanyak 15 makam lainnya terkonsentrasi di sebelah timur bangunan. Adapun tipe makam yang ditemukan terdiri dari makam jirat, makam jirat dengan gunungan, makam jirat dengan nisan, dan makam nisan. Makam-makam tersebut memiliki tipe nisan di dominasi tipe Pipih, tipe lainnya adalah Monolit, silindris, Balok dan dan segi 8. Adapun ragam hiasan umumnya berupa hiasan floral dan geometris serta inskripsi yang terletak baik pada bagian jirat maupun komponen



Foto 23. Konsentrasi makam bagian timur bangunan.
Dok. BPCB Sulsel

Salah satu tokoh yang dimakamkan pada kompleks makam ini adalah La Patau Matanna Tikka Raja Bone ke XVI. Beliau merupakan Raja Bone yang memiliki pertalian pernikahan dengan beberapa kerajaan-kerajaan berpengaruh lainnya di Sulawesi Selatan dan kelak hasil dari pernikahan tersebut menjadi raja di berbagai kerajaan di Sulawesi Selatan. Hingga

saat ini figur raja La Patau Matanna Tikka dikenal dalam ingatan kolektif masyarakat setempat. Makam La Patau Matanna Tikka berada dalam bangunan bersama dengan beberapa tokoh lainnya diantaranya: Makam istri pertama La Patau Matanna Tikka. Makam istri kedua La Patau Matanna Tikka. Makam istri ketiga La Patau Matanna Tikka. Makam istri keempat La Patau Matanna Tikka. Makam istri kelima La Patau Matanna Tikka. Makam Buto. Makam Mattejo (Ulama Fikih). Makam Petta janggoe (pemimpin pasukan). Makam Pettarala (Passeppi). Makam Petta Macalla (Paccilo-Cilo).



Foto 24. Makam Raja-raja Bone ke XVI, La Patau Matanna Tikka. Dok BPCB Sulsel, 2019

Riwayat pelestarian yang telah dilakukan balai pelestarian cagar budaya (BPCB) Sulawesi Selatan pada kompleks makam ini, diantaranya pemetaan kompleks makam tahun 1990, ekskavasi penyelamatan pada tahun 1993, pemugaran bangunan kompleks makam pada tahun 1998, survei pada tahun 2010 dan menempatkan tenaga juru pelestari hingga saat ini.

8. Lokasi Bekas Istana Balla Bone

Lokasi yang diduga menjadi bekas Istana Balla Bone berada dalam wilayah area kebun dan hutan di tepi selatan Sungai Cenrana, Desa Nagauleng. Menempati lahan berupa dataran yang sebagian masih berbukit dan sebagian telah dikeruk dan diratakan menjadi bagian dari halaman gudang rumput laut. Posisi koordinat pada titik 120° 19' 6.235" BT dan 4° 19' 51.917" LS, dengan ketinggian 7 mdpl. Akses menuju objek relatif muda, karena berada tepi jalan tani yang menghubungkan lokasi pasar dan gudang. Adapun batas lahan meliputi, sebelah utara berbatasan dengan lubang yang diduga parit tua

serta lahan kebun, sebelah timur berbatasan dengan lahan dengan level yang lebih rendah karena dulunya menjadi lokasi galian tambang tipe C untuk kebutuhan material timbunan. sebelah selatan berbatasan dengan halaman gudang rumput laut, sebelah barat berbatasan dengan jalan tani dan pasar.



Foto 25. Lokasi Lokasi Bekas Istana Balla Bone

Hasil penelitian menyebutkan bahwa sekitar lokasi ini terdapat banyak fragmen gerabah dan keramik asing, mengindikasikan jejak pemukiman dan aktivitas manusia di lahan ini. Dari Hasil observasi yang dilakukan diperoleh beberapa temuan permukaan berupa fragmen keramik (porselin) dan tembikar yang tersingkap di dinding level pengerukan tanah pada lokasi tersebut. Adapun data temuan fragmentaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Tabel: data temuan permukaan yang diduga sebagai Lokasi Istana Balla Bone

No	Temuan	Ukuran (cm)			Bagian	warna	Tipe Wadah
		Panjang	Lebar	Tebal			
1	Tembikar	4,3	4,3	0,9	Tepian	Coklat	Tegak
2	Tembikar	4,4	2,3	1,9	Tepian	Merah	Tertutup
3	Tembikar	4,2	2,3	1,5	Tepian	Merah	Tertutup
4	Tembikar	4,2	3,2	2,3	Tepian	Merah	Tertutup
5	Tembikar	4,3	3,3	1,2	Tepian	Merah	Tertutup
6	Tembikar	3,4	2,2	2,7	Cupingan	Merah	UI
7	Porselen	3,1	3,1	0,2	Tepian	Putih	Terbuka
8	Porselen	3,1	2,8	0,7	Kaki	Putih	Terbuka
9	Porselen	6	4	1,1	Bada	Putih	Terbuka
10	Porselen	5,9	5,7	2	Kaki	Putih	Terbuka
11	Tembikar	8,3	4,4	2,2	Tepian	Merah	Tertutup



Foto 26. Temuan framen gerabah dan keramik poselin. Dok. BPCB Sulsel 2019

9. Parit Dalam Benteng

Lokasi parit terletak tidak jauh diantara lokasi Kompleks Makam Tua Bukit Timuangge dengan lokasi peleburan mesiu yang berada pada dataran Bukit Timuangge, serta berada dekat di sebelah barat Bangunan pasar Cenrana. Parit tersebut relatif dapat dikenali dengan elevasi yang lebih rendah dengan memanjang lurus secara terpola memperlihatkan bentuk badan lintangannya selebar ± 3 meter. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan, bentuk parit yang masih dapat di indentifikasi berbentuk dasar L. Melintang arah utara-selatan sepanjang ± 150 meter, tepat mengikuti punggung (gundukan) sisi timur Bukit Timuangge, kemudian berbelok dengan memotong Bukit Timuangge ke arah (barat) Sungai Palakka sepanjang ± 70 meter.



Foto 27. Tampak atas lokasi parit (kiri) dan badan parit utara-selatan pada kawasan benteng cenrana

10. Attunuang Puwale'e (Tungku Pembakaran Kapur)

Attunuang Puwale'e adalah salah satu diantara beberapa objek yang berada pada bagian Bukit Timuangge, tepi selatan aliran Sungai Cenrana. Posisi koordinat pada titik $120^{\circ} 18' 58.176''$ BT $4^{\circ} 19' 50.290''$ LS dan $120^{\circ} 18' 57.845''$ BT $4^{\circ} 19' 50.556''$ LS. Lokasi dari tungku ini merupakan lahan kebun yang relatif teduh dengan adanya tanaman berbatang keras, diantaranya pohon kelapa, jambu, jati, cokelat. Batas-batas lahan terdiri dari sebelah utara dan timur merupakan dataran bagian puncak dan punggung bukit yang dimanfaatkan sebagai kebun, sebelah selatan juga berupa dataran pada bagian puncak serta lereng punggung bukit, namun lahan badan bukit tersebut telah terbelah dengan adanya galian saluran pipa

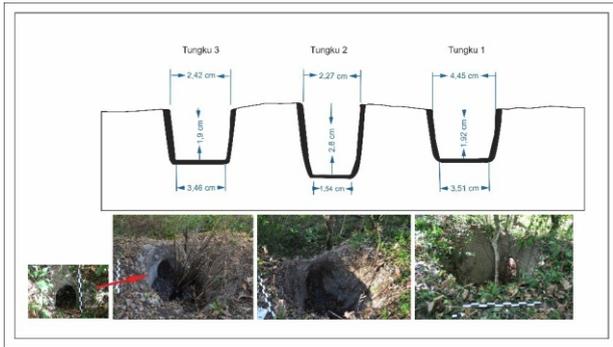
pembuangan limbah gudang/pabrik yang memanjang dari timur ke barat arah Sungai Palakka yang merupakan batas lahan objek di sebelah selatan.



Foto 28. Kondisi lingkungan objek Attunuang Puale'e.
Dok. BPCB Sulsel 2019

Warga setempat menyebut lokasi dan objek ini dengan nama Attunuang Puwale'e yang berarti tempat pembakaran kapur. Beberapa penelitian yang telah dilakukan juga memasukkan objek ini sebagai peninggalan arkeologis yang merupakan komponen dari Pemukiman Tua Kawasan Benteng Cenrana. Bapak Idrus Hasaeni (72) menuturkan bahwa, tungku ini pernah digunakan kembali oleh Komando Operasi Rehabilitasi Daerah (KOPREDA) untuk kebutuhan pembangunan dan perbaikan fasilitas bangunan setelah setelah penumpasan DI/TII.

Pada lahan ini ditemukan sebanyak tiga tungku pembakaran, posisinya berjejer timur ke barat mengikuti arah bukit benteng. Objek tersebut berupa fitur lubang melingkar, pada bagian atasnya dibuat terbuka sehingga menyerupai sumur, dibentuk dengan menggali punggung bukit di sisi barat yang merupakan lapisan batuan. Masing-masing tungku memiliki lubang pada dinding sisi luar (barat) bagian bawah, berfungsi untuk mengatur pengapian dan tempat untuk mengeluarkan kapur hasil pembakaran. Bagian dinding tiap tungku yang merupakan lapisan bantuan yang terlapis dengan kapur di buat rata dan datar yang terlihat dengan adanya alur pemangkasan.



Gambar 1 dan Foto 29. Tungku pembakaran kapur (Attunuang Puwale'e). Dok. BPCB Sulsel, 2019.

11. Sumur Tua (Baba Pitu'e)

Pada Kawasan Benteng Cenrana terdapat peninggalan tujuh buah sumur tua yang dikenal dengan nama Baba Pitu'e. Hingga saat ini keberadaan sumur-sumur tersebut masih dapat ditemukan. Lima diantaranya masih digunakan sebagai sumber air, mesin pompa dan pipa ditemukan terpasang dengan masif untuk mengalirkan air sumur tersebut langsung ke rumah warga. Pada masa pemerintahan kerajaan, masing-masing sumur memiliki fungsi yang berbeda. Diantaranya sebagai tempat berwudhu, sebagai tempat mencuci pakaian dan peralatan makan, tempat mencuci beras, tempat minum kuda, sebagai sumber air bersih dan sebagai tempat mencuci kaki. Sumur tersebut tersebar pada beberapa lokasi dalam wilayah Desa Nagauleng, Kecamatan Cenrana. Adapun uraian dari ke tujuh sumur tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Tabel uraian data pada tiap sumur

NO	OBJEK	KOORDINAT	Diameter (M)	LINGKUNGAN	KONDISI
1	Sumur 1: Appinungeng Anyarag	120° 19' 13.900" BT 4° 20' 22.800" LS	2,95	Tepi jalan poros Cenrana dan pemukiman	Masih dimanfaatkan sebagai sumber air, memiliki dinding tembok halaman dan tembok pelindung bibir sumur,
2	Sumur 2: Halaman Km. Lapatau Matanna Tikka	120° 19' 14.338" BT 4° 20' 14.336" LS	3,40	Dalam halaman kompleks makam Lapatau Matanna Tikka	Masih dimanfaatkan sebagai sumber air, memiliki dinding tembok halaman dan tembok pelindung bibir sumur
3	Sumur 3: Bungung TengngaE	120° 19' 15.419" BT 4° 20' 10.658" LS	3,04	Kawasan pemukiman terletak diantara rumah penduduk	Masih dimanfaatkan sebagai sumber air, memiliki diting tembok halaman dan tembok bibir sumur
4	Sumur 4: Passojong	120° 19' 18.700" BT 4° 20' 0.900" LS	2,75	Tepi jalan poros Cenrana dan pemukiman	Masih dimanfaatkan sebagai sumber air, terdapat menara penampungan, dan tembok pelindung bibir sumur
5	Sumur 5: Abbasang Perre	120° 19' 10.164" BT 4° 19' 53.209" LS	4,85	kawasan pertanian dan gudang rumput laut	Masih dimanfaatkan sebagai sumber air, terdapat menara penampungan dan tembok pelindung bibir sumur
6	Sumur 6	120° 19' 9.260" BT 4° 19' 53.512" LS	2,05	Kawasan pertanian dan gudang rumput laut.	Tidak difungsikan lagi, memiliki tembok pelindung bibir sumur
7	Sumur 7 Pinceng PuteE	120° 18' 59.318" BT 4° 20' 6.364" LS	1,8	Tepi jalan tani, kebun dan dekat kawasan stuktur gerbang Timuange	Sudah tidak dimanfaatkan, bagian bibir sumur (atas) rata dengan permukaan tanah,



Foto 30. Sumur tua (Baba Pitu'e) di Kawasan Benteng Cenrana. Dok. BPCB Sulsel, 2019

12. Lokasi Masjid Tua Cenrana

Lokasi Masjid Tua Cenrana berada di kampung Cenrana, Dusun Nagauleng. Berada pada koordinat 120° 19' 6.800" BT 4° 19' 44.900" LS. Batas lahan bagian utara berada tepat di tepi aliran Sungai Cenrana dan di sebelah selatan berbatasan langsung dengan tepi jalan poros Cenrana. Sebelah timur dan barat berbatasan dengan rumah penduduk dan jalan yang terhubung ke Sungai Cenrana.

Dari Informasi wawancara dan beberapa hasil penelitian pada kawasan ini menyebutkan bahwa pada halaman masjid yang ada saat ini merupakan pula lokasi masjid pertama yang di bangun di wilayah Cenrana. Namun tidak ditemukan lagi bangunan awal dari masjid tersebut. Kecuali informasi warga tentang keberadaan stuktur di bagian utara, dekat tepi sungai yang informasikan sebagai stuktur tempat berwudhu dari bangunan masjid sebelumnya. Adapun masjid yang ada saat ini merupakan bangunan yang relatif baru. Dengan penambahan bangunan sekolah yang didirikan di dalam halaman masjid bagian selatan. Sedangkan halaman bagian barat merupakan pemakaman.



Foto 31. Masjid di Cenrana yang sejak awal pembangunan masjid Kawasan ini ditempatkan dalam lokasi tersebut. Dok. BPCB Sulsel.2019

13. Lokasi Peleburan Mesiu (Annampukeng Ubba)

Lokasi peleburan mesiu menempati lahan kebun di dataran bukit Benteng Timuangnge. Berada dekat, diantara lokasi objek Attunuang Puwale'e dan Kompleks Makam Bukit Timuangnge. Posisi astronomis pada koordinat 120° 18' 59.670" BT 4° 19' 49.381" LS. Warga setempat mengenal objek ini dengan nama Annampukeng Ubba. Objek berupa lubang selebar 1,5 meter, terdapat lempengan papan batu pada bagian barat lubang dalam posisi rebah cenderung (ke timur) mengatapi lubang. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa lokasi ini merupakan lokasi peleburan mesiu dimana lempengan batu besar tersebut berfungsi menahan suhu panas yang dihasilkan.



Foto 32. Tempat peleburan Mesiu. Dok, BPCB Sulsel, 2019

14. Lokasi Permainan Marraga

Lokasi permainan Marraga menempati lahan yang berada dekat di bagian selatan pintu gerbang Timungange. Posisi koordinat pada titik 120° 18' 48.700" BT 4° 20' 3.900" LS. Area permainan menggunakan lahan berukuran ±30 meter. Kondisi lahan cukup lebat dengan pepohonan dan tertutupi semak belukar. Marraga atau Mandaga berasal dari Bahasa Bugis yang dalam Bahasa Melayu dikenal dengan sepak raga. Marraga merupakan salah satu permainan tradisional di Sulawesi Selatan.

15. Lokasi Permainan Mallogo

Lokasi permainan Mallogo berbatasan langsung pada bagian timur dengan lokasi permainan Marraga. Posisi koordinat pada titik 120° 18' 49.764" BT 4° 20' 3.893" LS. Area permainan menggunakan lahan berukuran lebar 5 meter dan panjangnya 50 meter dengan kondisi tanah yang tidak datar dan lapang.

Penamaan mallogo bersumber dari peralatan yang digunakan yaitu Logo. terbuat dari tempurung kelapa yang berkualitas baik. Berbentuk segitiga yang sisi ujungnya di tumpulkan menyerupai cangkul. Mencerminkan nilai budaya bugis yang berdasar pada kehidupan agraris. Permainan ini biasanya dilakukan sesudah panen dan juga pada waktu senggang.

Cenrana secara administratif merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bone dan menjadi sebuah kawasan yang menyimpan potensi kesejarahan terkait dengan sejarah Kerajaan Bone pada kurun waktu abad 17 – 19 Masehi, berdasarkan 2 naskah lontara yaitu : Lontara Sakke atturioloang ri Bone (edisi tahun 2018) dan Lontara Bilang Arumpone la Tenritappu Ahmad Al-Saleh (1775-1812) (kode ADD) 12345, Koleksi British Library), serta arsip Belanda termasuk peta lama yang dibuat oleh Belanda.

Dari naskah lontarak atturioloang Sakke tersebut memuat beberapa informasi mengenai Cenrana, yaitu :

1. Merupakan tempat perancangan Perjanjian Tellum Pocco diantara tiga kerajaan yaitu Kerajaan Bone, Kerajaan Wajo dan Kerajaan Soppeng, sementara Timurung kemudian menjadi tempat berikrar Mallamumpatu.
2. Bahwa di Cenrana terdapat sebuah Balairung atau “ Baraka Tellu Cappo “ , yang dijadikan tempat Ke 3 Raja dari Kerajaan tersebut berkomitmen dan bersepakat mengikat janji untuk saling membantu dan bahu membahu apabila mendapatkan serangan dari kerajaan lain.
3. Keberadaan makam We Tenriwale I Da Ugi Mappolo Bombang di Cenrana (Ibunda La Patau Matannatikka), We Tenriwale adalah saudara kandung dari Petta To Risompae alias Arung Palakka.
4. Arung Palakka menyerahkan tahta Kerajaan Bone kepada La Patau Matannatikka WalinonoE To Tenri Bali Malae Sanra di Baruga Tellu Coppo melalui upacara besar di Baruga Tellu Coppo'na di Cenrana.

5. Istana / Baruga di Cenrana merupakan tempat pertemuan para bangsawan dan tempat pesta sabung ayam yang kerap dihadiri oleh para raja Tellumpocoe.

Sementara itu dari naskah Lontarak Bilang Arumpone La Tenritappu Ahmad Al-salah didapatkan informasi/ data terkait dengan Cenrana yaitu :

1. Toponimi Cenrana merupakan suatu wilayah yang sangat luas mencakup toponimi - toponimi kecil seperti Nagauleng, Ajaappasareng, Gellengge, Pajalele, Watu, Awang Cenrana, Salo Benteng. Kebesaran Cenrana dikisahkan kurang lebih sama dengan Awang Pone yang secara geografis keduanya bertetangga di Kawasan utara Watangpone.
2. Terdapat sebuah Istana di Cenrana yang memiliki kesan menarik bagi La Tenri Teppu bahkan dalam lontarak disebutkan bahwa Raja la Tenri Teppu berkali-kali mengunjungi Cenrana untuk bersantai.
3. Terdapat istana Nagauleng dan Baruka Tellum Cappo
4. Terdapat sebuah Benteng di Pallime berdasarkan toponimi terletak dimuara sungai Cenrana, selain itu terdapat pasar (pasar Malam).
5. Awassalo, di lokasi ini disebut dalam lontarak sebagai tempat Raja Bone melakukan acara perburuan rusa, biasanya dilakukan bersama dengan rekan-rekannya seperti Datu Soppeng. Lokasi lainnya tempat perburuan rusa Raja Bone disekitar Cenrana adalah Pajalele.
6. Makam La Patau Nagauleng
7. Pasar Cenrana. Catatan harian raja Bone mengisahkan keberadaan pasar di Cenrana. Pasar tersebut dikelola oleh Pegawai Kerajaan yang diangkat oleh Raja Bone bahkan nama-nama pegawai pasar disebutkan antara lain La Bora, La Sida, Matowa Timurung dll. Kedudukan pasar ini diprediksi berada di sebelah timur makam We mappolo Bombang.
8. Sungai Cenrana. Sungai ini merupakan jalur utama transportasi sosial, ekonomi dan hubungan regional antar wilayah kawasan Teluk Bone hingga kedaerah-daerah pedalaman Sulawesi Selatan seperti Bone, Wajo , Soppeng, Belawa dan Sidenreng.
9. Cukai Sungai Cenrana. Catatan harian La tenri Tappu menyebutkan perolehan sungai Cenrana setiap bulan selalu aktif diterima melalui petugas yang dipasang sebagai pengelolanya. (Kajian Zonasi Benteng Cenrana Kab Bone).

Informasi lain terkait keberadaan Cenrana yang telah berlangsung sejak abad ke-16 didapatkan pada peta lama yang dibuat oleh Belanda dan didapatkan pada arsip Belanda. Dari kedua sumber data tersebut mengindikasikan bahwa kawasan Cenrana sejak abad ke-16 menjadi kawasan pemukiman yang sudah sangat ramai dan lokasi yang strategis dan sangat penting, oleh kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan utamanya Kerajaan Bone bahkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Beberapa bangunan dan fasilitas dibuat untuk melengkapi sebagai kawasan pemukiman dan pertahanan seperti benteng, istana, pasar, pemakaman raja dan lain-lainnya. Namun berdasarkan hasil pendataan cagar budaya yang telah dilakukan di kawasan Cenrana, saat ini bangunan yang tersisa hanyalah Kompleks Makam Mappolo Bombang, Pintu Benteng Timuangnge, bekas pembakaran kapur, sumur tua serta beberapa makam kuno lainnya.

Kesimpulan

Berdasarkan referensi serta data setiap obyek yang didapatkan dilapangan selama berlangsungnya kegiatan pendataan cagar budaya di Kawasan Cenrana Kabupaten Bone maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Cenrana sabagai Toponimi merupakan kawasan yang memiliki potensi kesejarahan dan kepurbakalaan yang besar dibuktikan dengan ditemukannya sebaran obyek yang merupakan tinggalan arkeologis seperti makam-makam kuno 4 obyek, pintu gerbang benteng 1 buah, pembakaran kapur 3 buah dan sumur tua 7 buah dimana 6 sumur masih dimanfaatkan oleh masyarakat Cenrana hingga saat ini.

2. Secara umum berdasarkan penilaian secara arkeologis dan historis tinggalan budaya yang masih ada dengan melihat bentuk atau tipe bangunan, ciri arsitektural, bahan, dan teknologi, dari obyek/tinggalan budaya tersebut, maka dapat di kategorikan sebagai cagar budaya.
3. Komponen makam berupa jirat /gunungan dan nisan terbuat dari batu padas dengan model nisan tipe Aceh, balok dan pipih dengan hiasan floraistis (sulur-suluran), geomorfis (pilin, spiral, belah ketupat,dan tumpal) serta sebuah nisan tipe arca (antropomorfis)
4. Temuan pecahan/fragmen gerabah beberapa keping dilokasi bekas istana / Baruga Tellu Coppo terdiri dari tepian dan dasar/pantat gerabah.
5. Kondisi dari Kompleks makam yang ada selain Kompleks Makam Nagauleng dalam keadaan tidak terawat, beberapa makam mengalami kerusakan dan kehancuran baik pada bagian jirat maupun nisan serta ditumbuhi banyak semak-semak dan menjadi lahan penanaman jagung oleh masyarakat, demikian pula halnya dengan pemabakaran kapur dan gerbang benteng.
6. Tidak terpelihara/terawatnya obyek yang ada karena kepedulian pemerintah dan masyarakat setempat yang masih kurang terhadap obyek yang baru diduga cagar budaya tersebut, terlihat dengan dibuatnya jalanan didalam areal Kompleks Makam Mappolo Bombang serta menjadi areal tambang pasir.

Rekomendasi

Mengacu pada kesimpulan di atas maka berikut beberapa rekomendasi terkait hal-hal yang dianggap perlu untuk dilakukan, antara lain:

1. Mengingat nilai penting dari tinggalan arkeologis yang ada di kawasan Cenrana maka perlu dilakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Bone untuk segera memasukkan tinggalan budaya tersebut dalam daftar inventarisasi cagar budaya dan selanjutnya ditetapkan sebagai situs, bangunan maupun struktur cagar budaya.
2. Agar potensi kerusakan dan kehancuran dapat

diminimalisir perlu adanya penempatan juru pelihara untuk merawat / memelihara obyek yang ada / tinggalan utamanya di Kompleks Makam Mappolo Bombang dan Gerbang Benteng Cenrana, demikian pula penting untuk segera dibuatkan papan bicara dalam bentuk papan informasi dan papan lokasi pada obyek yang ada dilokasi tersebut.

3. Penanganan pelestarian dalam bentuk kegiatan pemagaran lokasi perlu segera dilakukan khususnya pada Kompleks Makam Mappolo Bombang mengingat kondisinya yang sangat memprihatinkan, selain itu diperlukan pula rekonstruksi pada Kompleks Makam Mappolo Bombang karena kegiatan rekonstruksi ini merupakan serangkaian kegiatan pelestarian Cagar Budaya dengan tujuan untuk mengembalikan keaslian bentuk bangunan/ struktur Cagar Budaya, yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya secara teknis, administratif maupun akademik.
4. Pentingnya upaya pendekatan kepada masyarakat / warga setempat utamanya yang selama ini menggarap lahan pemakaman untuk mengajak berperan serta dalam upaya menjaga kelestarian tinggalan budaya yang masih tersisa tersebut serta tidak melakukan kegiatan yang dapat mengancam kelestariannya.
5. Sosialisasi kepada pemerintah dan stakeholder, komunitas serta masyarakat sekitar terkait nilai penting situs, bangunan dan struktur cagar budaya di Kawasan Cenrana perlu lebih diintensifkan. Agar upaya pelestarian bisa lebih efektif dan mendapat sambutan yang positif dari semua kalangan yang terkait.
6. Kepada generasi muda khususnya para pelajar dan mahasiswa sangat penting pula dilakukan sosialisasi untuk membangun rasa memiliki yang pada akhirnya bermuara pada semangat untuk peningkatan ke-ilmuan dan membangun jati diri dan identitas diri sebagai bangsa yang berbudaya yang berbeda dengan bangsa Lainnya.

Demikian saran / rekomendasi terkait tinggalan budaya yang diduga sebagai cagar budaya di Kawasan Cenrana ini dibuat untuk dapat dijadikan sebagai acuan /dasar dan pertimbangan untuk langkah-langkah pelestarian di masa yang akan datang.



“TAMAN ARKEOLOGI LEANG-LEANG MAROS” RENCANA KONSEPTUAL & IMPLEMENTASI

Laode M. Aksa

I. Pendahuluan

Beberapa tahun terakhir situs arkeologi Leang-leang semakin menjadi tujuan wisata utama di Kabupaten Maros, ini mendasari tidak hanya tantangan untuk melestarikan warisan budayanya dan alam di Leang-leang, tetapi juga menawarkan peluang besar untuk mempromosikan penelitian dan penyelidikan akademis, menunjukkan pembangunan berkelanjutan dan inisiasi pembangunan berwawasan lingkungan dan pariwisata berbasis alam. Penulisan ini didasarkan pada studi pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya yang ada di Leang-leang. Bagian kajian diandalkan untuk meninjau berbagai studi dan laporan yang menyoroti situs-situs arkeologi dan sumber daya alam di daerah tersebut. Dua bidang misi dilakukan dengan tujuan untuk mendokumentasikan berbagai informasi dari survei lapangan dan wawancara tokoh masyarakat/komunitas serta pengunjung.

Sebagai hasil dari meningkatnya perhatian terhadap konsep pelestarian dan pengelolaan warisan budaya beberapa rencana aksi nasional dan strategi telah dilakukan untuk membahas konsep pelestarian cagar budaya di tingkat nasional. Di antaranya adalah: Rencana Strategi Pelestarian Cagar Budaya Nasional, Undang-undang 11/2010 tentang cagar budaya satu dekade ini diberlakukan

setelah proses perubahan terhadap UU N0.5/1992 tentang benda cagar budaya. Selain itu, ada sejumlah peraturan lain yang diperbarui yang mempromosikan pelestarian cagar budaya dan penilaian arti penting dan penetapan menjadi utama.

Fokus penulisan ini pada pengelolaan situs arkeologi dan khususnya, manajemen taman arkeologi dengan persyaratan pengunjung. Penulis tertarik pada manajemen sumber daya (situs arkeologi) dan manajemen organisasi (operasional). Kerangka kerja konseptual yang sangat lintas disiplin disajikan untuk kedua tinjauan penulisan ini. Itu didasarkan pada disiplin ilmiah yang relatif muda, yang disebut manajemen warisan budaya. Hal tersebut memungkinkan untuk melakukan identifikasi karakteristik situs dan lingkungan alamnya yang dapat dirumuskan menjadi kebijakan manajemen, sehingga memberikan solusi untuk dinamika variabel kondisi dan nilai situs. Sementara itu di bidang lain untuk kerangka kerja organisasi, jenisnya dapat bervariasi, kriteria untuk klasifikasi, dapat diterapkan dalam konteks yang lebih luas juga. Perencanaan pengelolaan situs muncul sebagai elemen penting tidak hanya untuk pelestarian warisan budaya ini, tetapi juga untuk mengatasi masalah-masalah seperti perlindungan dan perawatan, perusakan dan pencurian, pariwisata dan pembangunan berkelanjutan.

Artikel ini juga mencoba untuk membahas tantangan yang dihadapi oleh situs arkeologi di Leang-leang untuk membuat perencanaan manajemen yang mungkin menghasilkan strategi pelestarian yang efektif, konsep nilai-nilai warisan dan metodologi untuk pelestarian dan pengelolaan situs arkeologi. Selanjutnya dalam artikel ini juga menampilkan studi kasus di mana rencana pengelolaan situs arkeologi di kawasan Leang-leang yang telah dikembangkan dan diimplementasikan, atau di mana pengelolaan pemanfaatannya sedang dibahas. Artikel ini dapat dimanfaatkan bagi para mahasiswa arkeologi, arkeolog, pengelola situs dan semua pihak yang bertanggung jawab atas pelestarian cagar budaya dan pengelolaan warisan arkeologi. Beberapa pemahaman dengan berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pengelolaan situs arkeologi, tetapi tidak secara eksklusif. Kami akan melihat konteks pelestarian, masalah perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, pemahaman mendalam tentang berbagai aspek pengelolaan situs arkeologi (memproses untuk menyusun rencana pengelolaan) dan tentang dilema mengelola sumber daya arkeologis, pendekatan pemangku kepentingan (pendekatan holistik), pendekatan berkelanjutan terhadap pengunjung dan manajemen pariwisata, aspek etis dan sosial dari arkeologi.



Pengunjung Taman Arkeologi Leang-Leang

Dalam diskusi dan kerja inovatif yang terjadi di Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan, yaitu kami memulai debat tentang desain perencanaan dan konsep serta apa yang harus dimasukkan dalam komponen taman arkeologi sebagai model pelestarian dan pengelolaan. Kami menyatukan pandangan dan membahas pertanyaan

terkait seputar prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kinerja pelestarian dari proses inventarisasi, survei, penggalian, dokumentasi, kajian, pemeliharaan/perawatan, konservasi, rekonstruksi, informasi, presentasi, akses publik, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya, dan kualifikasi personalia terutama pada prasyarat interdisipliner yang terlibat dalam kegiatan pelestarian dan pengelolaan serta penerapan keterampilan manajemen seperti, perencanaan, pengorganisasian, kerja tim dan kerja sama, pengarahan, pengendalian, dan evaluasi yang mencerminkan aspek kontemporer. Konsep perencanaan menjadi kunci untuk kajian manajemen pelestarian warisan budaya dan implementasinya selama beberapa dekade. Penekanan umumnya pada aspek warisan situs arkeologis dan situs sejarah serta alam dalam arti luas.

Situs arkeologi di Leang-leang telah dilakukan advokasi pelestarian situs cagar budaya melalui perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan yang seimbang dan persyaratan dari berbagai pihak yang terkait. Dan juga, tahun 2019, tim BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA dan dari berbagai stakeholder seperti utusan pemerintahan kabupaten, akademisi, dan Taman Nasional Babul telah melakukan kajian pengembangan perencanaan untuk pengembangan manajemen situs, ini terdiri dari proses perencanaan yang dilakukan menjadi pertimbangan banyak faktor yang berkaitan dengan pelestarian dan pengelolaan situs arkeologi di Leang-leang, yaitu sumber daya budaya yang tersedia, hukum lokal dan nasional, dan nilai-nilai yang diterima oleh berbagai kelompok yang tertarik. Berbagai informasi, ide, dan sudut pandang interdisipliner perlindungan dan pemeliharaan situs arkeologi telah dikemas oleh tim pengkaji untuk membahas isu-isu yang terlibat dalam manajemen, mendukung, dan presentasi situs dan untuk mendorong kerjasama di antara berbagai kelompok.

Poin pokok dan kesimpulan dari diskusi kelompok dikumpulkan menjadi sebuah dokumen yang disajikan sebagai "Kesimpulan Peserta Forum Group Discussion (FGD)," meminta pemerintah dan masyarakat untuk perlunya melestarikan nilai-nilai situs arkeologi di Leang-

leang. Masyarakat sekitar situs belum mengenali arti penting cagar budaya, partisipasi, keberlanjutan dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan tujuan pelestarian cagar budaya antara lain seperti arti penting sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan dan nilai ekonomi. Kekuatan rasa memiliki masyarakat terhadap situs cagar budaya harus dikembangkan dan menekankan arti penting cagar budaya untuk kebutuhan pelestarian dan pengelolaan warisan budaya, terutama ketika terancam oleh pariwisata massal. Para peserta meminta perhatian khusus pada peran penting manajemen harus bermain dalam arti penting nilai-nilai yang membutuhkan pelestarian, pengelolaan dan mereka menyerukan partisipasi luas kelompok-kelompok kepentingan dalam perumusan rencana manajemen.

Resolusi berikutnya adalah taman arkeologi, menjadi pilihan untuk sebuah rencana strategis, menggabungkan metode dan konsep yang tepat. Tulisan ini secara singkat akan menguraikan beberapa metode utama taman arkeologis yang sesuai dengan skema Undang-undang No. 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

II. Penalaran Taman Arkeologi

Pendekatan fungsional terhadap taman arkeologi yang dirumuskan dari berbagai sumber:

- Sebagai definisi dasar, taman arkeologi adalah sebuah situs arkeologi yang telah dilestarikan dan dibuka untuk publik.
- Taman Arkeologi adalah instrumen atau alat yang berfokus pada situs dan sumber dayanya untuk menyusun metodologi pendokumentasian, pelestarian dan pengelolaan situs dan sumber dayanya, dalam norma-norma manajemen warisan budaya yang ditetapkan dan norma-norma pengelolaan taman.
- Tujuan utama taman arkeologi adalah untuk mengembangkan prosedur analitis untuk memberi jawaban atas karakterisasi taman arkeologi sebagai produk wisata budaya.
- Taman Arkeologi adalah kesesuaian mekanisme pengendalian pemanfaatan situs arkeologi dan ruangnya dengan fenomena dan permasalahan yang dihadapi dalam proses perubahan

pengembangan dan pemanfaatan ruang kawasan dan situs.

- Apakah situs arkeologi lebih dikunjungi ketika dinilai sebagai taman arkeologi? Yang menonjol ketika menjadi taman arkeologi adalah formula penyajian informasi, artefak dan situs arkeologi kepada publik.
- Konseptualisasi taman arkeologi sebagai tipologi produk budaya dan wisata dan merefleksikan dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap penggunaan dan pengelolaan warisan arkeologi.
- Taman arkeologi akan mendorong pembentukan dan penguatan badan pengelola taman arkeologi berbasis masyarakat, dan juga dapat digunakan sebagai pembentukan dan penguatan wadah bagi pengelolaan pariwisata pedesaan berbasis masyarakat.
- Dalam taman arkeologi fasilitas ditingkatkan untuk memenuhi ekspektasi peningkatan pengunjung.
- Taman Arkeologi sebagai rencana manajemen yang diperbarui model pengaturan yang lebih jelas untuk tata kelola Taman Arkeologi Leang-leang, terutama dalam kaitannya dengan mempertahankan komunitas masyarakat sekitar.
- Taman Arkeologi menjadikan kualitas warisan budaya dan alam dimana situs arkeologi itu berada secara intrinsik terkait dan tidak terpisahkan. Dengan tegas taman arkeologi mempertahankan kompleks interaksi antara nilai-nilai alam dan budayanya.
- Taman arkeologi sebagai sebuah konsep adalah sebuah ide, proses dan metode untuk perlindungan dan pengelolaan beberapa kategori bangunan, situs dan kawasan cagar budaya dalam konteks perlindungan, pengembangan dan pemanfaatannya.
- Taman arkeologi diharuskan sebagai entitas budaya yang pengelolaannya memerlukan interfacing dengan semua sektor.
- Beberapa aplikasi taman arkeologi sebagai strategi untuk perlindungan dan pengelolaan berbagai situs warisan arkeologi yang kompleks.
- Taman arkeologi mengintegrasikan pelestarian, interpretasi, dan rekreasi.

- Administrator taman arkeologi mempunyai kesamaan dengan prosedur standar teori museum yang berhubungan dengan perawatan dan organisasi koleksi, metode teknis pameran yang tepat, masalah dengan keamanan, dan pengembangan program pendidikan. Namun, masing-masing taman arkeologi adalah entitas yang unik.
- Taman arkeologi adalah taman. Ini adalah situs arkeologi. Itu adalah museum. Sebuah taman arkeologis adalah semua ini, artinya taman arkeologi bisa terdiri dari situs arkeologi dan museum.
- Seorang manajer taman arkeologi harus terbiasa dengan prinsip dan teori arkeologi dan museologi, serta beberapa filosofi pariwisata.

Menurut Paulette M. McManus dalam artikel *Archaeological parks: what are they?* singkatnya taman arkeologi adalah:

- ekspresi nilai budaya nirlaba dengan fokus pada pengunjung yang mencakup komunikasi dengan standar museologis tinggi;
- berpusat pada situs arkeologi dalam area lanskap budaya yang cukup besar yang dapat dikategorikan untuk tujuan interpretatif;
- area besar dengan batas yang berbeda yang dikelola oleh taman dan memiliki titik masuk tunggal yang dikontrol untuk pengunjung;
- Nyaman untuk dikunjungi, dengan tempat parkir, jalan-jalan lanskap, kafe dan toilet
- Fokus yang dipasarkan dengan baik untuk pariwisata;
- Cenderung menempatkan konservasi daripada pelayanan publik pada inti dari tujuannya.

Jadi yang paling penting untuk menjadikan Taman Arkeologi Leang-leang adalah katalisator untuk pengembangan situs arkeologi oleh komunitas masyarakat pelestari cagar budaya, pemerintah dan pemerintah daerah, kalangan akademik yang mengikuti fokus grup diskusi kajian pengembangan Kawasan Cagar Budaya Leang-leang mengusulkan bahwa Situs Arkeologi Leang-leang cukup penting secara ilmu pengetahuan untuk dilestarikan demi generasi penerus. Alasan ini

menjadikan elemen terpenting dalam melestarikan masa lalu untuk masa depan. Satu cara untuk mencapai ini adalah melalui pelestarian (perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan) situs arkeologi.

Praktek taman arkeologi di beberapa negara yang telah lama berlangsung menunjukkan berbagai kekuatan dan kelemahan, secara luas terikat pada berbagai bentuk manajemen, status hukum taman arkeologi, metode penyajian masa lalu dan juga sejauh mana kegiatan. Penulis telah mempelajari organisasi-organisasi taman arkeologi seperti status hukum, sumber daya manusia, bentuk-bentuk presentasi arkeologis, manajemen pengunjung, jenis dan tingkat kegiatan. Selain itu, juga mempelajari hubungan antara pendapatan dan pengeluaran terkait dengan operasional. Atas dasar perbandingan antara praktik-praktik ini serta memperhitungkan kemungkinan dampak negatif dari pariwisata atau bentuk penggunaan ekonomi lainnya, penulis menyarankan jenis dan tingkat operasi tertentu, yang dapat dimasukkan dan diimplementasikan oleh organisasi yang mengelola taman arkeologi. Selain itu, artikel ini mencoba membuat beberapa saran tentang pendirian dan pengembangan organisasi, struktur SDM dan bentuk organisasi yang paling sesuai untuk pelaksanaan operasi taman arkeologi.

Gerakan pelestarian di internasional telah mendorong pelestarian dan pengembangan kawasan dan bangunan bersejarah dan situs arkeologi untuk dapat dimanfaatkan oleh publik dan pengembangan bahan interpretatif untuk pariwisata dan pendidikan publik. Ini adalah faktor penting lainnya yang mempengaruhi kelahiran Taman Arkeologi Leang-leang. Dalam hal ini, arkeolog-arkeolog profesional secara internasional dan lokal telah melihat taman arkeologi sebagai jawaban yang tepat untuk masalah pelestarian dan pengelolaan Situs Arkeologi Leang-leang.

Dari pemahaman di atas maka taman arkeologi dapat menjadi pilihan dari salah satu model presentasi, pelestarian dan pengelolaan dari situs arkeologi. Istilah taman arkeologi tidak dijumpai dalam dokumen ataupun naskah UU RI No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Sebaliknya, istilah tersebut secara masif muncul dalam literatur

ilmiah internasional dan atas dasar pengelolaan situs sumberdaya arkeologi, yang disajikan bersama alam dan lanskap yang pernah di implementasikan pada Taman Arkeologi Borobudur, Taman Prasejarah Leang-leang, dan Taman Prasejarah Sumpangbita. Istilah Taman Arkeologi Borobudur dan Taman Prasejarah Leang-leang dan Sumpangbita di Indonesia tidak berkelanjutan, karena tidak mempunyai dokumen perencanaan sampai model pengelolaannya. Tidak seperti kita dapat jumpai dokumen Archaeological Park yang ada di wilayah Eropa (Italia, Jerman, Austria, Kroasia, Hongaria dan Slovenia), di Amerika Serikat, Australia serta di China, India maupun Filipina.

III. Potensi dan Lingkup Nilai Arkeologis

a. Sumber daya Arkeologi Leang-leang

Sumber daya Arkeologi periode Mesolitik memiliki posisi luar biasa dalam warisan budaya arkeologis di Gugusan Karst Maros – Pangkep sangat kaya akan situs arkeologi. Masa Mesolitik kawasan Karst Maros – Pangkep dan sebagian kecil situs sudah diteliti secara mendalam.



Lukisan Prasejarah di Petta Kere, Leang-Leang

Naturalis bersaudara berkembangansaan Swiss, Fritz dan Paul Sarasin, kembali dari ekspedisi ilmiah ke Indonesia antara tahun 1905 hingga 1906 dengan kisah-kisah gua-gua prasejarah, artefak dan lukisan gua, tetapi sedikit spesifik. Arkeolog Belanda H. R. Van Heereken pertama kali menggambarkan lukisan gua di sekitar Maros pada tahun 1950, dan meskipun para peneliti Indonesia telah melakukan pekerjaan yang signifikan di Leang-leang Maros.

Sekitar tahun 1950an dari penelitian Palm itu, lukisan prasejarah di gua-gua lain di Maros satu per satu terungkap, baik oleh Palm maupun peneliti lain, antara lain H.R Van Heekeren dan C.H.J Franssen. Lukisan ditemukan di Leang Burung, Leang Jarie, Leang Lambattorang, dan Leang Petta Kere. Leang adalah bahasa lokal yang berarti gua. Gua-gua tersebut lokasinya berdekatan. Bahkan, Leang Petta Kere hanya terpaut jarak sekitar 50 meter dari Leang Pettae. Lokasi kedua gua itu kini menjadi Taman Prasejarah Leang-leang yang dikelola Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan. Semua gua-gua tersebut di atas masuk dalam wilayah Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung (TN Babul).

Salah satunya sub-kawasan Leang-leang memiliki perbukitan karst yang memiliki puluhan gua sebagai situs arkeologi yang sudah tercatat dalam database Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan. Saat ini, jumlah gua yang ada di Kabupaten Maros sekitar 97 buah. Sekitar 63 diantaranya masuk dalam kawasan Taman Nasional dan mungkin akan bertambah lagi sampai seratusan gua serta sejumlah lukisan dan berdasarkan hasil penelitian bahwa peninggalan manusia prasejarah yang menghuni gua tersebut kurang lebih 40.000 tahun yang lalu.

Usia lukisan itu baru diketahui setelah hasil penelitian tahun 2011-2013 lalu, atas kerjasama Pusat Arkeologi Nasional, Balai Arkeologi Makassar, Balai Pelestarian Peninggalan Prasejarah (BP3) Makassar, University of Wollongong, dan Griffith University. Penelitian yang mengungkap usia gambar cadas gua di Maros merupakan temuan yang sangat penting karena menguak misteri kehidupan manusia prasejarah di Indonesia periode 40.000-an tahun lalu. Fakta baru ini berdampak penting karena mengubah pemahaman kita tentang perjalanan spesies manusia modern (*Homo sapiens*) di muka Bumi. Usia 39.900 tahun itu menempatkan lukisan gua Maros satu periode zaman dengan lukisan di gua El Castillo, Spanyol.

Salah seorang peneliti Australia dari University of Wollongong, Adam Brumm, mengatakan pihaknya telah tiga tahun (2011-2013) melakukan penelitian. Namun apa yang didapatnya itu sangat menggemparkan dunia. Dia menjelaskan, dalam menentukan usia sebuah lukisan itu akan diketahui peneliti setelah mengambil sampel dari lukisan itu. Maka keberadaan lukisan itu membuktikan

peradaban Indonesia selevel dengan peradaban Eropa di masa lalu.

Leang Timpuseng menunjukkan kemampuan itu juga yang dimiliki manusia di belahan dunia lain pada masa bersamaan, bahkan bisa jadi lebih awal. Untuk kategori cap tangan, lukisan di Leang Timpuseng menjadi yang tertua di dunia. Sebelumnya, cap tangan tertua juga dipegang oleh lukisan di El Castillo yang berusia 37.300 tahun.

Hanya beberapa sentimeter dari stensil tangan Leang Timpuseng terdapat pula sebuah lukisan yang telah memudar. Para peneliti memastikan wujud lukisan itu adalah babirusa betina. Hasil penanggalan uranium-series menunjukkan usianya 35.400 tahun.

Di Leang Barugayya 2, tak jauh dari Timpuseng, sebuah lukisan hewan yang diperkirakan babi, memiliki usia minimum 35.700 tahun. Hal itu menjadikan lukisan hewan dari gua prasejarah Maros sebagai salah satu lukisan dekoratif tertua di dunia.

Penelitian mengambil 19 sampel coralloid dari 14 lukisan di 9 gua di wilayah Kecamatan Bantimurung dan Kecamatan Simbang. Selain Timpuseng dan Barugayya 2, sampel juga berasal dari Leang Barugayya 1, Leang Jarie, Leang Jing, Leang Bulu Bettue, Leang Lompoa, Leang Burung 2, dan Leang Sampeang.

Usia lukisan hewan tertua itu terungkap bersamaan dengan terungkapnya lukisan cap tangan yang juga tertua di dunia. Lukisan cap tangan ini bersebelahan dengan lukisan hewan tertua yang bersebelahan dengan Leang Timpuseng. Lukisan hewan tertua itu berwujud babirusa betina. Lukisan berwarna kemerahan, sangat detail dan naturalis. Kaki, ekor, kepala, hingga rambut babirusa terlihat jelas. Sehingga identifikasi jenis hewan bisa dilakukan dengan mudah.

Leang-leang pun semakin mendunia setelah keberhasilan sejumlah peneliti mengungkap jika lukisan tertua di dunia ada di Leang-leang. Dimana selama ini hanya berada di Eropa. Namun hal itu terbantahkan dengan penelitian yang dilakukan tim arkeolog Indonesia dan Australia yang berhasil mengungkap lukisan hewan yang diduga tertua di dunia, berusia 40.000 tahun. Secara keseluruhan, penelitian atas usia lukisan-lukisan itu berkisar dari paling muda 17.400 tahun hingga tertua 39.900

tahun. Mayoritas lukisan usianya lebih dari 25.000 tahun.

b. Membangun Nilai Arkeologi

Secara langsung ditekankan bahwa pengelolaan secara berkelanjutan atas situs-situs warisan budaya harus dimulai dengan pemahaman akan arti pentingnya situs arkeologi. Sebagai salah satu jenis kunci dari yang membentuk signifikansi adalah nilai (value) yang dapat memberikan informasi yang sangat berguna tentang apa yang tercakup di dalamnya dalam konteks makna dan identitas pada lokasi tersebut dan juga merupakan bagian integral dari produksi 'sense of place'

Apa yang kita pikirkan setiap kali datang ke situs arkeologi? Saya yakin Arkeologi sering mendeskripsikan gambar-gambar dari sesuatu yang sangat eksotis untuk kita. Memang, ketika kita menonton televisi di History Channel, kita cenderung melihat tempat-tempat terkenal seperti piramida Mesir, makam Cina, atau lanskap arkeologi bersama gambar cadas di Spanyol, Portugal, Perancis dan Australia. Tempat itu sangat berharga dan para pengunjung memperlakukannya dengan hormat. Namun, mungkin tempat dan pemandangan seperti itu begitu menyenangkan sehingga memperlihatkan sesuatu yang jauh lebih penting. Faktanya: tempat-tempat tersebut berasal dari masa lalu dan setiap masa lalu adalah penting.

Jika kita memahami apa tujuan arkeologi? Kita akan memahami bagaimana dan mengapa perilaku manusia tidak tetap sama. Dengan kata lain, tujuan arkeologi adalah untuk menjawab pertanyaan mengapa perilaku manusia berubah seiring waktu. Para arkeolog meneliti perubahan kecil dan besar dalam sejarah peradaban dan peristiwa budaya yang signifikan seperti mengeksplorasi gua karst sebagai tempat tinggal, awal bercocok tanam dan pengembangan lahan pertanian, sejarah peradaban kota, dan runtuhnya peradaban, dan lain-lain. Arkeolog melakukan kajian ini karena mereka ingin tahu mengapa peristiwa ini terjadi. Dari pelajaran masa lalu, dengan kenyataan seperti ini seorang arkeolog dapat memprediksi bagaimana budaya mengalami perubahan dan bagaimana merencanakan masa depan yang lebih baik. inilah nilai pertama arkeologi.

Kesan pembelajaran tersebut di atas, peninggalan arkeologi di situs-situs gua karst Sub-kawasan Leang-leang memberi gambaran kepada kita kisah nyata tentang masa berburu dan mengumpulkan makanan atau dari zaman Mesolitik sebagai warisan budaya. Tanpa arkeologi, orang-orang prasejarah tidak akan dikenal di zaman sekarang ini. Selain itu, peninggalan arkeologi dapat menggambarkan kehidupan dan aktivitasnya walaupun pada masa itu masyarakatnya belum dapat berbicara atau berkata dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Sumber daya arkeologi Leang-leang merupakan warisan budaya dari masa lalu, dan bagaimana kita menggunakannya untuk generasi masa depan, adalah menjadi peran penting bagi para arkeolog. Memahami perubahan perilaku manusia dari masa lalu membantu kita untuk mengetahui lebih banyak tentang masa lalu. Bahkan membantu kita dalam perencanaan bagaimana sumber daya arkeologi di situs Leang-leang dapat dimanfaatkan untuk generasi yang akan datang.

Situs arkeologi Leang-leang adalah tempat dengan jejak aktivitas dan terkonsentrasi banyak artefak produk budaya. Penelitian dengan ekskavasi atau penggalian situs, mirip dengan penelitian di laboratorium, arkeologi adalah mengumpulkan data, merekam, dan menganalisis. Menggali dan menganalisis membantu para arkeolog untuk mencari dan memahami lebih banyak tentang perubahan perilaku manusia.

Pendekatan nilai arkeologi dalam pelestarian dan pengelolaan warisan budaya, mencakup pentingnya lingkungan arkeologi bagi komunitas kontemporer, termasuk rasa identitas, kepemilikan dan tempat bukti peradaban, serta membangkitkan kembali nilai-nilai kearifan lokal sebagai bentuk ingatan.

c. Signifikansi Arkeologi

Tujuan utama dari penilaian signifikansi arkeologis adalah untuk mengidentifikasi apakah sumber daya arkeologi, deposit, situs atau fitur bernilai warisan budaya. Penilaian akan menghasilkan pernyataan singkat tentang signifikansi warisan budaya yang merangkum nilai-nilai tempat, lokasi, sumber daya, deposit atau fitur.

Model evaluasi untuk memahami 'apa'

untuk dilestarikan dan 'mengapa' untuk pembangunan berkelanjutan, bahkan sebelum mempertimbangkan 'bagaimana' melakukannya, memungkinkan pembacaan yang lebih jelas dan interpretasi yang lebih mudah dari hubungan kompleks yang ada antara pra-keberadaan arkeologis, lingkungan alam dan sistem antropik yang ditambahkan. Model evaluasi yang ditawarkan dapat memandu operator manajerial menuju perencanaan perlindungan yang dilakukan secara sadar dengan nilai arkeologis, mempromosikan identifikasi morfologis, tipologis dan desain teknis lingkungan yang paling cocok untuk mengembalikan signifikansi potensial dari aset arkeologis.

Kriteria yang mendasari penilaian signifikan situs arkeologi Leang-leang adalah pola tinggal menetap di dalam gua, menggambarkan sejarah budaya atau alam, memiliki hubungan yang kuat atau khusus dengan kehidupan kelompok sosial dan alam, gambar prasejarah menunjukkan karakteristik estetika dan / atau pencapaian kreatif dan kepercayaan, memiliki potensi untuk menghasilkan informasi yang akan berkontribusi pemahaman tentang sejarah budaya atau alam, langka warisan sejarah budaya atau alam, dan menunjukkan karakteristik utama situs cagar budaya atau lingkungan budaya atau alam. Semua item kriteria akan dijustifikasi dan diberi status sistem penilaian tabulasi untuk elemen yang memenuhi kriteria di atas.

Beberapa pertanyaan substantif lainnya yang berkaitan dengan situs arkeologi di Leang-leang, yang dapat berkontribusi menambah pengetahuan tentang masa lalu. Penekanan dalam penilaian signifikansi adalah meningkatkan informasi yang diketahui atau informasi yang lebih mudah tersedia dari sumber lain. Keutuhan informasi mengacu pada kondisi fisik situs dan alam kawasan Leang-leang. Ini sangat relevan untuk situs arkeologi dalam arti situs belum terganggu atau area yang mungkin diharapkan menghasilkan endapan arkeologis yang mengandung ilmu pengetahuan, dapat diterima interpretasi dan presentasi. Situs arkeologi Leang-leang sangat perlu mempertahankan integritas yang memadai sehingga mampu menyampaikan signifikansinya kepada orang-orang di masa sekarang. Ini bisa berasal dari faktor-faktor yang tidak terkait dengan 'penelitian potensi' seperti lokasi, pengaturan, desain pengembangan dan pemanfaatan.

Warisan arkeologis di Leang-leang dapat menjadi sumber daya yang bisa digunakan untuk menambah ilmu dan pemahaman tentang masa lalu. Oleh karena itu, warisan arkeologis menunjukkan kepentingan budaya dan ilmu pengetahuan. Semua bukti produk budaya masyarakat masa lalu berkontribusi untuk mengembangkan pemahaman kita tentang bagaimana masyarakat seperti itu melalui ilmu arkeologi.

Arkeologi berupaya menjelaskan tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat di masa lalu berdasarkan bukti-bukti peninggalan arkeologis yang tersedia dan menganalisisnya dapat berupa keunikan situs, bersifat monumental atau artefak, yang termasuk kategori yang hanya jarang terjadi, mungkin sangat penting tetapi signifikansi arkeologis atau artefak belum tentu tergantung pada keunikan atau kelangkaan. Analisis pola kejadian dan variasi jenis situs, bangunan, struktur dan artefak yang terjadi adalah elemen utama arkeologi.

Penilaian nilai-nilai (Valuation of values) yang dikaitkan dengan warisan budaya dan alam di Leang-leang adalah kegiatan yang sangat penting dalam upaya pelestarian dan pengelolaan konsep taman arkeologi, karena nilai signifikansi sangat membentuk keputusan yang diambil. Namun, meskipun nilainya dipahami secara luas sebagai hal penting untuk memahami dan merencanakan pelestarian pengelolaan warisan budaya. Pemeriksaan berbagai bukti arkeologis sangat diperlukan agar memiliki harapan bahwa konsep tersebut dikembangkan adalah valid dan bertujuan untuk mengeksplorasi penilaian nilai sebagai aspek tertentu dan secara pragmatis nilai warisan budaya dapat ditentukan konteks perencanaan dan pengambilan keputusan.

Untuk situs dan lingkungan alam Leang-leang arti penting arkeologis sangat kuat dan fitur permukaan alam dengan estetika fenomena alam sangat unik, indah dan menarik. Signifikansi dengan demikian merupakan ekspresi dari nilai budaya dan alam yang diberikan situs arkeologi Leang-leang.

Sebagai alternatif dari pendekatan ini, artikel ini menganjurkan proses yang sistematis dan

transparan untuk menganalisis dan menilai semua nilai warisan budaya dan alam kawasan Leang-leang. Faktanya, bahwa nilai-nilai ini sangat dibentuk oleh faktor-faktor kontekstual seperti kekuatan sosial, peluang ekonomi, tren budaya, estetika, dan banyak lagi. Sehingga model untuk pelestarian dan pengelolaan warisan budaya berbasis nilai mencakup langkah di mana pentingnya situs dan alam Leang-leang. Oleh karena itu signifikansi menjadi penting sebagai nilai aset warisan budaya dan untuk kepentingan pelestarian yang berkelanjutan hingga generasi mendatang.

IV. Proses Keterlibatan dan Desain Pengelolaan Taman Arkeologi

Untuk memperkuat desain perencanaan implementasi taman arkeologi penulis menerapkan beberapa hipotesis alternatif yaitu:

Hipotesis 1 : operasional taman arkeologi adalah organisasi nirlaba yang membentuk entitas nirlaba yang diatur oleh aturan tentang pelestarian cagar budaya dan pedoman taman arkeologi untuk melakukan aktivitas tambahan untuk mendapatkan laba.

Penjelasannya: operasionalnya tidak sepenuhnya komersial dan tujuan utamanya adalah bukan untuk menghasilkan keuntungan. Bahwa untuk operasional taman arkeologi, organisasi nirlaba perlu didirikan. Organisasi nirlaba juga menawarkan kemungkinan pendanaan sebagian atau penuh dari sumber daya publik atau pemerintah, karena pelestarian, penyajian, dan aksesibilitas warisan budaya umumnya untuk kepentingan publik. Organisasi nirlaba harus diatur sesuai dengan tujuan penerapan taman arkeologi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hipotesis 2 : Analisis spasial dari Situs Arkeologi Leang-leang memiliki lahan dan karakteristik alam yang dapat mengembangkan pengoperasian taman arkeologi sebagai berikut: lahan seluas 4 Ha lebih, situs arkeologi terpelihara baik, dan spasial yang tersedia dapat dibangun infrastruktur yang diperlukan.

Penjelasan : Pembentukan organisasi sebagai Taman Arkeologi Leang-leang dioperasionalkan dengan multidisiplin tergantung pada tuntutan

tertentu. Ukuran dan sifat sumber warisan budaya adalah dasar untuk transformasi situs menjadi objek wisata. Juga penting adalah kemungkinan spasial di sekitarnya untuk pembangunan infrastruktur yang diperlukan (Pusat informasi gambar prasejarah sebagai presentatif dan interpretatif audiovisual, peraturan taman situs warisan budaya, rekonstruksi lingkungan, ruang kelas juga sebagai ruang meeting kapasitas 35 orang, storage, rumah tamu, mess, ruang parkir, fasilitas toilet, tempat pertunjukan, restoran dan kios). Menurut pendapat penulis, infrastruktur tambahan akan membuka jalan untuk pencapaian tujuan tertentu dari organisasi, misalnya peningkatan jumlah pengunjung, perpanjangan waktu yang dihabiskan pengunjung di area cagar budaya, dan sebagian pendapatan.

Hipotesis 3 : Organisasi yang berfungsi sebagai taman arkeologi membutuhkan dukungan keuangan dari sumber daya publik dalam tahap pengembangan dan dalam sepuluh tahun pertama operasi untuk bertahan di pasar, karena pendapatan yang dihasilkannya sendiri tidak mencakup biaya investasi atau biaya saat ini.

Penjelasan : Tiga fase perlu dibedakan ketika berbicara tentang pengorganisasian taman arkeologi:

- fase desain,
- fase konstruksi dan
- fase pemeliharaan.

Ketika membahas pengoperasian taman arkeologi, tiga fase perlu dibedakan: fase desain, fase konstruksi, dan fase pemeliharaan. Fase terakhir juga berarti pendirian organisasi yang mengelola taman dan aktivitasnya. Selama semua fase, tim profesional dari berbagai bidang harus dimasukkan dalam pengambilan keputusan (Andreja Breznik. 2006). Terlepas dari kenyataan bahwa penelitian ini berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi dan situs arkeologi, aspek penting lain dari masalah pengelolaan situs arkeologi patut ditekankan: selain sumber warisan yang tepat, semua infrastruktur yang diperlukan harus disediakan untuk semua jenis kegiatan.

Hipotesis 4 : Taman arkeologi berfungsi dengan sukses jika organisasi dipimpin oleh seorang direktur dan dibantu oleh manajer bisnis dan manajer pelestarian

Penjelasan : Asumsinya bahwa keberhasilan suatu organisasi tergantung pada operasi keuangan yang efisien dan menuntut manajer bisnis dengan pengetahuan dan keterampilan manajerial yang luas. Konten program yang berkualitas tinggi dan profesional juga harus disediakan dan untuk ini kita memerlukan manajer pelestarian yang memiliki pendidikan di bidang arkeologi.

a. Pendekatan Taman Arkeologi sebagai Organisasi dan Operasional

Penulis memulai artikel ini dengan mengeksplorasi konsep-konsep dan teori di balik model perencanaan manajemen berbasis nilai (value), dan memberikan beberapa pemikiran tentang bagaimana menghadapi secara efektif hubungan antara model perencanaan dan praktek manajemen sehari-hari. Artikel ini mencoba mengkaji beberapa masalah, kekhawatiran, dan peluang dalam pengelolaan warisan budaya di situs arkeologi Leang-leang, dengan tujuan memberikan kontribusi bagi kelangsungan hidup, rekreasi, dan pengembangan berkelanjutan dari situs arkeologi dan lanskap alamnya.



Lanskap Taman Arkeologi Leang

Pembentukan taman arkeologi (PTA) sebagai organisasi adalah pendekatan ilmu interdisipliner dan terutama perilaku yang menarik dari bidang-bidang seperti perilaku organisasi, manajemen, bisnis, psikologi, sosiologi, antropologi, ekonomi, pendidikan, konseling, dan administrasi publik. Tujuan utama, meskipun tidak eksklusif, PTA adalah untuk meningkatkan efektivitas organisasi.

Dalam perdebatan cagar budaya diberbagai pertemuan tentang pelestarian warisan budaya secara umum dan warisan arkeologi pada khususnya, karena sifatnya yang berlipat dua (material dan immaterial). Mengusulkan evaluasi pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya dan pariwisata, untuk memahami 'apa' untuk dilestarikan dan 'mengapa' untuk pengembangan berkelanjutan, bahkan sebelum mempertimbangkan 'bagaimana' melakukannya, pernyataan yang lebih jelas dan interpretasi yang lebih mudah dari hubungan antara keberadaan situs arkeologis dan lingkungan alam. Model evaluasi yang ditawarkan dapat membantu operasional ke depan situs arkeologi menuju perencanaan pelestarian dan pengelolaan yang diimplementasikan secara jelas konseptualnya dari aspek administrasi, aturan, dan teknis secara konstruktif yang dapat dipertanggungjawabkan potensi signifikansinya menjadi aset yang berharga dan sangat penting.

Situs arkeologi dan pengelolaan lanskap mencakup berbagai masalah dan keprihatinan, termasuk pelestarian, penelitian, interpretasi, pariwisata berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat setempat. Intervensi reaktif tidak cukup untuk memastikan keberlanjutan sumber daya, atau kebutuhan masyarakat sementara. Memperluas pariwisata budaya dan globalisasi, ditambah dengan dampak dari strategi ekonomi jangka pendek, adalah beberapa alasan mengapa manajemen terpadu dan holistik, dalam beberapa tahun terakhir, menjadi pendekatan yang menarik untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya budaya. Di antara beberapa jenis manajemen yang ada, model yang telah dibangun dalam Burra Charter Australia telah memperoleh banyak manfaat, terutama untuk pendekatannya terhadap masalah keterlibatan masyarakat setempat, dan konsep etologis dan ideologis dalam menilai sumber daya. Tetapi kerangka intelektual untuk pengelolaan etis sumber daya arkeologis kurang jelas.

Bagian utama dari penulisan ini difokuskan pada pertanyaan tentang pengelolaan situs arkeologi dan khususnya, manajemen taman arkeologi sehubungan dengan persyaratan pengunjung. Penulis terutama tertarik pada

manajemen sumber daya (situs arkeologi) dan manajemen organisasi (operasional). Kerangka kerja konseptual yang sangat lintas disiplin disajikan untuk kedua bidang kajian ini. Hal ini didasarkan pada disiplin ilmiah yang relatif muda, yang disebut manajemen sumber daya budaya ataupun manajemen warisan budaya. Selain itu, dalam bidang arkeologi dalam arti kata yang lebih sempit itu juga didasarkan pada manajemen warisan arkeologis.

Berbagai cabang kajian ilmiah, seperti manajemen sumber daya budaya arkeologi, arkeologi publik, interpretasi, dan lain-lain, telah dikembangkan dalam ilmu arkeologi selama beberapa dekade terakhir, yang semuanya telah membantu penulis dalam mengembangkan konsep taman arkeologi berdasarkan subjek artikel ini. Penulis mulai dari asumsi logis seperti: untuk berfungsi dalam lingkungan yang selalu berfluktuasi, manajemen warisan memerlukan organisasi, yang akan memberikan keterampilan manajerial untuk mengorganisasikan taman arkeologi. Dalam penulisan ini sebagian besar mengandalkan teori manajemen organisasi, dengan penekanan khusus pada manajemen organisasi nirlaba. Titik awal untuk diskusi kami adalah elemen-elemen manajemen organisasi sebagai model, yang merupakan fondasi umum manajemen strategis. Kita juga harus menyebutkan manajemen museum yang berhubungan dengan semua aspek kepemimpinan dan manajemen di museum, dari perlindungan koleksi dan sistem keselamatan hingga aspek organisasi seperti manajemen strategis, manajemen sumber daya manusia, dan lain-lain.

Beberapa taman arkeologi di Eropa dan Australia membangun konsep perencanaan taman arkeologi menggunakan teori manajemen organisasi umum dan teori manajemen museum, dan kemudian mereka mengembangkan model untuk organisasi pengelolaan taman arkeologi dengan menggunakan model Bryson untuk perencanaan strategis dan model Tavčar untuk kebijakan organisasi yaitu merancang manajemen organisasi seperti taman arkeologi. Kedua model mengikuti logika perencanaan strategis, yang menempatkan tujuan (jangka pendek) ke dalam hubungan logis dengan tujuan organisasi, visi dan

misi, dan keduanya menyediakan komponen strategis (kegiatan, organisasi dan sumber daya) yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Pada bagian teoritis, kami telah menjelaskan secara terperinci elemen-elemen yang disebutkan di atas yang merupakan karakteristik organisasi, yang melakukan aktivitas di taman arkeologi.

Artikel ini akan menunjukkan dan secara singkat menjelaskan sepuluh langkah model perencanaan strategis Bryson. Signifikansi setiap langkah akan dieksplorasi secara rinci dan akhirnya, relevansi dan operasionalisasinya di lembaga publik akan dibahas. Menurut Bryson (2011) adalah sangat penting bahwa sebelum memulai melakukan perencanaan strategis, hal-hal tertentu harus dipertimbangkan, termasuk menjawab pertanyaan kebijakan utama yang mempengaruhi misi, nilai-nilai, produk / layanan, klien, atau biaya keuangan bagi organisasi. Yang sama pentingnya adalah gagasan untuk memahami budaya organisasi serta pernyataan misinya dan melakukan analisis lingkungan menggunakan kisi-kisi analisis SWOT yang merupakan alat penuntun dalam menentukan masalah mana yang harus ditangani dalam rencana strategis. Analisis SWOT melihat peluang, kekuatan, ancaman dan kelemahan rencana strategis dan melalui itu, perencanaan dapat membentuk dan mengadopsi solusi yang paling sesuai dengan rencana yang dibangun. Pada tahap ini, perencana harus memberikan pernyataan tujuan, yaitu, mereka harus menjelaskan mengapa penting bagi organisasi untuk melakukan perencanaan strategis dan oleh karena itu mereka harus menghasilkan dokumen strategis yang mencerminkan misi organisasi. Langkah pertama dalam proses model perencanaan strategis Bryson adalah memulai dan menyepakati proses rencana strategis. Langkah ini melibatkan negosiasi perjanjian di antara pemangku kepentingan.

Perencanaan strategis seperti di atas umumnya dipakai dalam organisasi yang bersifat publik. Model perencanaan strategis dengan menggunakan langkah-langkah sistematis. Menurut John M. Bryson langkah-langkah yang dimaksud adalah : (1) identifikasi mandat organisasi; (2) memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi; (3) penilaian terhadap lingkungan

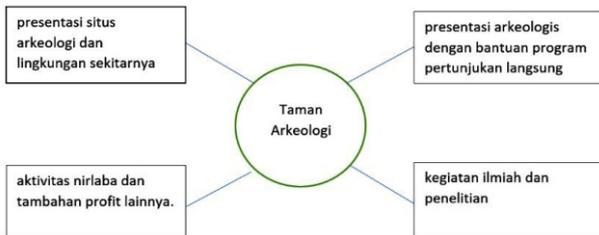
eksternal; (4) penilaian lingkungan internal; (5) identifikasi isu-isu strategis yang dihadapi; (6) merumuskan strategi untuk mengelola isu; (7) penetapan visi organisasi yang efektif dan efisien. Karakter dasar perencanaan strategis adalah pembuat keputusan adalah stakeholder secara keseluruhan, pihak-pihak terkait dibantu para ahli yang bertindak sebagai fasilitator. Bersifat komprehensif karena semua aspek dikaji tetapi hanya berkaitan dengan isu strategis, hasil kajiannya bersifat menyeluruh bukan hanya aspek fisik serta memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Pendekatan-pendekatan secara konseptual untuk manajerial Taman Arkeologi Leang-leang adalah pendekatannya lebih adaptif dan pilihan yang berbeda penjelasannya sesuai karakter situs dan lingkungan yang membentuknya, dan model manajemen untuk organisasi yang akan dibangun. Berdasarkan terminologi di bagian kedua dari artikel ini, terkait dengan membangun pemahaman dan penalaran taman arkeologi dengan pendekatan fungsional terkait presentasi museum situs terbuka (open site museum). Terlepas dari kenyataan kita menggunakan konsep taman arkeologi, maka kita harus menunjukkan bahwa konsep manajemen sumber daya budaya dan penanganan warisan budaya seperti museum dalam arti luas manajemen organisasi. Pertimbangan varietas pendekatan dan tinjauan yang berkaitan dengan contoh-contoh berbagai praktek taman arkeologi di beberapa negara tergantung pada peraturan administratif masing-masing negara dan undang-undang nasionalnya. Pertanyaannya tentang pengelolaan sumber daya budaya adalah manajemen umum tetapi dengan penekanan yang berbeda.

Sebagai contoh ketika kita menimbang berbagai prioritas dalam proses bisnis taman arkeologi, kita menyadari bahwa kita dapat menghabiskan waktu berjam-jam ataupun sehari-hari untuk menciptakan peraturan bagi karyawan, memberikan mereka pelatihan dan umpan balik korektif dan membantu mereka meningkatkan kinerja harian mereka. Namun, pada titik tertentu, kita harus mepercayai mereka untuk melakukan pekerjaan mereka. Kebijakan yang ditulis dengan baik menyampaikan kepada karyawan apa yang diharapkan dari mereka, membuat kita bebas untuk fokus pada prioritas manajemen lainnya. Dari

beberapa kajian literatur penulis tentang taman arkeologi yang ada di beberapa negara, di bawah ini penulisan secara paralel mencoba mengkonstruksi skema operasional organisasi taman arkeologi, paling tidak sesuai dengan eksisting situs arkeologi di Leang-leang Maros.

Elaborasi Aktivitas Organisasi Taman Arkeologi.



Fitur utama yang membedakan taman arkeologi dari taman tematik lainnya adalah pendidikan tentang masa lalu, presentasi yang didasarkan pada penelitian ilmiah. Oleh karena itu, presentasi ini tidak fiktif atau fantastik. Selain presentasi permukiman dan aktivitas prasejarah, taman arkeologi memiliki, antara lain, juga memiliki misi yang lebih luas, yaitu untuk memperkuat kepemilikan budaya, identitas nasional dan transnasional, dan untuk menjelaskan perbedaan budaya.

a. Pendekatan Taman Arkeologi sebagai Manajemen Sumber daya Budaya

Sebelum dikelola sebagai sumber daya budaya, pertanyaannya apa yang menarik dilakukan penyajian taman arkeologi? Situs arkeologi yang menjadi taman arkeologi menerima tingkat perlindungan khusus untuk memastikan bahwa situs ini akan dilestarikan selamanya. Setiap orang dapat mengunjungi tempat ini, berbagi dalam keunikan, keindahan, misteri, pengetahuan tentang masa lalu, mempelajari sisa-sisa di bumi untuk mengungkap petunjuk yang mengungkapkan bagaimana orang-orang di masa lalu hidup. Semua aktivitas yang terukur dan terstruktur untuk memproduksi output yang bermanfaat/bernilai bagi pengunjung.

Jika kita mendalami pengelolaan taman arkeologi sebagai manajemen sumber daya budaya bahwa ada banyak model pengelolaan lain, banyak

di antaranya dibentuk dengan memodifikasi model-model terkenal. Juga perhatikan bahwa, karena tidak ada definisi standar untuk model pengelolaan taman arkeologi, mungkin ada pembaca menganggap beberapa hal berikut sebagai praktik manajemen standar.



Dalam manajemen warisan budaya, saat ini secara umum diterima bahwa pengembangan rencana manajemen terpadu dan holistik adalah fondasi penting bagi keberlanjutan pekerjaan, rencana aksi setelah perencanaan komprehensif, sementara tindakan reaktif, atau intervensi yang dilaksanakan di luar kerangka rencana, dianggap sebagai ancaman potensial terhadap sumber daya arkeologi; pendekatan reaktif dapat mengarah pada keputusan yang dapat menghasilkan konsekuensi negatif yang tidak terduga dalam jangka pendek dan panjang. Dengan demikian intervensi reaktif tidak dipandang cukup untuk memastikan pelestarian warisan budaya jangka panjang dari sumber daya arkeologis atau kebutuhan masyarakat kontemporer. Piagam ICOMOS Australia untuk Konservasi Tempat Signifikansi Budaya (diadopsi sebagai Piagam Burra 1979), model ini menerapkan gagasan tentang analisis nilai-nilai yang holistik dan terintegrasi dan pertimbangan kontekstual sebagai inti dari proses perencanaan partisipatif. Model perencanaan berbasis nilai, yang saat ini tercermin dalam rekomendasi dari organisasi internasional seperti ICOMOS, UNESCO, Getty Conservation Institute dan Bank Dunia, didebatkan untuk memungkinkan mengelola perubahan di dunia yang kompleks. Pengambilan keputusan yang berkelanjutan adalah hasil dari perencanaan jangka panjang yang cermat dan sejalan dengan desain situs arkeologi.

Apa yang tidak secara eksplisit tercermin dalam model manajemen saat ini adalah bahwa nilai, sering mengungkapkan diri mereka melalui hubungan "sarana untuk mencapai tujuan": nilai dapat dilihat sebagai melekat pada hasil yang diinginkan dari tujuan dan reaksi. Pengambilan keputusan, tidak hanya berfokus pada "nilai yang ada", tetapi juga pada "nilai potensial". Gagasan menciptakan nilai dengan cara modifikasi aktif atau penggunaan sumber daya adalah masalah yang tidak terdefinisi dalam sistem manajemen warisan. Nilai-nilai yang mensyaratkan kreativitas untuk direalisasikan dapat disebut "peluang". Perbedaan antara nilai-nilai yang ada dan yang potensial memiliki implikasi yang cukup besar bagi praktik manajemen warisan budaya; jika dirasakan signifikan, yang pertama harus dilestarikan, sedangkan yang kedua harus diatasi. Ketegangan antara pelestarian nilai-nilai yang ada dan penciptaan nilai-nilai potensial seringkali merupakan elemen kunci pengambilan keputusan. Ketegangan ini sering ditangani sebelum penilaian nilai-nilai, yang mengarah ke pendekatan di mana pelestarian didahulukan dari unsur-unsur penting lainnya, dan di mana pelestarian nilai-nilai yang ada lebih disukai daripada penciptaan yang baru. Seperti yang akan ditindaklanjuti nanti, terutama kasus untuk proses interpretasi, komunikasi dan pendidikan yang sering ditangani terlambat dalam proses manajemen.

Kenyataannya beberapa praktek taman arkeologi di beberapa negara aktivitas adalah produk wisata budaya kekinian, yang dipimpin oleh organisasi. Demonstrasi nyata kehidupan masa lampau di situs arkeologi adalah tujuan utama, dicapai dengan bantuan sisa-sisa arkeologis, dan eksisting lingkungan alam, tayangan tambahan dan program langsung. Penekanan sejarah peradaban didasarkan pada penelitian arkeologi sebelumnya. Bagian integral dari taman arkeologi adalah kegiatan komersial yang saling melengkapi seperti kios, homestay, cafe, akomodasi, persewaan lahan situs zona pemanfaatan, dan lain lain.

Implementasi Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Dalam Pengelolaan Cagar Budaya telah disebutkan dalam Menimbang bahwa cagar budaya perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya

pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya; diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat;

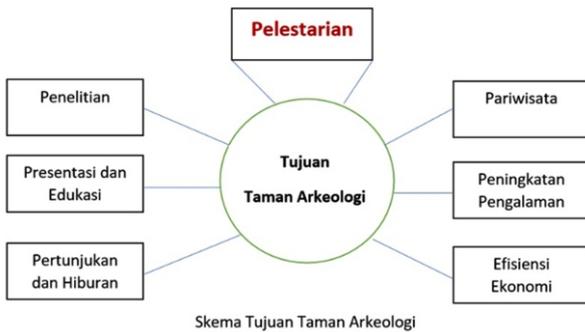
Model pendekatan manajemen sumberdaya budaya sejalan dengan tata kelola dan prinsip UU No. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya sudah mengamanatkan peraturan hukum tentang pengelolaan warisan budaya, sebagaimana disebutkan Pasal 96 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang mengelola Kawasan Cagar Budaya; dan pasal 97 dengan jelas menyebutkan bahwa Pasal 97

- Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
- Pengelolaan dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.
- Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat.
- Badan Pengelola dapat terdiri atas unsur Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat

Dengan demikian, artikel ini mengawali proses situs arkeologi Leang-leang menjadi taman arkeologi, dan mendapatkan petunjuk tentang bagaimana manajemen dapat dikembangkan untuk tujuan pelestarian warisan budaya tidak hanya untuk melindungi saja tetapi juga mengembangkan dan memanfaatkan untuk kebutuhan publik, tetapi juga dibutuhkan konsep pengelolaan berbasis masyarakat.

Apapun konsep manajemen, bahwa Taman Arkeologi Leang-leang di desain untuk mengintegrasikan pelestarian, interpretasi, dan rekreasi. Taman arkeologi sebagai strategi untuk pelestarian dan pengelolaan situs warisan arkeologi

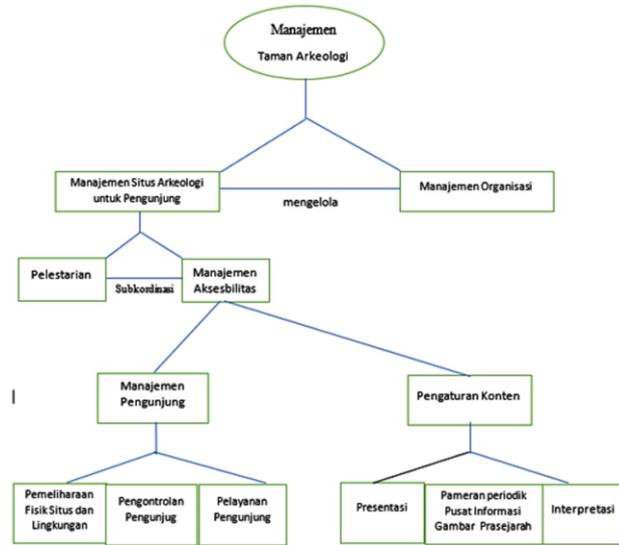
yang kompleks, dilengkapi dengan elemen-elemen lanskap, fasilitas ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pengunjung seperti jalan setapak, taman alami, parkir, kafe dan pusat informasi serta karakterisasi tamannya disajikan sebagai produk wisata budaya dan dibuka untuk publik. Taman arkeologi dipimpin oleh seorang manajer yang memahami dan terbiasa dengan prinsip dan teori arkeologi dan museologi, serta memahami filosofi pariwisata termasuk manajemen pengunjung.



Tujuan dari operasi taman arkeologi adalah: penelitian, presentasi dan pendidikan, hiburan, penggunaan wisatawan, peningkatan pengalaman dan efisiensi ekonomi. Pelestarian warisan budaya adalah tujuan utama, yang menggabungkan kedua kutub, yaitu pelestarian dan pemanfaatan pariwisata. Jika kita menyederhanakan, taman arkeologi yang dapat dikembangkan di situs arkeologi Leang-leang dapat dianggap sebagai semacam hibrida antara museum, presentasi warisan arkeologi di taman terbuka dan taman petualangan. Sehingga taman arkeologi sebagai organisasi dan operasi akan dilakukan dari kegiatan yang dilaksanakannya, dan dari tujuan organisasi.

Selain yang disebutkan di atas, pengoperasian taman arkeologi mengikuti semua pedoman pelestarian dan pengelolaan sesuai amanah UU No. 11 Tahun 2011 tentang Pelestarian Cagar Budaya dan UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan untuk pengembangan tempat-tempat wisata. Kawasan situs arkeologi Leang-leang dapat berfungsi sebagai pusat promosi regional utama dan penghasil pariwisata budaya dan ekonomi kreatif.

Skema Pengelolaan Taman Arkeologi sebagai Sumberdaya Budaya



Taman arkeologi sebagai organisasi dan operasional adalah produk wisata budaya kontemporer, yang dipimpin oleh sebuah organisasi. Dua tujuan utamanya adalah presentasi yang jelas tentang kehidupan masa lalu dan presentasi tentang pentingnya warisan arkeologis bagi masyarakat saat ini. Itu semua terjadi di situs arkeologi dengan bantuan sisa-sisa arkeologis, struktur dan lingkungan yang direkonstruksi, tampilan tambahan lainnya dan program langsung. Ini bukan hanya tentang penyajian masa lalu, tetapi juga tentang hubungan antara masa lalu dan masa kini, yang membangkitkan minat pengunjung. Presentasi didasarkan pada penelitian ilmiah pendahuluan. Interpretasi yang dimaksudkan pada skema di atas adalah proses komunikasi, yang dirancang untuk mengungkapkan makna dan hubungan warisan budaya dan alam serta karst, melalui keterlibatan dengan benda, artefak, lanskap, dan situs, dan komunikasi interpretatif ini menerjemahkan informasi untuk bahasa sehari-hari pengunjung dengan pesan apa dan cerita apa yang ingin kita sampaikan. Hal ini sebagai bentuk layanan pada jalur pemandu, pemandu tur, pameran, publikasi, dll.

Oleh karena sangat kompleksnya pengelolaan taman arkeologi sehingga perlu dibuatkan pedoman terdahulu dengan menyajikan pendekatan manajemen sumber daya arkeologis sebagai komponen manajemen sumber daya budaya menggunakan prinsip dan praktik Kebijakan

Manajemen Sumber Daya Budaya (Kebijakan CRM). Pengelolaan Sumber Daya Arkeologi ini akan selalu di update yang mencerminkan dan mengikuti tren manajemen perubahan dan perubahan organisasi dan arah fungsional di Taman Arkeologi Leang-leang. Bagian integral dari taman arkeologi adalah kegiatan nirlaba tambahan, seperti toko, restoran, bar makanan ringan, akomodasi, sewa fasilitas, dll.

C. Program dan SDM yang terlibat

Dalam hal ini, konsep taman arkeologi dipandang sebagai mengatasi lingkungan situs, rencana perjalanan pengunjung, dan memberikan informasi interpretatif. Taman arkeologi harus dirancang sesuai dengan konteks dan fungsi sosialnya, dan pengelolaan situs arkeologi dirancang sesuai dengan kerangka aturan UU R.I No.11 tahun 2010 tentang cagar budaya mengacu pada perlindungan (pasal 56 – 77), pengembangan (pasal 78 – 83), dan pemanfaatan (pasal 85 - 94), dan pengelolaan (pasal 96 dan 97).

Program-program yang ditawarkan kepada pengunjung interpretasi komprehensif tentang pembentukan dan transformasi bentang alam di wilayah Leang-leang, serta evolusi kehidupan memenuhi kehidupan dan kehidupan sosial prasejarah Leang-leang hingga saat ini. Ini adalah contoh yang baik dari interaksi antara warisan arkeologi, rumah informasi, dan kawasannya.

Untuk mengembangkan program Taman Arkeologi Leang-leang, penulis terinspirasi konsep musealization yang dikembangkan pada Taman Arkeologi Gav'a Mines Barcelona, Catalonia, Spanyol bahwa taman arkeologi berfokus pada aspek-aspek desain dan pengembangan situs arkeologi musealized: pelestarian dan konservasi, keamanan, teknik museological, komunikasi, dan semua tersebut, peran penelitian sebagai dasar untuk mengembangkan konten yang terus diperbarui dan berkualitas tinggi untuk diseminasi publik. Dikatakan juga untuk menetapkan rencana yang efektif untuk transformasi situs arkeologi menjadi situs musealized, mengeksplorasi aspek perencanaan, implementasi, dan manajemen sebagai pusat interpretatif yang dinamis. (Maria Isabel Panosa, 2015).

Pertimbangan pada konsep musealization di taman arkeologi lebih mengeksplorasi konsep dan prinsip untuk menempatkan perencanaan musealization. Ini menyajikan beberapa pedoman, baik untuk pelestarian sisa-sisa arkeologis dan keamanan pengunjung, dan menekankan pentingnya kegiatan penelitian yang terus dipertahankan. Dan juga menyajikan protokol untuk desain, rencana perjalanan pengunjung, dan strategi komunikasi. Terakhir, tentang dimasukkannya situs / taman arkeologi dalam rute budaya, sehingga dapat memberi pengunjung pengalaman yang lebih luas.

Taman arkeologi menyediakan program pendidikan publik, yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian arkeologi dibagikan kepada publik melalui program pendidikan publik taman arkeologi atau interpretatif. Ada kelas lapangan (outdoor) dan ruang kelas (indoor). Taman arkeologi memfasilitasi dan mengembangkan program untuk guru dan siswa, keluarga, manula, pramuka, warga milenial dan pengunjung dari segala jenis. Program dapat mencakup tayangan slide dan video, tur berpemandu, kelas kerajinan tangan, rambu jejak interpretatif, dan festival, serta pameran dan presentasi di gedung pusat informasi gambar prasejarah, dan publikasi populer. Program pendidikan yang baik dapat membuat kunjungan ke taman arkeologi jauh lebih bermakna dan menyenangkan.

Program pariwisata dengan minat yang meningkat pada pariwisata terhadap taman arkeologi - yang disebut Heritage Tourism - telah berkembang selama beberapa tahun terakhir, karena orang mencari liburan yang tidak hanya rekreasi, tetapi juga memberikan pengalaman dan peluang otentik untuk memperluas pengetahuan mereka. Misalnya, tur berpemandu ke taman arkeologi atau partisipasi dalam penggalian yang diarahkan secara profesional di taman dapat memberikan peluang baru bagi wisatawan ke suatu daerah. Sebagaimana diuraikan di atas, orang memiliki minat yang berbeda dalam penggunaan taman arkeologi. Manajemen yang cermat taman arkeologi sangat penting untuk menyeimbangkan banyak minat ini dengan pelestarian situs untuk generasi yang akan datang.

Dengan adanya program-program taman arkeologi, maka dibutuhkan pendekatan Taman Arkeologi sebagai Manajemen Sumber daya Budaya yang diuraikan sebagai berikut: 1) memberikan panduan kepada calon manajer/pimpinan taman arkeologi dan 2) memberikan perspektif dan kerangka acuan. Paragraf berikut memberikan gambaran umum tentang beberapa model manajemen sumberdaya budaya yang lebih menonjol. Tujuan dari ikhtisar ini adalah untuk menambah pengetahuan umum tentang pendekatan untuk mengelola taman arkeologi dan membantu memahami keragaman pendekatan. Tinjauan umum tidak dimaksudkan untuk memberikan panduan terperinci tentang penerapan model apa pun.

Contoh informasi pemandu

Tahap desain Akhir cerita pengurus taman arkeologi sebagai voluntir yang menakjubkan jika ada komentar pengunjung Taman Arkeologi Leang-leang seperti ini: Kami parkir dan mendapat beberapa peta serta menonton video pendek. Jika Anda dapat melihat tempat parkir dan setelah pintu gerbang masuk akan melihat peta sebaran semua situs di Leang-leang. Kami kemudian masuk ke lokasi gedung pusat informasi gambar prasejarah dengan presentasi yang menarik. Kami mengunjungi sejumlah gua prasejarah seperti yang ditunjukkan di peta. Kami disambut oleh voluntir pemandu yang sangat antusias dan menyenangkan. Dia mengatakan kepada kami bahwa dia tidak menginginkan bayaran tetapi ingin berbagi pengetahuannya tentang signifikansi sejarah peradaban manusia yang hidup di gua-gua karst dari taman arkeologi. Kami melewati jalur setapak pemantang sawah, dan pemandangan mosaik-mosaik bukit karst yang membentuk estetika alam, pilar-pilar gua, dan gambar-gambar manusia prasejarah penghuni gua yang terpampang di dinding-dinding dan langit-langit gua yang terawat dan tetap aman oleh penjaga situs. Kami berakhir di taman batu purba dengan karya Tuhan yang menakjubkan. Setelah itu anda dapat merasakan serta sajian di meja kopi karst dan kopi tradisional asli Toraja. Dan juga anda bisa mendapatkan beberapa souvenir unik di sini. Kami menikmati kunjungan kami di Taman Arkeologi Leang-leang.

V. Penutup

Para profesional pelestarian dihadapkan pada tantangan khusus yang muncul dari konteks sosial dan politik adalah tantangan pembagian kekuasaan dan tantangan kolaborasi. Partisipasi yang lebih luas merupakan tantangan dengan peran dan tanggung jawab profesional pelestarian. Beberapa pemikiran menyarankan agar membawa kebijakan pelestarian dan pengelolaan dengan keputusan yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi, hal ini akan melemahkan otoritas profesional pelestarian dan pengelolaan, dan bahkan akan menurunkan derajat tanggung jawabnya. Dengan kata lain, demokratisasi pengambilan keputusan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dapat bertentangan dengan profesional pengabdian pada pelestarian warisan budaya.

Apa yang terjadi ketika demokrasi suara memutuskan bahwa situs warisan budaya dapat dihancurkan? Apakah kita sebagai profesional pelestari cagar budaya memiliki sebuah hak, atau bahkan tanggung jawab, untuk menentang kehendak demokratis? Tetapi kemungkinannya bukan keputusan yang sebenarnya membuat kekuasaan didemokratisasi, tetapi sebaliknya, bahwa proses elitisasi nilai akan dimasukkan. Demokratisasi proses konsultasi dan penilaian nilai-nilai warisan budaya sepertinya tidak menjadi ancaman bagi kedaulatan situs arkeologi.

Tempatkan sejumlah filter yang akan mempromosikan keputusan di taman arkeologi yang melindungi warisan budaya dan alam, sekaligus menjadikan Taman Arkeologi Leang-leang tersebut relevan dengan kepentingan masyarakat, terutama masyarakat sekitar situs. Tantangan ke depan adalah untuk terus mencari cara untuk melayani kepentingan publik dengan melestarikan materi sisa-sisa masa lalu. Apakah publik peduli dengan memberikan status "warisan budaya milik kita bersama" dan memutuskan bahwa publik mana yang akan berinvestasi, merencanakan masa depan situs arkeologi Leang-leang, atau menerapkan perlakuan terhormat pada sebuah situs cagar budaya — gunakan artikulasi nilai-nilai warisan budaya dengan sebutan "signifikansi budaya" sebagai titik referensi (reference point). Penilaian

nilai-nilai yang dikaitkan dengan warisan budaya adalah kegiatan yang sangat penting dalam upaya pelestarian warisan budaya apa pun, karena nilai sangat membentuk keputusan yang diambil. Namun, meskipun nilainya dipahami secara luas sebagai hal penting untuk memahami dan merencanakan pelestarian warisan budaya, hanya ada sedikit pengetahuan tentang bagaimana, secara pragmatis, seluruh jajaran nilai warisan dapat dinilai dalam konteks perencanaan dan pengambilan keputusan. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi penilaian taman arkeologi sebagai aspek tertentu dari perencanaan manajemen pelestarian warisan budaya Leang-leang.

Ini adalah bagian dari rencana Taman Arkeologi Leang-leang, suatu strategi terkoordinasi oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan untuk meningkatkan profil kawasan warisan budaya Leang-leang yang kaya dan beragam warisan budaya dan alamnya. Obsesi penulis jika para komunitas mengatakan: "Sangat menarik untuk memikirkan tentang warisan budaya yang kaya terletak di Taman Arkeologi Leang-leang. Kita harus memastikan bahwa orang yang mengunjunginya menyadari betapa pentingnya hal itu. Panel interpretasi sebelumnya berusia lebih dari sepuluh tahun, jadi kami perlu menggantinya. Memaksimalkan presentasi dan interpretasi warisan budaya adalah bagian inti dari rencana tim inovasi Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan untuk membuat Taman Arkeologi Leang-leang yang Lebih Baik.

Praktek taman arkeologi di beberapa negara yang telah lama berlangsung menunjukkan berbagai kekuatan dan kelemahan, secara luas terikat pada berbagai bentuk manajemen, status hukum taman arkeologi, metode penyajian masa lalu dan juga sejauh mana kegiatannya. Penulis telah mempelajari organisasi-organisasi dalam hal status hukum, kepegawaian, berbagai bentuk presentasi arkeologis di masa lalu, pengunjung, jenis dan tingkat kegiatan. Selain itu, juga mempelajarinya hubungan antara pendapatan dan pengeluaran terkait dengan operasional. Atas dasar perbandingan antara praktek-praktek ini serta memperhitungkan kemungkinan dampak negatif dari pariwisata atau bentuk penggunaan ekonomi lainnya, kami menyarankan jenis dan tingkat operasi

tertentu, yang dapat dimasukkan dan diimplementasikan oleh organisasi yang mengelola taman arkeologi. Selain itu, penulis telah membuat beberapa saran tentang pendirian dan pengembangan organisasi, struktur karyawan dan bentuk organisasi yang paling sesuai untuk pelaksanaan operasional Taman Arkeologi Leang-leang nantinya. Terjawab sudah pertanyaannya "Di mana saya dapat menemukan taman arkeologi di Indonesia"? maka taman arkeologi dapat ditemukan di Leang-leang Maros, Profinsi Sulawesi Selatan.

Pertanyaan yang lain dari perdebatan arkeologis antara pelestarian vs ekonomis juga terjawab, tentang bagaimana nilai (value) bekerja dalam pragmatis arkeologi yaitu rekonstruksi masa lalu, pelestarian, dan manajemen warisan budaya memberikan faktor yang menyatu dalam penulisan ini. Melalui silsilah nilai (value) dalam pengelolaan warisan budaya tangible, penulis merespon bagaimana 'signifikansi' telah dilembagakan dari berbagai bentuk, dan 'masa lalu' menjadikan sebuah objek. Kemunculan signifikansi ekonomi dalam manajemen warisan budaya secara provokasi menunjukkan bahwa praktek arkeologis dan manajemen warisan budaya adalah satu dan sama. Keduanya mampu menghasilkan nilai (value) dalam konteks kontemporer.

Kesimpulan Pendekatan terhadap pengembangan situs arkeologi Leang-leang harus memenuhi kriteria ilmiah, estetika, teknis, pendidikan, dan fungsional yang sesuai. Selain menarik pengunjung, pendekatan harus memprioritaskan keaslian dan mengejar harmonisasi dengan pedesaan sekitarnya. Solusi efektif perlu ditemukan untuk mengkoordinasikan kebutuhan pengunjung (akses, mobilitas, minat, pengertian, dll.) Dengan persyaratan konservasi sisa-sisa arkeologis, dalam konteks spesifik lokasi dan lingkungannya. Ini adalah tantangan utama yang dialami dalam pengembangan Taman Arkeologi Leang-leang sebagai perluasan ruang dan aktivitas pusat informasi prasejarah.

Dalam mempromosikan, dan menafsirkan ada harapan dan tuntutan wisatawan yang bermotivasi budaya, dan taman arkeologi dapat memenuhi tuntutan dan harapan ini dan pada saat

yang sama menghasilkan sarana keuangan untuk melestarikan dan menyajikan warisan yang sama. Untuk itu, dalam jangka panjang, pelestarian sumber daya warisan arkeologi yang efektif tidak hanya membantu dalam melestarikan dan melindungi sumber daya, tetapi juga dalam merevitalisasi ekonomi lokal, dan dalam mewujudkan rasa identitas, kebanggaan, dan kepemilikan penduduk dan mengarah pada kesejahteraan dan keamanan, melalui partisipasi dan keterlibatan masyarakat luas.

Pengembangan situs arkeologi Leang-leang menjadi taman arkeologi tidak boleh menimbulkan dampak buruk pada situs cagar budaya tersebut atau pengaturannya (termasuk zona penyangga apa pun). Secara khusus, untuk tetap menghargai nilai budaya, integritas, keaslian atau signifikansi dan pelestarian. Dalam mempertimbangkan aplikasi perencanaan taman arkeologi, bobot perlindungan dan penelitian yang tepat harus diberikan untuk persiapan mengimplementasikan ketentuan Rencana Pengelolaan Taman Arkeologi. Strategi pelestarian warisan budaya yang baik membutuhkan (a) apresiasi yang lebih baik terhadap nilai aset warisan budaya arkeologi, dan (b) integrasi strategi semacam itu dalam proses perencanaan dan pengembangan situs arkeologi secara luas, dan dalam jangka panjang membantu mencapai tujuan keberlanjutan.



Daftar Pustaka:

- Anonim.... Undang Undang R.I Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
- AEOM. Association of European Open-Air Museums. Official Website. <http://www.aeom.org/> (3 November 2011).
- Agnew, M. (2002), "Methodology Conservation Criteria and Performance Evaluation for Archaeological Site Shelters", in Conservation and Management of Archaeological Sites, vol. 5, issue 1-2, pp. 7-18.
- Antoni, Judith. 1999. Mirrors of our past and present. Archaeological parks. In Archaeology of the Bronze and Iron Age. Experimental archaeology, environmental archaeology, archaeological parks. Proceedings of the International Archaeological Conference, Százhalombatta, 3–7 October 1996, ed. Erzsébet Jerem in Ildikó Poroszlai, 217–223. Budapest: Archaeolingua alapítvány.
- Aplin, G. (2002), Heritage – Identification, Conservation, and Management, Oxford University Press, Oxford.
- Australia ICOMOS. 1999. The Burra Charter. The Australian ICOMOS charter for places of cultural significance. <http://www.nsw.nationaltrust.org.au/burracharter.html> (7 July 2009) / Slovenian translation: Prevod listine iz Burra. 2007. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine. http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/raziskave-analize/dediscina/metodologijakonservatorski_nactr/02_Burra.pdf (12 March 2011).
- Avrami, E. (2016), "Making Historic Preservation Sustainable", in Journal of the American Planning Association, n. 82, pp. 1-9.
- Avrami, Erica, Randall Mason and Marta de la Torre. eds. 2000. Values and Heritage Conservation. Los Angeles: The Getty Conservation Institute. [Google Scholar]
- Breznik, Andreja. 2006. Archaeological Park: Activity of Reconstructing the Past. Varstvo spomenikov/Journal for the Protection of Monuments 41: 89–99. [Google Scholar]
- Binford, Lewis. 1972. An Archaeological Perspective. New York: Seminar Press.
- BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA Sulawesi Selatan Laporan Kegiatan, 2018: Restrukturisasi Data dan Identifikasi Pemantauan Laju Kerusakan Lukisan Dinding Gua Prasejarah di Kab. Maros, dan Kab. Pangkep (Prov. Sulawesi Selatan), Kab. Muna, dan Kab. Konawe Utara (Prov. Sulawesi Tenggara).
- BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA Sulawesi Selatan Laporan Kegiatan, 2019: Studi teknis Teknis Pengembangan Situs Gua-Gua Prasejarah Kabupaten Maros.
- Bryson, J. (2004) 'What to Do When stakeholders Matter: Stakeholder Identification and Analysis Techniques. Vol. 6 Issue 1 2004 21-53 Public Management Review ISSN 1471-9037 prinViSSN 1471-9045 online.
- Byrne, Denis, Helen Brayshaw, Tracy Ireland. t.t. Social Significance. A Discussion Paper. NSW National Parks & Wildlife Service, Research Unit, Cultural Heritage Division.
- https://www.accenture.com/us-en/~/_media/accenture/conversion-assets/dotcom/documents/global/pdf/indurties_17/accenture-bryson-stakeholder-id-and-analysis-pmr-article.pdf
- Cane, S. (2009), "Why Do We Conserve? Developing Understanding of Conservation as a Cultural Construct", in Richmond, A. and Bracker, A. (eds), Conservation – Principles, Dilemmas and Uncomfortable Truths, Butterworth-Heinemann, London.
- Castellanos-Verdugo, M., Oviedo-García, M. A. and Martín-Ruiz, D. (2011), "Tourist Assessment of Archaeological Sites: The Case of The Archaeological Complex of Itálica (Seville, Spain)", in Visitor Studies, vol. 14, issue 1, pp. 100-112.

- Carman J. et al. 1995. "Introduction; Archaeological Management", dalam Copper, M.A. et al (ed), *Managing Archaeology*. London: Routledge. Hal. 1-15.
- , 2001 *Archaeology and Heritage: An Introduction*. New York: Continuum.
- Cleere, Henry. F. 1989. "Introduction: the rationale of archaeological management", dalam Henry F. Cleere (ed.), *Archaeological heritage management in the modern world*, hal. 5- 10. London: Unwin-Hyman.
- Cooper, M.A. 1992 Copper, M.A. et al (eds.), *Managing Archaeology*. London:Routledge: 71-88
- Costa, Benjamin, Jorge H. Fernandez, Salvador Roig. 1992. The necropolis of Piug de Molin (Ibiza): a project of an archaeological park open to the public. In *Archaeological sites in Europe: conservation, maintenance and enhancement*, 45–56. Strasbourg: Council of Europe. http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/Resources/Publications/Pat_PA_22_en.pdf (29 March 2010).
- de la Torre, M. (2005), "Part One: Project Background", in de la Torre, M., MacLean, M., R. Mason, R. and Myers, D. (eds), *Heritage Values in Site Management – Four Case Studies*, The Getty Conservation Institute, Los Angeles.
- Della Torre, S. (2013), "Planned Conservation and Local Development Processes: the Key Role of Intellectual Capital", in Van Balen, K. and Vandesande, A. (eds), *Reflections on Preventive Conservation, Maintenance and Monitoring of Monuments and Sites by PRECOM3OS UNESCO Chair*, Acco, Uitgeverij, pp. 123-127.
- Demas, M. (2013), "Protective Shelters for archaeological sites", in Roby, T. and Demas, M. (eds), *Mosaic in situ – An overview of the literature on conservation of mosaic in situ*, J. Paul Getty Trustm, Los Angeles.
- Djurić, Bojan. 2007. Preventive archaeology and archaeological service in Slovenia. In *European preventive archaeology. Paper on the EPAC Meeting, Vilnius 2004*, ed. Katalin Bozóki-Ernyey, 181–186. National Office of Cultural Heritage, Hungary, Council of Europe, Directorate of Culture and Cultural and Natural Heritage. <http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/Source/Conventions/Heritage/EPreventiveArchwebversion.pdf> (20 September 2008).
- Drucker, F. Peter. 1999 (reprint from 1990). *Managing the Non-Profit Organisation. Practices and Principles*. Oxford: Butterworth-Heinemann.
- Eagles, Paul F. J., Stephen F. McCool, Christopher D. Haynes. 2002. *Sustainable tourism in Protected Areas: Guidelines for planning and management*. Switzerland and Cambridge: IUCN Gland. http://cmsdata.iucn.org/downloads/pag_008.pdf (12 May 2011).
- Figueiredo, M., Bernardes, J. P., Rodrigues, J. I. J. and Gonçalves, C. (2018), "A Framework Supported by Modeling and Virtual/Augmented Reality for the Preservation and Dynamization of Archeological-Historical Sites", in Rodrigues, J. M. F., Ramos, C. M. Q., Cardoso, P. J. S. and Henriques, C. (eds), *Handbook of Research on Technological Developments for Cultural Heritage and eTourism Applications*, IGI Global, Hershey PA.
- Fredheim, L. H. and Khalaf, M. (2016), "The Significance of Values: Heritage Value Typologies Re-Examined", in *International Journal of Heritage Studies*, vol. 22, issue 6, pp. 466-481.
- Hooper-Greenhill, Eilean. 2000. *Museums and their visitors* (reprint). Routledge: London, New York.
- ICOM. 2013. *ICOM code of ethics for museum*. ICOM: Paris. http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Codes/code_ethics2013_eng.pdf (18 December 2013).
- ICOMOS. 1964. *International charter for the conservation and restoration of monuments and sites (the Venice Charter) / Mednarodna listina o konservaciji in restavraciji spomenikov in spomeniških območij (Beneška listina)*. In *Doktrina 1. Mednarodne listine ICOMOS*, ed. Jovo Grobovšek, 2003, 25-28. Ljubljana: Združenje ICOMOS/SI.

- 1990. Charter for the protection and management of the archaeological heritage (the Lausanne Charter) / Listina o varovanju in upravljanju arheološke dediščine (Lausannska listina). In Doktrina 1. Mednarodne listine ICOMOS, ed. Jovo Grobovšek, 2003, 45-50. Ljubljana: Združenje ICOMOS/SI.
 - 1999. International cultural tourism charter. Managing tourism at places of heritage significance / Mednarodna listina o kulturnem turizmu. Upravljanje turizma na območjih dediščinskega pomena. In Doktrina 1. Mednarodne listine ICOMOS, ed. Jovo Grobovšek, 2003, 61-67. Ljubljana: Združenje ICOMOS/SI.
 - 2008. The ICOMOS Charter for the Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites (Icomos ENAME Charter). http://www.international.icomos.org/charters/interpretation_e.pdf (21 January 2011).
- ICOMOS (2013), The Burra Charter – The Australia ICOMOS Charter for Places of Cultural Significance, ICOMOS, Australia. [Online] Available at: www.academia.edu/5089488/The_Australia_ICOMOS_Charter_for_Places_of_Cultural_Significance [Accessed October 4th 2018].
- ICOMOS (1994), The Nara Document on Authenticity. [Online] Available at: www.icomos.org/charters/nara-e.pdf [Accessed September 8th 2018].
- ICOMOS, International Cultural Tourism Charter (2002). Principles and Guidelines For Managing Tourism at Places of Cultural and Heritage Significance.
- Isabel Panosa, Maria. 2015. Musealizing Archaeological Sites. Considerations on Research, Conservation, and Dissemination: A Case Study from the Gavà Mines Archaeological Park dimuat dalam conservation and mgmt of arch. sites, Vol. 17 No. 2, May 2015, 159–174 Institut Català d'Arqueologia Clàssica, Spain.
- Jokilehto, J. (2009), "Conservation Principles in the International Context", in Bracker, A. and Richmond, A. (eds), Conservation – Principles, dilemmas and uncomfortable truths, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford.
- Kapelouzou, I. (2012), "The Inherent Sharing of Conservation Decisions", in Studies in Conservation, vol. 57, n. 3, pp. 172-182.
- Lavelle, Siobhan. 2009: Assessing Significance for Historical Archaeological Sites and 'Relics'. Heritage Council of NSW (New South Wales). the Heritage Branch of the Department of Planning.
- Mason, R. (2002), "Assessing Values in Conservation Planning: Methodological Issues and Choices", in de la Torre, M. (ed.), Assessing the Values of Cultural Heritage, The Getty Conservation Institute, Los Angeles.
- Mason, R. and Avrami, E. (2000), "Heritage Values and Challenges of Conservation Planning", in Teutónico, J. M. and Palumbo, G. (eds), Management Planning for Archaeological Sites – An International Workshop Organized by the Getty Conservation Institute and Loyola Marymount University, 19-22 May 2000 Corinth, Greece, The Getty Conservation Institute, Los Angeles, pp. 13-26.
- M. Aubert, A. Brumm, M. Ramli, T. Sutikna, E. W. Saptomo, B. Hakim, M. J. Morwood, G. D. van den Bergh, L. Kinsley, A. Dosseto. (2014), "Pleistocene cave art from Sulawesi, Indonesia" Article in Nature · October 2014 DOI: 10.1038/nature13422 · Source: PubMed : <https://www.researchgate.net/publication/266683667>
- McManus, Paulette. M., 1999. Archaeological parks: what are they?. Archaeology International, 3, pp.57–59. DOI: <http://doi.org/10.5334/ai.3017> dan Publish 22 Nov 1999. <https://ai-journal.com/articles/abstract/10.5334/ai.3017/>
- Michalski, S. (2018), "Sharing Conservation Decisions: Tools, Tactics, and Ideas", in Heritage, A. and Copithorne, J. (eds), Sharing Conservation Decisions Current Issues and Future Strategies, ICCROM, Rome. [Online] Available at: www.iccrom.org/sites/default/files/2018-05/sharing_conservation_decisions_2018_web.pdf [Accessed November 18th 2018].

- Michalski, S. W. (1994), "Sharing Responsibility for Conservation Decisions", in Krumbein, W. E., Brimblecombe, P., Cosgrove, D. E. and Staniforth S. (eds), *Durability and Change – The Science, Responsibility, and Cost of Sustaining Cultural Heritage*, John Wiley and Sons, Chichester.
- Morrice, Richard. 2019. *Statements of Heritage Significance: Analysing Significance in Heritage Assets Historic England Advice Note 12*, Swindon. [HistoricEngland.org.uk/advice/planning/planning-system/](https://historicengland.org.uk/advice/planning/planning-system/).
- Muñoz Viñas, S. (2005), *Contemporary Theory of Conservation*, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford.
- Nutt, P. C. (2002), *Why decisions fail: avoiding the blunders and traps that lead to debacles – Lesson about what, works, what doesn't and why from 20-years study on 400 decisions*, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco.
- Paardekooper, Roeland. 2012. *The value of an archaeological open-air museum is in its use. Understanding archaeological open-air museums and their visitors*. Leiden: SidestonePress.
- Pellilo, Alessia, ed. 2009. *Guide to the archaeological open air museums in Europe*. Modena: Museo Civico Archeologico Etnologico di Modena.
- Palumbo, G. (2002), "Sheltering an archaeological structure in Petra – A case-study of criteria, concepts, and implementation", in *Conservation and Management of Archaeological Sites*, vol. 5, issue 1-2, pp. 35-44. [Online] Available at: www.tandfonline.com/doi/abs/10.1179/cma.2002.5.1-2.35 [Accessed 4 September 2018].
- Pearson, M. and Sullivan, S. (1999), *Looking after Heritage Places – The Basics of Heritage Planning for Managers, Landowners and Administrators*, Melbourne University Press, Melbourne.
- Pye, E. (2001), *Caring for the Past – Issues in Conservation for Archaeology and Museums*, James & James, London.
- Rudloff, B. (2006), *Intangible and Tangible Heritage – A Topology of Culture in Contexts of Faith*, PhD thesis, Institute of Cultural Geography, Johannes Gutenberg University of Mainz. [Online] Available at: d-nb.info/1000727173/34 [Accessed September 2nd 2018].
- Schofield, J. (2016), "Being Autocentric: Towards Symmetry in Heritage Management Practices", in Gibson, L. and Pendlebury, J. (eds), *Valuing Historic Environments*, Routledge, London and New York.
- Smith, S. G., Messenger, P. M. and Soderland, A. H. (eds) (2016, II ed.), *Heritage Values in Contemporary Society*, Routledge, London and New York.
- Staniforth, S. and Lloyd, H. (2012), "Use it or lose it: the opportunities and challenges of bringing historic places to life", in *Studies in Conservation*, vol. 57, sup. 1, pp. S286-S294.
- Stanley-Price, N. P. and Jokilehto, J. (2002), "The decision to shelter archaeological sites – Three case-studies from Sicily", in *Conservation and Management of Archaeological Sites*, vol. 5, issue 1-2, pp. 19-34.
- Stephenson, J. (2008), "The Cultural Values Model: An Integrated Approach to Values in Landscapes", in *Landscape and Urban Planning*, n. 84, pp. 127-139.
- Suhartono, Yudi, dkk. 2008. *Studi Konservasi Lukisan Gua Prasejarah di Kabupaten Maros dan Pangkep Tahap I*. Magelang: Balai Konservasi Peninggalan Borobudur.
- 2009. *Studi Konservasi Lukisan Gua Prasejarah di Kabupaten Maros dan Pangkep Tahap II*. Magelang: Balai Konservasi Peninggalan Borobudur.
- 2011. *Studi Konservasi Lukisan Gua Prasejarah di Kabupaten Maros dan Pangkep Tahap III*. Magelang: Balai Konservasi Peninggalan Borobudur.
- Thakur, Nalini. *Archaeological Park as Project*. New Delhi: Architexturez Imprints, 2010. <https://architexturez.net/doc/az-cf-21174>

- Swarbrooke, John. 2002. *The development and management of visitor attractions*. Oxford: Butterworth-Heinemann
- Throsby, D. (2002), "Cultural Capital and Sustainability Concepts in the Economics of Cultural Heritage", in de la Torre, M. (ed.), *Assessing the Values of Cultural Heritage – Research Report*, Getty Conservation Institute, Los Angeles.
- Yaka Çetin, F. and İpekoğlu, B. (2013), "Impact of transparency in the design of protective structures for conservation of archaeological remains", in *Journal of Cultural Heritage*, vol. 14, issue 3, pp. e21-e24.
- UNESCO (1972), *World Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*, UNESCO, Paris. [Online] Available at: whc.unesco.org/archive/convention-en.pdf [Accessed October 13th 2018].
- Waterton, E., Smith, L. and Campbell, G. (2006), "The Utility of Discourse Analysis to Heritage Studies: The Burra Charter and Social Inclusion", in *International Journal of Heritage Studies*, vol. 12, issue 4, pp. 339-355.
- Williams, T. (2018), "The conservation and management of archaeological sites", in *Conservation Perspective – The GCI Newsletter*, vol. 33, n. 1, Spring 2018 *Archaeological Conservation*, pp. 5-9. (online) available at :
www.getty.edu/conservation/publications_resources/newsletters/pdf/v33n1.pdf [Accessed November 13th 2018].
<https://www.slideshare.net/robintgreene/bryson-chapter-2-the-strategy-change-cycle-an-effective-strategic-planning-approach1>.



Balai Pelestarian Cagar Budaya
Sulawesi Selatan